

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI KABUPATEN NUNUKAN
(KAJIAN PERKA LAN NOMOR 12 TAHUN 2013)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

E R L I N A

NIM. 500893861

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND TRAINING IN THE DISTRICT LEADERSHIP LEVEL III NUNUKAN (LAN Perka STUDY NUMBER 12 YEAR 2013)

ERLINA

erlinanunukan@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

Delivery of Education and Leadership Training Level III in Nunukan in 2015 is the implementation of Education and Training based Perka LAN No. 12 of 2013, and a new pattern of education and training through the 5 (five) stages of the learning process. As an organizer, BKDD Nunukan district in carrying out their functions and duties still found things that are less in accordance with the rules. It is empirical, and researcher conduct an evaluation of this fact. So the purpose of this research is to describe and analyze the implementation of PIM III Education and training new pattern in Nunukan, factors that support and hinder, and the work done by BKDD Nunukan in overcoming these obstacles. This study refers to the framework fikirnya Daniel Stufflebeam with models CIPP (Context, Input, Process and Product) and qualitative analysis process by Miles and Huberman. Proof of this research through interviews with informants from BKDD, of coach, mentor, participants and PKP2A III LAN Samarinda as a guarantor of quality. The result is that the implementation of Education and Training PIM III in Nunukan 2015 is broadly in compliance with the provisions of Perka LAN No. 12 of 2013, but has not been orderly administration, facilities and infrastructure that do not meet the standards, and the carrying capacity of Human Resources organizers yet able to create ideal and optimal implementation of Education and Training. The factors that support is for their program Nawacita, budgets are constantly being upgraded, but the inhibiting factor is still hinges on access constraints due to geographical conditions, the availability of WI, Coach, and human resources that have a certificate, so that by BKDD has sought through pick up the ball with stakeholders overseeing the accreditation of Education and Training, then a gradual improvement of infrastructure has even prepared 10 hectares of land to build a facility of Education and Training yyang more konferehensif, also has proposed a budget in order to get accreditation so hopes BKDD can organize independently of Education and Training. Based on this, it is suggested that the organization of the next, BKDD more orderly administration according to standards of the Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia so easily accounted for, then for a more effective and efficient implementation is expected to competence development of human resources through education and training MOT and TOC, and Education and Training coach and Widyaswara of Internal Nunukan own.

Keywords: Evaluation, Education and Training Pim III, Policy

ABSTRAK

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI KABUPATEN NUNUKAN (KAJIAN PERKA LAN NOMOR 12 TAHUN 2013)

ERLINA

erlinanunukan@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi diklat berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, dan merupakan diklat pola baru melalui 5 (lima) tahapan proses pembelajaran. Sebagai penyelenggara, BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengemban fungsi dan tugasnya masih ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan tersebut. Hal empirik inilah, kemudian peneliti mengadakan evaluasi terhadap kenyataan tersebut. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa penyelenggaraan Diklat Pim III pola baru di Kabupaten Nunukan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, dan usaha yang dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini kerangka fikirnya merujuk pada Daniel Stufflebeam dengan model CIPP (*Contex, Input, Process dan Product*) secara kualitatif dan proses analisisnya berdasarkan Miles dan Huberman. Pembuktian dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan dari BKDD, dari Coach, Mentor, peserta dan pihak PKP2A III LAN Samarinda sebagai penjamin mutu. Hasilnya adalah bahwa penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan tahun 2015 secara garis besar telah memenuhi ketentuan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, namun belum tertib administrasi, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar yang ada, serta daya dukung Sumber Daya Manusia penyelenggara belum mampu membuat ideal dan optimalnya penyelenggaraan diklat. Adapun faktor yang mendukung adalah karena adanya program Nawacita, ketersediaan anggaran yang terus ditingkatkan, namun faktor penghambatnya masih bertumpu pada akses keterbatasan akibat kondisi geografis, ketersediaan Wi, Coach, dan SDM yang memiliki sertifikat, sehingga oleh BKDD telah berupaya melalui menjemput bola dengan *stakeholder* yang membidangi akreditasi Diklat, kemudian secara bertahap melakukan perbaikan sarana prasarana bahkan telah menyiapkan lahan 10 Ha untuk membangun fasilitas diklat yang lebih konferehensif, juga telah mengajukan anggaran dalam rangka mendapatkan akreditasi sehingga harapannya BKDD dapat menyelenggarakan diklat dengan mandiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disarankan agar penyelenggaraan berikutnya, BKDD lebih tertib administrasi sesuai standar dari LAN RI sehingga mudah dipertanggungjawabkan, kemudian untuk lebih efektif dan efisiensi penyelenggaraannya diharapkan pengembangan kompetensi SDM melalui diklat MOT dan TOC, dan diklat coach dan widyaswara dari internal Kabupaten Nunukan sendiri.

Kata Kunci : Evaluasi, Diklat Pim III, Kebijakan.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI KABUPATEN NUNUKAN (KAJIAN PERKA LAN NOMOR 12 TAHUN 2013)

Penyusun TAPM : E R L I N A

NIM : 500893861
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II



Dr. Sudirah, M.Si
 NIP. 19590201 198703 1 002

Pembimbing I,



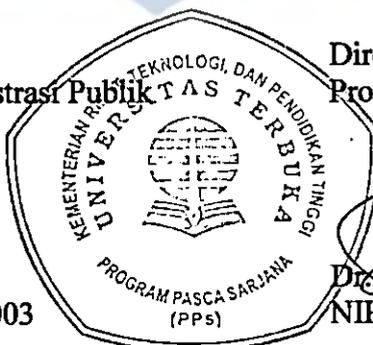
Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
 Program Magister Administrasi Publik
 Pasca Sarjana



Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003



Direktur
 Program Pascasarjana



Dr. Suciati, M.Sc., Ph.D.
 NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : ERLINA
 NIM : 500893861
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI
 KABUPATEN NUNUKAN (KAJIAN PERKA LAN NOMOR
 12 TAHUN 2013)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :
 Hari/Tanggal : Sabtu / 18 Juni 2016
 Waktu : 13.30 – 15.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

.....

Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A.

.....

Pembimbing I
 Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

.....

Pembimbing II
 Nama: Dr. Sudirah, M.Si

.....

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI KABUPATEN NUNUKAN (KAJIAN PERKALAN NOMOR 12 TAHUN 2013)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 18 Juni 2016

Yang Menyatakan



(Handwritten signature)
(E R L I N A)
NIM. 500893861

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hanya milik Tuhan semesta alam lautan ilmu, dan dengan kemurahan-Nya sehingga kita mendapatkan sedikit ilmu milik-Nya. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sang Maha Rahman dan Rahim, yang telah menitipkan sedikit kecerdasan dan petunjuknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan (Kajian Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013)”** yang dilakukan sebagai penunjang memasuki tahap awal pembuatan Tesis.

Dengan selesainya proposal penelitian ini, penulis melalui banyak rintangan terkait ketersediaan waktu yang sangat minim karena disamping sebagai mahasiswa harus juga berkutat sebagai aparatur sipil negara yang mengemban tugas yang juga tidak sedikit. Disamping itu penulis juga memiliki kegiatan yang menuntut harus terselesaikan dengan koordinasi berbagai stakeholder terkait dengan tugas dan tanggungjawab kantor sehingga harus meninggalkan Kabupaten Nunukan, sehingga hampir tidak punya waktu untuk mengelola dan mengendalikan semuanya. Karena itu, tiadalah kata yang patut saya sematkan kecuali Terima Kasih Tak Terhingga kepada keluarga besar saya Orang tua terkasih (*H. Arbenan dan Hj. Kartinem*) atas doa-doanya yang tak usai, suami tercinta (*Abdul Munir, ST*) yang tiada henti memberi restu, anak-anak tersayang (*Abang, Kakak Fhia dan Adek Ozy*) yang sabar mengerti kesibukan ibundanya dan rekan-rekan tanpa terkecuali yang membantu dan mensupport sehingga kendala ini dapat penulis lalui.

Dengan selesainya proposal penelitian ini pula, dengan sègenap kejujuran penulis menyadari bahwa ini tercipta atas pertolongan Allah SWT melalui hamba-hamba-Nya untuk membantu, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Kepala Badan Kèpegawaian Dan Diklat Daèrah Kabupatèri Nunukan yang telah bersabar dengan keterbatasan waktu saya berbagi antara kebutuhan kantor dan penulisan awal ini, serta telah memberi

saya kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan saya setingkat lebih tinggi.

2. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. Sudirah, M.Si. Sungguh penulis tersentuh dengan perhatian yang luar biasa, bimbingan yang maksimal dan bijaksana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kecerdasan buat beliau berdua. Aamiin.
3. Seluruh Staf jajaran BKDD Kabupaten Nunukan, yang membantu dalam pengumpulan data proposal penelitian ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Terbuka.
5. Teman-teman terbaik (Suharni, SAP), Masruddin dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa UT yang banyak memberikan dukungan, saran dan kritiknya sehingga menjadi bagian yang berkontribusi dalam penulisan penelitian ini.

Terakhir, kepada siapa saja yang membaca penelitian ini, terima kasih telah membuka mata dan meluangkan waktunya untuk membaca karya ini. Semoga memberi ilmu dan keilmuan, dan bermanfaat bagi segenap civitas akademik.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan, semoga keterbatasan yang ada didalamnya menjadi kesempurnaan bagi peneliti berikutnya. Tiada kata berhenti, ketika menyadari bahwa sesungguhnya hidup adalah belajar, membaca dan bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas memaknai hidup.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

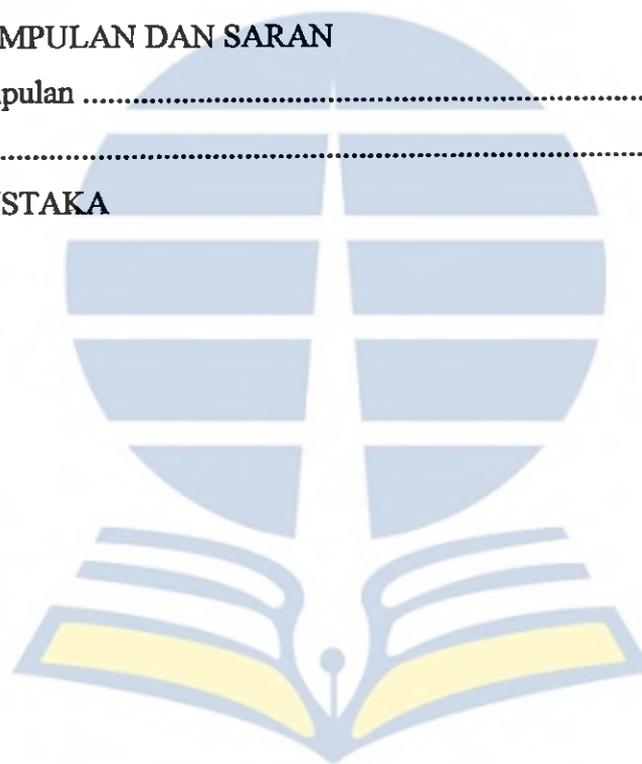
Nunukan, Juni 2016

Lin@

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstract	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Layak Uji	v
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Pernyataan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Konsep Administrasi Publik	11
2. Konsep Kebijakan Publik	17
3. Konsep Evaluasi	20
4. Evaluasi Program	25
5. Model Evaluasi Program	28
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Fikir	46
D. Operasional Konsep	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	49
B. Sumber Informasi Dan Pemilihan Informan	50

C. Prosedur Pengumpulan Data	51
D. Prosedur Pengolahan Data	52
E. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
B. Temuan Dan Pembahasan	68
1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan	68
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Diklat Pim III	120
3. Usaha-Usaha Yang dilakukan	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	124
2. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tugas Evaluator Menurut Stufflebeam	40
Gambar 2.2 Kerangka Fikir	46
Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman	54
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nunukan	56
Gambar 4.2 Tahapan Dan Agenda Diklat Pim III	98



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pegawai BKDD Berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 4.2 Rekap ASN Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.3 Rekap ASN Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.4 Rekap ASN Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.5 Rekap ASN Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKDD	64
Tabel 4.7 Sasaran Dan Indikator Jangka Menengah BKDD	65
Tabel 4.8 Keadaan Peserta Diklat Berdasarkan Umur	68
Tabel 4.9 Daftar Nama Coach Diklat Pim III	82
Tabel 4.10 Rekap Respon peserta terhadap Mata Diklat Widyaswara	97
Tabel 4.11 Pembagian Kelompok berdasarkan Coach Diklat Pim III	100
Tabel 4.12 Aspek yang dinilai penguji dalam proyek perubahan	108
Tabel 4.13 Kualifikasi Kelulusan Diklat Pim III	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma tata kelola pemerintahan birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi itu muncul karena adanya beberapa upaya pemerintah menata ulang proses birokrasi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, yang berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Reformasi ini, menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*). Sedarmayanti, (2010: 67).

Melaksanakan reformasi birokrasi membutuhkan pemberdayaan aparatur melalui pembaharuan pada berbagai aspek, salah satunya daya dukung regulasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 dalam bab IV Butir 1.2 dinyatakan "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dipusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya".

Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur atau aparatur sipil negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka

pada sektor publik, seiring dengan berbagai kemajuan teknologi, pengetahuan dan budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintah, upaya pengembangan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan dan wajib ditingkatkan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). Menyikapi perkembangan tuntutan nasional dan tantangan global, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), diperlukan ASN yang memiliki kompetensi bidang tugas/pekerjaan. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, sebagaimana ditegaskan pada pasal 70 (ayat 1 dan 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa : “setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran”.

Menyikapi pemberlakuan UU ASN dalam rangka memperoleh/ mengembangkan kompetensi pegawai ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) telah menetapkan beberapa kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil berupa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (PERKA LAN) Nomor 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan I, II, III dan IV. Berdasar Perka LAN-RI tersebut, Diklatpim Tk. I bertujuan untuk mencetak pemimpin visioner, Diklatpim Tk. II untuk mencetak pemimpin strategis, Diklatpim Tk. III untuk mencetak pemimpin taktikal, dan Diklatpim Tk. IV untuk mencetak pemimpin di tataran operasional. (Burhanuddin 2015 : 2)

Diklat PIM pola baru LAN ini dijadikan sebagai reformasi diklat dengan perubahan sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat, dan media pembelajaran yang berbeda dengan diklat PIM pola lama. Diklat Pim Pola baru ini difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dan tertanamnya etika publik yang tinggi serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini. Adapun perbedaan pola lama dengan pola baru yaitu :

- a. Perbedaan Filosofi yaitu pola lama output diklat memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menjadi manajer, sedangkan pola baru kemampuan output diklat mampu membuat perubahan dan menjadi agen perubahan.
- b. Perbedaan waktu pelaksanaan : Diklat pola lama diselenggarakan selama satu bulan lebih (53 hari) sedangkan pola baru relatif lebih panjang (PIM I 151 hari, PIM II 92 hari, PIM III 93 hari, PIM IV 97 hari).
- c. Perbedaan sistim pelaksanaan : Pola lama dilaksanakan full klasikal (seluruh pembelajaran dalam kampus ditambah orientasi lapangan (OL), OL menitik beratkan kegiatan mengidentifikasi masalah kemudian membuat perencanaan pemecahan masalah. Sedangkan pola baru dilaksanakan dengan dual sistim yaitu sebagian diselenggarakan dalam kampus, sebagian lagi diselenggarakan diluar kampus ditambah *benchmarking*. *Benchmarking* menitik-beratkan pada identifikasi kiat sukses pembanding dan membawa pulang kiat itu bahkan memodifikasi untuk lebih cocok dan lebih baik diimplementasikan di daerah sendiri (*to best practice*). Pola lama kondisi organisasi direncanakan programnya

- sehingga berjalan stabil kegiatannya kedepan dan menampilkan performa lama sedangkan pola baru dengan kondisi organisasi didiagnosa, buat usul perubahan dan laksanakan perubahan sehingga menampilkan performa baru.
- d. Perbedaan kompetensi lulusan : kompetensi PIM III pola lama adalah Kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi. Sedangkan kompetensi PIM III pola baru adalah Kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
- e. Perbedaan Tahapan Pembelajaran : Diklat Pola lama hanya mengenal satu tahapan saja sedangkan pola baru terdiri dari 5 lima tahapan yaitu tahap I diagnose organisasi (*on campus*, 31 sesi), tahap II *breakthrough I* (*off campus*, 16 sesi) tahap III merancang proyek perubahan (*on Campus*, 51 sesi), tahap IV *breakthrough II*, laboratorium kepemimpinan (*off campus*, 15 sesi), tahap V evaluasi (*on campus*, 6 sesi).
- f. Perbedaan Media Belajar : Media belajar pola lama adalah modul, bahan tayang sedangkan media pola baru adalah modul, bahan refrensi, bahan tayang, kasus, film pendek, data statistik.
- g. Perbedaan Materi : Materi pola lama adalah (Teknik Kiat I dan Kiat II, issu aktual, teknik presesntasi, PMPK kertas kerja perorangan, kertas kerja kelompok, kertas kerja angkatan, orientasi lapangan, seminar dilokus, seminar didiklat) sedangkan materi diklat pola baru adalah *self mastery* (pilar pilar kebangsaan, integritas, standard etika publik, sistim

administrasi negara kesatuan RI), diagnose organisasi(diagnosa masalah organisasi dan tupoksi) , Inovasi (pengembangan potensi diri, berpikir kreatif dan inovatif), Membangun Tim Efektif (kecerdasan emosional dan tim efektif), Proyek perubahan (penjelasan proyek perubahan, implementasi proyek perubahan dan evaluasi kepemimpinan) seminar proposal proyek perubahan, seminar implementasi /hasil.

- h. Perbedaan Methodologi: Methodologi diklat pola lama adalah ceramah tanya jawab, praktek sedangkan methodologi pola baru adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, visitase, penugasan, *rollplay*, *brainstorming*, diiringi kombinasi musik dan gerak.
- i. Perbedaan sarana belajar : Sarana diklat Pola lama adalah papan tulis, LCD dan kertas plano, *sound system* sedangkan diklat pola baru adalah papan tulis, benner, kertas plano, *flip chart*, *sound system*, LCD, Jaringan *Wireless fidelity (Wi-Fi)*, buku referensi, modul/bahan ajar, bank kasus, teknologi multimedia.
- j. Perbedaan Kurikulum : Kurikulum diklat pola lama adalah klasik belajar banyak pengetahuan luas (materi banyak) sedangkan kurikulum diklat pola baru adalah dual sistim dengan sedikit belajar (materi sedikit) tapi banyak melakukan (mencitakan perubahan). Orang pintar belum tentu bisa melakukan tapi orang yang bisa melakukan pasti pintar.
- k. Perbedaan lulusan: Diklat pola lama menghasilkan lulusan menejer yang berpengetahuan sedangkan diklat pola baru menghasilkan *leader* dan agen perubahan (*change agent*)

Pembelajaran Diklatpim pola baru bertujuan untuk mencetak pemimpin yang inovatif guna melakukan perubahan dalam memperbaiki manajemen pemerintahan. Pemimpin yang diharapkan mampu menghasilkan inovasi pada berbagai aspek/bentuk, seperti inovasi proses, inovasi hasil, dan inovasi pelayanan. Semua bentuk inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi keunggulan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Badan kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Nunukan berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru manajemen sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*), agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan dinamika perubahan misi ASN.

Perwujudan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya Diklat Pim III yang bertempat di Kabupaten Nunukan, sesuai dengan kebijakan pola baru tersebut. Penyelenggaraannya mencakup berbagai instrumen yang harus dipenuhi baik dari sisi orangnya, metodenya, anggaran maupun pelaksanaan diklat itu sendiri, sehingga BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengimplementasikan Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 tentu harus menyesuaikan dengan segala keterbatasannya, karena disadari bahwa setiap daerah memiliki kekurangan dan keterbatasan masing-masing, namun substansi idealnya tetap mengacu pada Perka

tersebut. Sebagai bagian dari penyelenggara diklat Pim III di Kabupaten Nunukan, berkewajiban memahami dan mengkaji lebih lanjut bagaimana memaksimalkan penyelenggaraan Diklat Pim Pola Baru menuju reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Kabupaten Nunukan. Perubahan manajemen kepegawaian yang mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan dinamis serta terbuka, diperlukan pembangunan karakter ASN Kabupaten Nunukan yang memiliki kemampuan serta daya saing yang tinggi dan mampu mencapai tujuan dan program pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah.

Merujuk kepada harapan dan tantangan tersebut, hasil pengamatan awal penyelenggaraan Diklat Pim III Kabupaten Nunukan dengan pola baru, ada beberapa hal yang masih menjadi bahan pertanyaan terhadap kesesuaian dengan perka LAN tersebut diantaranya adalah :

- a. Bahwa sesuai dengan konteks Persyaratan lembaga diklat yang boleh melaksanakan Diklat Pim III adalah lembaga diklat yang terakreditasi sebagaimana tertuang dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2013, namun BKDD Kabupaten Nunukan dapat melaksanakan Diklat Pim III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan walaupun belum terakreditasi , karena adanya penjamin mutu kediklatan.
- b. Menyikapi input yang merupakan rancangan penyelenggaraan diklat pim III, misalnya ditemukan terdapat beberapa calon peserta diklat sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), beberapa peserta kesulitan dalam menentukan mentornya, sehingga penunjukannya

- dialihkan kepada asisten dalam garis komandonya yang memungkinkan eksekusi proyek perubahan terkendala secara teknis.
- c. Sarana dan Prasarana kediklatan belum memenuhi standar persyaratan dan kriteria yang seharusnya, hal ini berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi waktu tahapan pelaksanaan Diklat Pim III di kabupaten Nunukan.
 - d. Dalam hal proses penyelenggaraan terdapat kegiatan *out bond*, dimana dalam hal ini perka Lan Nomor 12 tahun 2013, tidak terdapat dalam kurikulum yang telah ditetapkan, disamping itu pemerintah Kabupaten Nunukan belum memiliki Widyaswara sendiri, sehingga dalam pelaksanaan Diklat Pim III sangat bergantung pada widyaswara yang ditunjuk oleh PKP2A III LAN – Samarinda.
 - e. Terkait dengan proyek perubahan yang dihasilkan oleh para peserta Diklat Pim III maupun IV, BKDD Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara diklat belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat berkaitan dengan kelanjutan dari pada implementasi proyek perubahan yang telah dibuat.

Mencermati berbagai temuan empirik di atas, permasalahan tersebut diindikasikan bahwa Diklat Pim III yang dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Nunukan penyelenggaraannya belum optimal sehingga masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan kualitas. Hal ini mendorong penulis menjadikan dasar perlunya dilakukan evaluasi terhadap program diklat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program BKDD secara rutin dan berkelanjutan. Hal-hal ini kemudian mendasari penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ini, dengan mengambil topik atau judul “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan (Kajian Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terutama berkaitan dengan fokus penelitian yang menjadi sasaran penelitian ini, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Diklat Pim III di Kabupaten Nunukan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Diklat Pim III di Kabupaten Nunukan ?
3. Usaha apa saja yang dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi penyelenggaraan Diklat Pim III pola baru di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

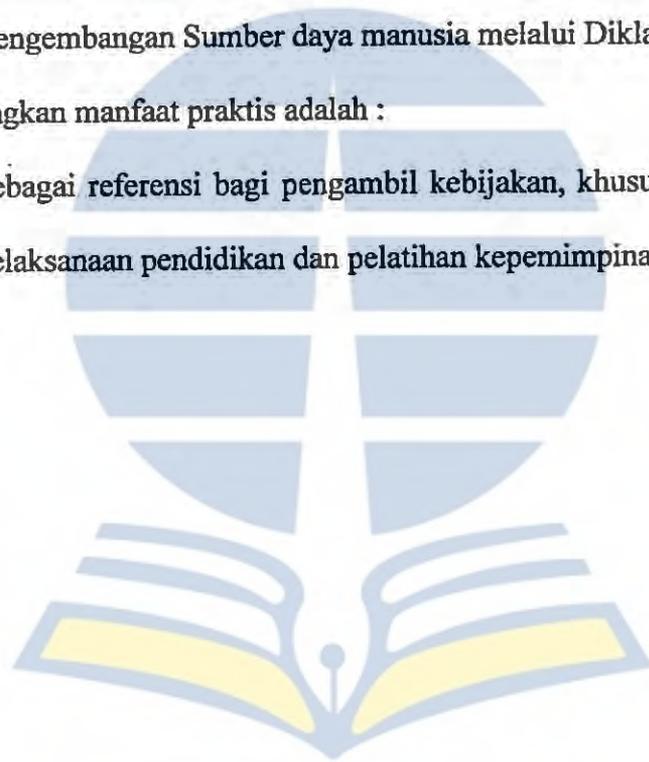
Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat teoritis adalah :

1. Sumbangsih terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumberdaya manusia
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama mengenai pengembangan Sumber daya manusia melalui Diklat Pim.

Sedangkan manfaat praktis adalah :

1. Sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, khususnya bagi evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di daerah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Konsep Administrasi Publik

Memasuki abad 21 administrasi publik memasuki *notion* baru. Administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi negara, fungsinya lebih dari itu administrasi publik sebagai instrumen kolektif, sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Pergeseran ini menandai, administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif. Praktek administrasi publik yang selama ini berlangsung luas, yang menempatkan segala urusan publik sebagai bagian urusan negara, sarwa negara (Miftah Thoha, 2000 : 3).

Wilayah administrasi publik demikian ini oleh Frederickson (1997 : 79) disebut administrasi publik sebagai *governance*. Dengan kata lain administrasi publik sebagai *governance* yang pada dasarnya administrasi publik mempunyai lokus sinergi kiprah pada wilayah publik dengan menyertakan pelaku-pelaku yang genuinely dari publik dengan fokus agenda *interest* publik yang memang menjadi kebutuhannya (*common interest*). Sehingga sejalan dengan itu tepat kiranya (Keban, 2008 : 4) menyatakan bahwa Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurutnya penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Administrasi secara umum dipandang sebagai suatu kegiatan bersama, terdapat di mana-mana selama ada manusia yang hidup dan bekerjasama dalam kelompok. Secara teoritik pengertian administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris "administer" yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari *ad* dan *ministrare* yang berarti "to serve" melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, secara etimologis administrasi adalah melayani secara intensif (Afiffuddin, 2010 : 3)

Administrasi dalam arti yang luas menurut Albert Lepawsky dalam Siagian (1985 : 2) mencakup organisasi dan manajemen dan juga pendapat William H. Newman yang mengatakan bahwa administrasi dapat di pahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama. Dilanjutkan pula oleh Siagian (1985 : 2) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya di lakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Slamet Wijadi Atmosudarso (1961 : 28) mengemukakan bahwa pengertian administrasi dapat di tinjau dari sudut: (1) institusional, yaitu administrasi adalah keseluruhan atau kelompok orang-orang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. (2) fungsional, yaitu segala kegiatan dan tindakan yang di lakukan untuk mencapai tujuan termasuk tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiritindakan tersebut bersifat melihat ke depan; dan (3) administrasi sebagai proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai

penyelenggaraan sehingga tercapainya tujuan tersebut (The Liang Gie 1983 : 62). Administrasi sebagai proses ini menggambarkan kerjasama yang sistematis menggunakan sumber daya organisasi seperti manusia, uang, dan material (*man, money, and material*) dilaksanakan atas dasar kebijakan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan.

Teori Administrasi menjelaskan upaya upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol dalam Pasolong (2011 : 13) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar

10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2011 : 14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut William L. Morrow dalam Pasolong (2011 : 16) sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, atautkah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih

realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

The Liang Gie dalam Afiffuddin (2010 : 5) menyimpulkan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan – pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang bermaksud mencapai tujuan apapun dalam usaha bersama dari sekelompok orang. Menurut hakekat dan kenyataannya administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan berlangsung dalam usaha bersama dari sekelompok orang yang bermaksud mencapai tujuan.

Jadi administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana, suatu usaha dengan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi pendidikan cenderung sama dengan pengertian administrasi yaitu aktivitas sekelompok orang atau proses yang lazim terdapat dalam usaha bersama untuk menyelenggarakan aktivitas secara kelembagaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bertitik tolak pada pandangan tersebut dapat ditegaskan bahwa, administrasi pendidikan dan pelatihan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan kebutuhan penyelenggaraan diklat, dan diklat dilakukan oleh dinas/lembaga sebagai pihak yang memberikan pelayanan belajar kepada peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran dan pelatihan.

Konsep administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan aturan yang telah ditetapkan sistem, asas, prosedur dan teknik kerjasama dengan setepat-tepatnya. Konsep administrasi jika diimplementasikan pada kegiatan dalam konteks pendidikan dan pelatihan, menjadi administrasi pendidikan dan pelatihan sebagai suatu proses sistem perilaku mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan terjadilah suatu proses interaksi manusia dalam sistem yang terarah dan terkoordinir dalam usaha mencapai tujuan diklat. Karena itu, administrasi diklat merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang berurutan dan beraturan menggunakan prinsip – prinsip administrasi. Kegiatan administrasi diklat dalam rangka memanfaatkan semua potensi atau sumberdaya yang tersedia, untuk mencapai tujuan yaitu kebutuhan yang diperjuangkan agar terpenuhi secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketika pemerintah kemudian membuat sistem dan aturan yang mengatur pendidikan dan pelatihan dan dikontekskan dalam bentuk administrasi, yang bertujuan mengatur publik maka pemerintah kemudian dianggap membuat kebijakan yang mengarah pada kebutuhan publik. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III adalah bagian bagian dari administrasi publik sebagai proses dari kebijakan publik. Maka tepatlah kiranya pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) bahwa Administrasi public adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta “Polis” (negara kota) dan Pur (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan akhirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lain *police an politics* menurut Dunn dalam (Muhajir Darwan 1990 : 10). Lebih lanjut dijelaskannya pula istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (1975 : 1) menyatakan “*what ever government choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya (wahab, 1991 : 12)

Menurut Frederock (dalam Wahab, 1991 : 13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi ini berarti pemerintah

harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair. Karena kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah, dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat maka dikatakan kebijakan publik.

Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara/pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002 : 76).

Sejalan dengan hal tersebut, Woll (1966) :

“kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”

Sudut pandang lain, Hakim (2003 : 38) mengemukakan bahwa :

“Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan

pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures*”.

Anderson dalam Hakim (2003 : 39) mengatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :

- 1) Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
- 2) Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
- 3) Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
- 4) Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
- 5) Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Memahami konsep di atas, tepat kiranya Riant Nograho (2004 : 50) mengatakan bahwa kebijakan publik hadir dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama dengan mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah disepakati, tujuan bersama yang dicita-citakan. Jadi visi dan misi BKDD Nunukan adalah peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu aksi dari kebijakan publik adalah ditetapkannya perka LAN Nomor 12 tahun 2013 sebagai pedoman penyelenggaraan diklat yang bertujuan menciptakan aparatur yang memiliki kepemimpinan taktikal (kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan implementasi program tersebut) dengan kemampuan:

1. Membangun karakter integritas;

2. Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;
3. Melakukan kolaborasi internal dan eksternal dalam mengelola program-program kearah efektifitas dan efisiensi;
4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugas dan fungsinya guna mewujudkan program-program yang lebih efektif dan efisien;
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya.

3. Konsep Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris, yang lazim diartikan dengan penaksiran atau penilaian. Kata kerjanya adalah *evaluate* yang berarti menaksir atau menilai. Sedangkan orang yang menilai atau menaksir disebut sebagai *evaluator*. Sejumlah ahli mengemukakan pemahaman evaluasi secara etimologis, misalnya Grounlund dalam Djaali dan Pudji (2000 : 18) ” *a system atic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupil* ” : suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program tercapai. Dalam buku yang sama, Nurkencana menyatakan bahwa evaluasi dilakukan berkenaan dengan proses kegiatan untuk menentukan nilai sesuatu. Sementara Raka Joni mengartikan evaluasi sebagai suatu proses dimana kita mempertimbangkan sesuatu barang atau gejala dengan mempertimbangkan patokan-patokan tertentu, patokan tersebut mengandung pengertian baik-tidak baik, memadai tidak memadai, memenuhi syarat tidak memenuhi syarat, dengan perkataan lain menggunakan *value judgment*.

Untuk memperjelas lagi, ada beberapa perumusan penilaian sebagai padanan kata evaluasi menurut beberapa ahli diantaranya Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008 : 34), evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining,

and providing useful information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008 : 34), Worthen dan Sanders mendefenisikan "evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu".

Adam dalam Arikunto (2010 : 16) menjelaskan bahwa kita mengukur berbagai kemampuan anak didik. Bila kita melangkah lebih jauh lagi dalam menginterpretasikan skor sebagai hasil pengukuran itu dengan menggunakan standar tertentu untuk menentukan nilai dalam suatu kerangka maksud pendidikan dan pelatihan atas dasar beberapa pertimbangan lain untuk membuat penilaian, maka kita tidak lagi membatasi diri kita dalam pengukuran karena telah mengevaluasi kemampuan atau kemajuan anak didik. Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam Arikunto (2010 : 16), menjelaskan bahwa evaluasi berhubungan dengan pengukuran . Dalam beberapa hal evaluasi lebih luas, karena evaluasi juga termasuk penilaian penilaian formal dan penilaian intuitif mengenai kemajuan peserta didik. Evaluasi juga mencakup penilaian tentang apa yang baik dan apa yang diharapkan. Dengan demikian hasil pengukuran yang benar merupakan dasar yang kokoh untuk melakukan penilaian.

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai, definisi di atas menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, dimana sesuatu dapat dicapai. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengikuti keadaan

sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan Toha (2003 : 1). Lebih lanjut dijelaskannya pula bahwa evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktifitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2010 : 20), bahwa: Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan Uzer (2003 : 120), mengatakan bahwa Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sedangkan Ahmad dalam Djaali dan Pudji (2008 : 1), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai

sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek,dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian". Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000 : 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Begitupun Ralph Tyler dalam Arikunto (2010:7) menyatakan bahwa Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sehingga Arikunto (2010 : 17) kemudian menyimpulkan bahwa penilaian lebih menekankan kepada proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik-buruk yang bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran menekankan proses penentuan kualitas sesuatu yang dibandingkan dengan satuan ukuran tertentu. Selanjutnya hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif akan diolah dan dibandingkan dengan kriteria sehingga didapat hasil penilaian yang bersifat kualitatif.

Menurut Blaine dan Sanders (2004 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut

senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. Dengan demikian, kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan informasi yang diperoleh melalui pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan terhadap sebuah kegiatan, termasuk dalam hal pendidikan dan pelatihan. Dengan pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara evaluasi hasil belajar pembelajaran adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar pembelajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang sistemik dilakukan untuk memperoleh dan menyajikan informasi atau data guna pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang diacu atau ditetapkan sebelumnya. Jadi, evaluasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap keberhasilan pencapaian proses dan tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu bentuk evaluasi yang dikenal dalam kegiatan kependidikan adalah evaluasi program. Ralph Tyler, Scriven, Lee Cronbach, Daniel Stufflebeam dan Malcolm Provus termasuk diantara ahli evaluasi yang banyak menulis secara signifikan tentang evaluasi program. Kajian evaluasi program cukup bervariasi yang turut mempengaruhi jenis model evaluasi. Dari beberapa jenis, cara ataupun penyajian evaluasi program diidentifikasi bahwa

semua bermuara pada penyediaan informasi dalam rangkaian pengambilan keputusan (*decision*) oleh *decision maker*.

Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan, tetapi secara implisit evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh objek evaluasi berdasarkan kepada standar-standar tertentu. Apakah terdapat suatu kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena hasil evaluasi merupakan salah satu landasan untuk menentukan apakah suatu program berjalan secara efektif atau gagal mencapai tujuannya.

Tujuan dan Fungsi Evaluasi Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford dalam Arikunto (2002 : 13), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan; 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil; 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan dan; 4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

4. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu

merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Setiap program pendidikan selalu diikuti dengan kegiatan evaluasi, baik menyangkut hasil maupun terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Banyak pakar yang mengemukakan definisi tentang evaluasi, diantaranya adalah Grounlund dan Linn, (2000 : 5) yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan data, analisis data dan interpretasi informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pengajaran. Djaali dan Mulyono (2000 : 1) menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2010 : 22), ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu :

- 1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- 2) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit).
- 3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- 4) Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

Dalam model evaluasi, ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukannya (Umar, 2002 : 41-42), yaitu :

- 1) Sistem assessment yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
- 2) Program planning yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
- 3) Program implementation yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.
- 4) Program Improvement yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
- 5) Program Certification yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

- 6) Pendekatan-pendekatan terhadap evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting.

Terkait penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, hal apa yang akan diambil sebagai ketika telah melakukan penelitian. Hasil dari evaluasi yang dilakukan peneliti dapat diajukan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, untuk menjadi bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

5. Model Evaluasi Program

Model Evaluasi Program, khususnya program yang berkaitan dengan kependidikan atau pelatihan menurut Isaac dan Michael (1983:7), dapat dikelompokkan : *Goal Oriented Evaluation; Transactional Evaluation; Evaluation Research; Goal Free Evaluation; Adversary Evaluation; Adversary Evaluation; Model Kirkpatrick dan Decision Oriented Evaluation (CIPP)*.

Beberapa kelompok evaluasi lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Goal Oriented Evaluation* (Pendekatan Berorientasi Tujuan)

Pendekatan berorientasi tujuan ini pertama kali dikenalkan oleh Ralph Tyler tahun 40-50 an sebagai standar baru bagi evaluasi pendidikan. Sebelumnya untuk mengevaluasi bidang pendidikan dilakukan dengan tes yang menggunakan acuan kriteria. Tyler merumuskan evaluasi hasil belajar dari tujuan pembelajaran

berdasarkan taksonomi tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Bloom dan Krathwohl. Pendekatan ini kemudian diberinama Pendekatan/ model Tyler, sesuai nama pengembangnya. Model Tyler ini kemudian banyak dipakai untuk mengevaluasi hasil atau program pendidikan. Cara pendekatan berorientasi tujuan ini bisa juga digunakan untuk mengevaluasi program lain seperti program kesehatan.

Tyler menggunakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang berhasil diamati untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dari suatu program. Pendekatan ini memfokuskan pada tujuan spesifik dari program dan sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Berikut ini langkah-langkah dari Tyler dalam Tayibnaps dkk (2008 : 52) untuk menentukan sejauh mana tujuan program/kegiatan pendidikan telah dicapai :

1. Menetapkan tujuan umum
2. Menggolongkan sasaran atau tujuan
3. Mendefinisikan tujuan dalam konteks istilah perilaku
4. Menentukan situasi dimana pencapaian tujuan dapat ditunjukkan
5. Mengembangkan atau memilih teknik pengukuran
6. Mengumpulkan data kinerja
7. Membandingkan data kinerja dengan perilaku yang menggambarkan tujuan.

Setelah langkah terakhir ini selesai, kesenjangan antara kinerja dan tujuan yang diinginkan dapat diketahui. Kemudian hasil ini digunakan untuk mengoreksi kekurangan program. Pemikiran Tyler ini secara logis bisa diterima dan juga mudah dipakai oleh para praktisi evaluasi pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru/praktisi pendidikan pasti akrab dengan tujuan umum dan tujuan khusus setiap kegiatan pendidikan. Tyler juga menggunakan pre-test dan post-test untuk digunakan sebagai salah satu teknik pengukuran.

Kekuatan dan Kelemahan Pendekatan Evaluasi berorientasi Tujuan

Kekuatan utama dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti mudah diikuti, mudah diterapkan dan juga mudah disetujui untuk diteliti oleh direktur program. Pendekatan ini telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran dan instrumen untuk berkembang. Literatur mengenai pendekatan ini pun berlimpah, ide kreatif dan model-model baru yang lahir dari pendekatan inipun banyak bermunculan. Dengan pendekatan ini pemilik program bisa melihat lebih jelas hasil pencapaian dari suatu program sehingga bisa menilai dan menimbang suatu program. Namun walau pendekatan ini banyak berguna, ada beberapa kritik yang muncul mengenai pendekatan berorientasi tujuan ini, seperti yang diungkapkan oleh fitzpatrick, sanders dan worthen dalam Tayibnaxis, Farida Y (2008 : 23) sebagai berikut :

- Kurangnya komponen evaluasi yang riil, lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri
- Kekurangan standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja
- Mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri
- Mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program
- Melupakan konteks mengenai objek evaluasi dilaksanakan
- Mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan
- Meninggalkan bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program
- Menghasilkan pendekatan yang linier dan kurang fleksibel

2) *Transaction Evaluation*

Model ini berusaha melukiskan proses sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Model ini mengevaluasi program yang berusaha melukiskan proses sebuah program dan

pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Pada pendekatan ini kegiatan evaluasi diharapkan berjalan natural dan ada keterlibatan (partisipasi) evaluator pada lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan ini tepat terutama dalam rangka penilaian proses atau implementasi program.

3) *Evaluation Research*

Menurut Childers (2000 : 25) tidak mudah untuk didefinisikan evaluasi *research*, kesulitannya lebih karena kompleksitas dari penelitian yang harus dilakukan sebagai sesuatu penelitian evaluasi sekaligus sebagai suatu penelitian yang harus berbasiskan evaluasi. Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi instruksional. Evaluasi ini banyak dilakukan dalam program pendidikan, dan ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam eksperimen tersebut, diantaranya :

1. Kesulitan administratif, sedikit sekali sekolah yang bersedia dijadikan sekolah eksperimen.
2. Masalah teknis dan logis, yaitu kesulitan menciptakan kondisi kelas yang sama untuk kelompok-kelompok yang diuji.
3. Sukar untuk mencampurkan guru-guru untuk mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok control, pengaruh guru-guru tersebut sukar dikontrol.
4. Ada keterbatasan mengenai manipulasi eksperimen yang dapat dilakukan

4) *Goal Free Evaluation*

Evaluasi model *goal free evaluation*, fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga

membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan *cost benefit analysis*.

Tujuan program tidak perlu diperhatikan karena kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan terakhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak bermanfaat. Dapat disimpulkan bahwa, dalam model ini bukan berarti lepas dari tujuan tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci perkomponen yang ada. Scriven menekankan bahwa evaluasi itu adalah interpretasi *Judgement* ataupun *explanation* dan evaluator yang merupakan pengambil keputusan dan sekaligus penyedia informasi.

Scriven dalam Tujuan Evaluasi Model Gratis menunjukkan bahwa fokus pada program atau tujuan kegiatan ini dapat menjadi tempat awal yang penting untuk teknolog bekerja dalam domain evaluasi. Scriven percaya bahwa "tujuan program tertentu tidak harus diambil sebagai yang diberikan," tapi diperiksa dan dievaluasi juga Guskey dalam Mirza Bashirudin Ahmad (2013 : 124).

Kekurangan dan Kelebihan Goal Free Evaluation

Kelebihan dari model bebas tujuan di antaranya adalah:

- a. Evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka (bias).
- b. Model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Melalui model ini, Scriven ingin evaluator mengukur kesan yang didapat dari sesuatu

- program dibandingkan dengan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur.
- c. Pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan evaluasi.
 - d. Kelebihan lain, dengan munculnya model bebas tujuan yang diajukan oleh Scriveren, adalah mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk.

Walaupun demikian, yang diajukan Scriveren ternyata juga memiliki kelemahan seperti berikut:

- a. Model bebas tujuan ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting, seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu peristiwa dan bagaimana mengidentifikasi pengaruh tersebut.
- b. Walaupun ide Scriveren bebas tujuan bagus untuk membantu kegiatan yang paralel dengan evaluasi atas dasar kejujuran, pada tingkatan praktis Scriveren tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan.
- c. Tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan walau pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan.
- d. Diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini.
- e. Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja.

Model bebas tujuan merupakan titik evaluasi program, dimana objek yang dievaluasi tidak perlu terkait dengan tujuan dari objek atau subjek tersebut, tetapi langsung kepada implikasi keberadaan program apakah bermanfaat atau tidak objek tersebut atas dasar penilaian kebutuhan yang ada.

5) Tahap model evaluasi *adversary*

Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga hukum.

Dalam prakteknya, model *adversary* terdiri atas empat tahapan Mirza Bashirudin

Ahmad (2013 : 125) yaitu :

- a. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.
- b. Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.
- c. Membentuk dua tim evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk berargumentasi.
- d. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal. Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argument dan bukti sebelum mengambil keputusan.

6) *Model Kirkpatrick* dalam Tayibnapi (2008 : 39). Model ini dibangun atas empat tingkatan evaluasi (*four levels of evaluation*), yakni: reaksi (*reaction*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behavior*) dan terakhir level empat yakni hasil (*result*).

a) *Reaction*

Apa yang dirasakan peserta tentang pelatihan tersebut atau apakah peserta menyukai proses pelatihan tersebut? Evaluasi reaksi ini sama halnya dengan mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan. Komponen-komponen yang termasuk dalam level reaksi ini yang merupakan acuan untuk dijadikan ukuran.

b) *Learning*

Apa yang dipelajari oleh peserta, hasilnya adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta perubahan tingkah laku. Pada level evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan, dan juga dapat mengetahui dampak dari program pelatihan yang diikuti para peserta dalam hal peningkatan *knowledge*,

skill, dan *attitude* mengenai suatu hal yang dipelajari dalam pelatihan. Pandangan yang sama menurut Kirkpatrick, bahwa evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari materi pelatihan. Oleh karena itu diperlukan tes guna untuk mengetahui kesungguhan apakah para peserta mengikuti dan memperhatikan materi pelatihan yang diberikan. Biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (*pre-test*) dan sesudah pelatihan atau tes akhir (*post-test*) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan.

c) *Behavior*

Perubahan kinerja setelah mengikuti pelatihan atau pengaplikasian apa yang diperoleh di pelatihan ke pekerjaan. Pada level ini, diharapkan setelah mengikuti pelatihan terjadi perubahan tingkah laku peserta (karyawan) dalam melakukan pekerjaan. Sasaran evaluasi ini juga untuk mengetahui apakah pengetahuan, keahlian dan sikap yang baru sebagai dampak dari program pelatihan, benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan di dalam perilaku kerja sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja/kompetensi di unit kerjanya masing-masing.

d) *Result*

Hasil akhir yang diperoleh karena mengikuti pelatihan. Hasil akhir tersebut meliputi, peningkatan hasil produksi dan kualitas, penurunan harga, peningkatan penjualan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Sasaran pelaksanaan program pelatihan adalah hasil yang nyata yang

akan disumbangkan kepada perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan. Walaupun tidak memberikan hasil yang nyata bagi perusahaan dalam jangka pendek, bukan berarti program pelatihan tersebut tidak berhasil. Ada kemungkinan berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan sesungguhnya hal tersebut dapat dengan segera diketahui penyebabnya, sehingga dapat pula sesegera mungkin diperbaiki.

7) Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

CIPP Evaluasi Model menurut Nana Sudjana (1989 : 246) pada garis besarnya melayani empat macam keputusan :

- a. Perencanaan keputusan yang memengaruhi pemilihan tujuan umum dan khusus.
- b. Keputusan pembentukan atau structuring, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan.
- c. Keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode dan strategi yang hendak dipilih.
- d. Keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan, jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi dan atau dihentikan secara total atas dasar kriteria yang ada

Evaluasi kontek (*contexs evaluation*), evaluasi ini menggambarkan secara jelas tentang tujuan program yang akan dicapai. Secara singkat dapat dikatakan evaluasi kontek merupakan evaluasi terhadap keadaan yang melingkupi proses pembelajaran. Keadaan yang termasuk kontek adalah yang berasal dari lingkungan yaitu kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Evaluasi konteks ditujukan untuk menilai keadaan yang sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. Jadi, evaluasi ini tidak mengharuskan lembaga pendidikan mempunyai suatu kurikulum baru terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan evaluasi. Tujuan evaluasi kontek yang utama ialah untuk mengetahui kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan ini, evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Dalam melakukan evaluasi, evaluator harus dapat menemukan kebutuhan yang diperlukan evaluasi.

Evaluasi konteks terlihat perbedaan antara model CIPP dengan model-model evaluasi yang lain. Model lain dimulai adanya suatu inovasi yang sedang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan, yang kemudian dijadikan evaluasi bagi suatu evaluasi.

Evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi masukan membutuhkan evaluator yang memiliki pengetahuan luas dan berbagai ketrampilan tentang berbagai kemungkinan sumber dan strategi yang akan digunakan mencapai tujuan program. Pengetahuan tersebut bukan hanya tentang evaluasi saja tapi dalam efektifitas program dan pengetahuan dalam pengeluaran program yang akan dicapai. Dapat dikatakan evaluasi masukan merupakan evaluasi sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut.

Penilaian masukan boleh mempertimbangkan sumber tertentu apabila sumber tersebut tidak tersedia dan terdapat alternative yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Meliputi pertimbangan tentang sumber dan strategi yang akan digunakan dalam upaya mencapai suatu program. Informasi yang terkumpul selama tahap evaluasi hendaknya dapat digunakan oleh evaluator untuk menentukan sumber dan strategi analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan program yang didalam keterbatasan dan hambatan yang ada.

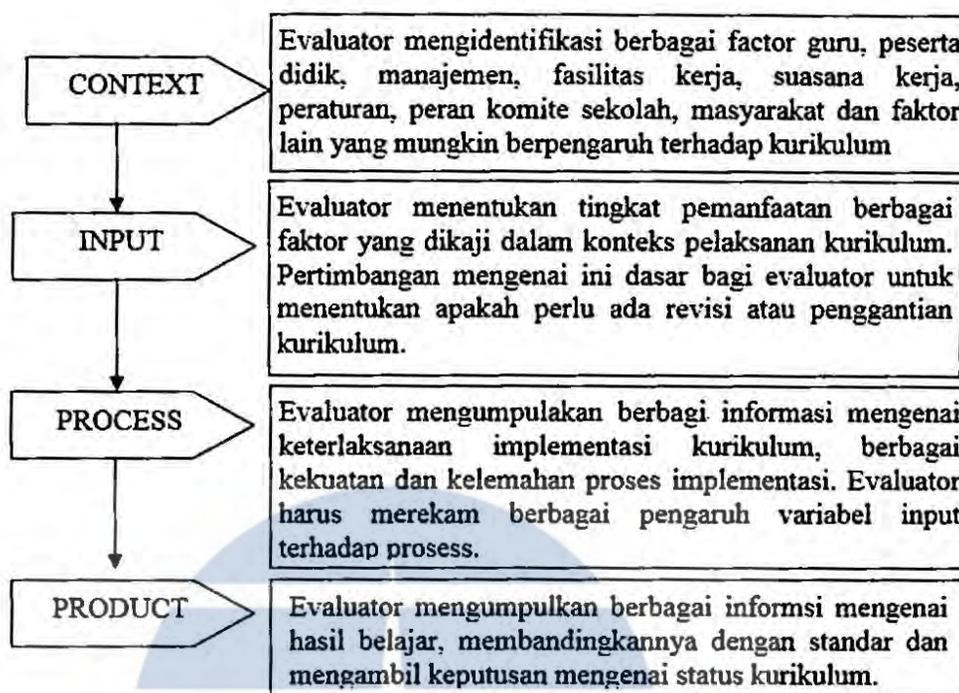
Evaluasi ini adalah penting untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi masukan tidak hanya melihat apa yang ada dilingkungan lembaga tersebut (baik material maupun personal) tetapi juga harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi diwaktu mendatang ketika inovasi kurikulum implementasikan. Evaluator diharapkan dapat menentukan tingkat pemanfaatan factor-faktor yang diidentifikasi dalam pelaksanaan inovasi kurikulum.

Evaluasi proses (*process evaluation*), suatu program yang baik tentu sudah dirancang mengenai kegiatan dan kapan kegiatan tersebut sudah terlaksana. Tujuannya adalah membantu agar lebih mudah mengetahui kelemahan program dari berbagai aspek untuk kemudian dapat dengan mudah melakukan perbaikan didalam proses pelaksanaan program. Dapat dikatakan evaluasi proses merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal bahan dalam kegiatan nyata lapangan. Meliputi evaluasi yang telah dirancang dan diterapkan didalam proses seorang penilaian proses mungkin sebagai pemonitor system pengumpulan data dari pelaksanaan program. Pemonitor harus mempunyai catatan dan perkembangan setiap langkah dalam pelaksanaan program. Tanpa mengetahui catatan tentang data pelaksanaan program tidaklah mungkin pengambil keputusan menentukan tindak lanjut program apabila waktunya berakhir. Catatan tersebut akan berguna dalam menentukan kelemahan dan kekuatan atau factor pendukung serta penghambat program. Evaluasi ini bertujuan memperbaiki keadaan yang ada. Evaluator diminta untuk menentukan sampai sejauh mana rencana inovasi kurikulum dilaksanakan dilapangan serta hambatan yang ditemui.

Evaluasi hasil (*product evaluation*), evaluasi hasil ini merupakan tahap terakhir yaitu evaluasi terhadap berhasil tidaknya peserta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah membantu penanggungjawab program dalam mengambil keputusan, memodifikasi atau menghentikan program. Evaluasi ini dilakukan oleh penilai didalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dikembangkan dan diadministrasikan. Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah program diteruskan, dihentikan atau dimodifikasi.

Evaluasi hasil memerlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, data observasi dan diagram data, yang masing-masing dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan yang lebih rinci. Evaluasi hasil didasarkan pada kategori hasil belajar. Tujuan utama dari evaluasi hasil ialah untuk menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Diharapkan hasil evaluasi ini memperlihatkan pengaruh program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengaruh inovasi kurikulum tersebut yang bersifat positif (biasanya evaluasi hasil hanya melihat pengaruh dari sudut pandang positif ini) maupun negatif. Evaluasi hasil ini diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi.

Kekuatan dari model ini terletak dari rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi itu. Keempat tugas evaluator itu seperti tampak pada gambar 1 dibawah ini :



Gambar 2.1

Sumber : Stufflebeam

Stufflebeam dalam Eko Putro Widoyoko (1993: 118) mengungkapkan bahwa, *“the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.”* Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting dari evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Kelebihan dan Kelemahan Evaluasi Model CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*) menurut Daniel Stufflebeam (2003 : 58)

Didalam evaluasi model CIPP mempunyai kelebihan yaitu :

- Memiliki pendekatan yang holistic dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya.
- Memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif sehingga sama baiknya dalam melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberi informasi final
- Lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi.

- d. Mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya.

Kelemahan Evaluasi Model CIPP yaitu :

- a. Terlalu mementingkan dimana proses seharusnya dari pada kenyataan dilapangan.
- b. Terlalu topdown dengan sifat manajerial dalam pendekataannya.
- c. Cenderung fokus pada rational management dari pada mengakui kompleksitas realitas empiris.

Model Evaluasi CIPP dikaitkan dengan pelaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan BKDD Kabupaten Nunukan tahun 2015 pada penyelenggaraan Diklat Pim III, mengacu pada ketentuan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, yang didalamnya mengatur hal-hal mengenai kurikulum, proses pembelajaran, pengajar, mentor, fasilitas, dan penganggaran sampai evaluasi pasca diklat itu sendiri, dari beberapa konsep evaluasi program sebagaimana teori di atas, peneliti menganggap model CIPP yang relevan dan representatif dalam evaluasi pelaksanaan Diklat Pim III, dengan alasan-alasan diantaranya :

- a. Model CIPP bersifat lebih konferehensif dan mewakili keseluruhan hal yang akan dibahas dalam pelaksanaan Diklat Pim III, baik pra diklat maupun pasca diklat.
- b. Bahwa penulis berkeinginan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Diklat Pim III ini secara berkelanjutan, dan model CIPP dianggap lebih mampu mengakomodir hal tersebut dibandingkan dengan model lainnya
- c. Sebagaimana tertuang dalam Perka LAN bahwa dalam pelaksanaan Diklat Pim Pola baru diwajibkan bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi pasca diklat, dengan demikian model CIPP yang mewakili model evaluasi dibanding model evaluasi lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul dan Kajian Teori tersebut diatas, memiliki beberapa penemuan empiris melalui kajian beberapa Literatur sehubungan dengan evaluasi pendidikan dan pelatihan pimpinan di beberapa daerah di Indonesia, didapati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penelitian oleh Sudjarwo 2008 yang berjudul "evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV pada balai diklat keagamaan semarang" pada Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, menyimpulkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang sebagai penyedia layanan (*Provider*) di bidang kediklatan di lingkungan Departemen Agama di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengambil langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang dalam mewujudkan sasaran-sasaran program pendidikan dan pelatihan yaitu untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang berkemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Masalah yang dianalisis adalah tentang pelayanan akademik Diklatpim Tingkat IV dikaji dari indikator input pelayanan, indikator proses pelayanan, dan output pelayanan. Masing-masing diperbandingkan antara kinerja standarnya dengan kinerja realisasinya. Pertama, perbandingan antara kinerja standar input dengan standar realisasi input. Dari hasil perbandingan tersebut ditemukan beberapa informasi aspek-aspek yang berkinerja kurang atau rendah, yaitu kinerja kelas 62,35 % dan kinerja seleksi peserta 10%. Kedua, perbandingan antara kinerja standar proses dengan kinerja realisasi proses. Dari hasil perbandingan tersebut ditemukan informasi aspek yang berkinerja terendah

pada kinerja proses adalah pada unsur penyelenggaraan aspek persiapan dengan nilai rata-rata terendah 70 (Sedang). Ketiga, perbandingan antara kinerja output standar dengan kinerja output realisasi. Dari hasil perbandingan tersebut diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata terendah 72,52 (Sedang) pada item kepemimpinan pada aspek sikap dan Perilaku. Dan pada aspek akademik/penguasaan materi nilai rata-rata terendah adalah 75,28 (baik) pada item ujian akhir. Hasil evaluasi kinerja kebijakan sebagai pengembangan, dengan fokus sasaran pada kinerja outcomes, diperoleh informasi bahwa pada umumnya atasan langsung alumni menyatakan bahwa setelah mengikuti Diklatpim Pola pikir dan Cara Kerja mereka Bagus. Adapun sebagian besar capaian kinerja Perilaku Kerja adalah Kurang Bagus. Secara garis besar laporan penelitian ini mengungkapkan makna dibalik status kinerja pelayanan akademik dan makna dibalik kinerja yang masih rendah.

- 2) Tesis Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Aparatur Di Kabupaten Berau yang ditulis oleh Nurseha 2015 menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Diklat Pim IV, diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Reaksi/tanggapan peserta diklat terhadap tingkat kepuasan peserta terkait penyelenggaraan pelatihan dapat disimpulkan bahwa kepuasan peserta terhadap aspek sarana dan prasarana secara keseluruhan sudah cukup baik, namun belum optimal dan belum lengkap. Terkait layanan sekretariat secara keseluruhan dianggap baik namun dari segi jumlah petugas khususnya directing class masih kurang sehingga perlu

penambahan pegawai. Penyelenggara diklat perlu mengikuti Diklat teknis seperti TOC dan MOT agar pengelolaan diklat lebih optimal dan dikelola secara profesional. Tanggapan tentang Widyaiswara menunjukkan respon yang cukup baik namun masih perlu peningkatan kualitas terutama lebih berinovasi dan kreatif dalam memberikan materi serta tidak monoton.

- b. Keberhasilan pembelajaran peserta dinilai baik, dari segi penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang didapatkan peserta dianggap bermanfaat bagi mereka dan sebagian dapat diaplikasikan ditempat kerja.
- c. Gambaran secara umum tentang perubahan perilaku peserta diklat yang diukur berdasarkan rencana tindak atau action plan yang dapat diimplementasikan diinstansinya. Seperti adanya perubahan dalam hal disiplin kerja meningkat, pola kerja tersruktur, penyelesaian pekerjaan lebih cepat, sistematis dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya.
- d. Dampak hasil kerja peserta diklat berdasarkan hasil wawancara dengan atasan langsung peserta secara keseluruhan menyatakan bahwa ada peningkatan kinerja.

3) Bulletin Kepegawaian, Vol. 3 No. 1 Maret 2009, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN), Yogyakarta, dinyatakan bahwa penelitian atau evaluasi Diklatpim yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara/LAN (2006), Urip Rudi Subiyantoro (2006) dan Bandikat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2005) paling tidak memberikan gambaran-gambaran: (a) adanya

respon negatif atau pesimisme dari atasan, bawahan serta para alumni sendiri terhadap peningkatan kinerja ideal dan perubahan perilaku dari pejabat-pejabat yang telah mengikuti Diklatpim; (b) pemanfaatan pengetahuan yang diperoleh alumni Diklatpim belum dapat diwujudkan dengan optimal di lingkungan organisasinya; (c) pemanfaatan dalam konteks pengembangan karir alumni Diklatpim juga belum jelas. Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim belum tentu dapat menduduki atau dipromosikan dalam jabatan struktural.

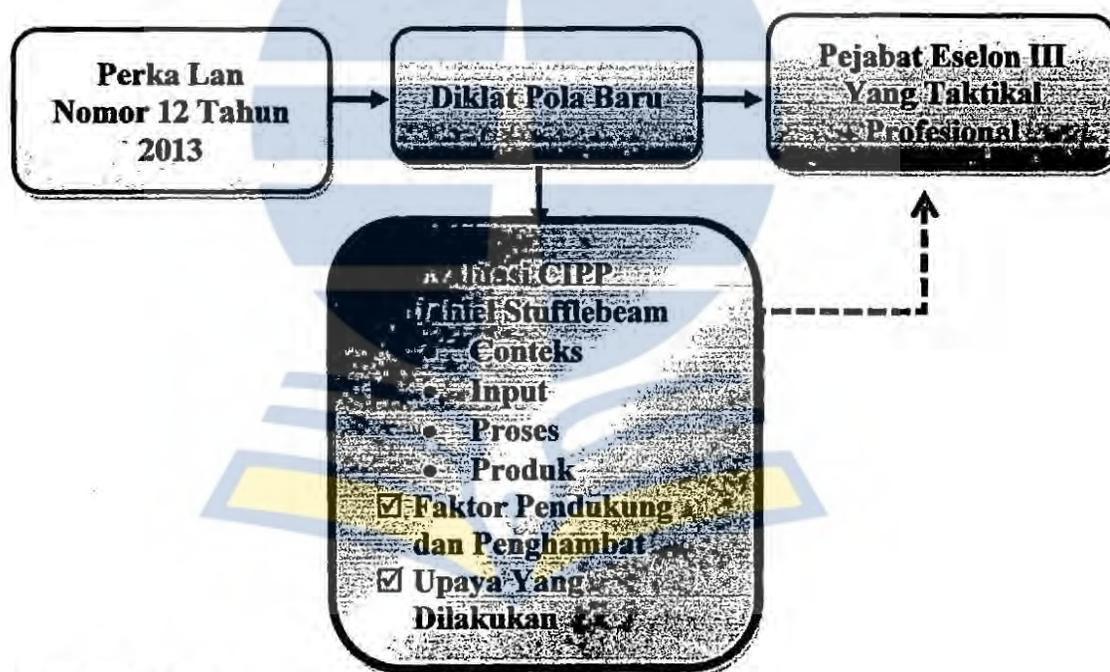
Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan teori Daniel Stufflebeam (model evaluasi *CIPP*), yaitu *Context, Input, Process dan Product*, dengan melihat sejauh mana teori ini bisa mengevaluasi program kegiatan Diklatpim Tk. III yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Apakah dapat diaplikasikan dan dibuktikan bahwa teori ini dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam mengevaluasi suatu program diklat khususnya di Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaan lain dengan penelitian terdahulu yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa penyelenggaraan Diklat Pim Tingkat III dengan pola baru di Kabupaten Nunukan, memberikan gambaran dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan serta dapat mendiskripsikan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan dengan menggunakan teori Daniel

Stufflebeam (model evaluasi CIPP), yaitu *Context, Input, Process dan Product*. Dan yang lebih penting dari itu, bahwa evaluasi CIPP ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan Diklat Pim III berikutnya.

C. Kerangka Fikir

Beberapa konsep evaluasi program sebagaimana dijelaskan di atas, jika dilihat dari isi dan penjelasan PERKA LAN Nomor 12 Tahun 2013 maka model yang paling sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan program Diklat Pim III secara kualitatif – deskriptif model CIPP yang digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Elaborasi

Gambar 2. Kerangka fikir Model Evaluasi Diklat Pim Tingkat III

D. Operasional Konsep

Mencermati Perka LAN nomor 11 Tahun 2013 tersebut, jika dihubungkan dengan empat komponen model evaluasi CIPP, maka penelitian ini menjelaskan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1) *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks). Dalam evaluasi konteks ini, arah evaluasi difokuskan kepada:

- menilai landasan dan tujuan program Diklatpim III yang didukung oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan tentang Diklatpim III
- Kelayakan instansi penyelenggara dalam melaksanakan program Diklatpim.

2) *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan). Pada tahapan ini evaluasi dilakukan dengan menilai rancangan program pelatihan dengan melihat:

- Karakteristik peserta Diklat,
- Keadaan Widyaiswara (rasio jumlah Widyaiswara dengan kebutuhan Diklat, kualifikasi akademik Widyaiswara, kesesuaian kompetensi dengan bidang yang diajarkan)
- Ketersediaan kurikulum, perangkat pembelajaran Diklat serta pedoman penyelenggaraan Diklatpim III,
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan program.

3) *Process Evaluation* (Evaluasi Proses). Evaluasi proses pada program Diklatpim III merupakan tahapan menilai implementasi program dengan melihat ketetapan dimensi instruksional dan institusi dalam membahas seluruh materi program Diklatpim III. Komponen evaluasi proses ini menilai :

- sejauh mana kesesuaian antara kurikulum dan jadwal, kompetensi mengajar Widyaiswara serta proses belajar di kelas yang meliputi: sistematika penyajian dari Widyaiswara, kemampuan menyajikan,

penggunaan metode, penggunaan alat dan media diklat serta performansi Widyaiswara.

- Se jauh mana kesiapan *Mentor* yang mendampingi reformer dan seberapa besar mensupport *reformer* mengeksekusi proyek perubahannya.
 - Seberapa besar *Coach* memberi arahan dan bimbingan kepada reformer sehingga menghasilkan laporan proyek perubahan yang baik dan benar
 - Bagaimana reformer mengikuti secara keseluruhan tahapan proses penyelenggaraan diklat pim III sehingga menghasilkan proyek perubahan.
- 4) *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil). Pada evaluasi produk penilaian hasil program Diklatpim III berupa evaluasi keseluruhan dilihat dari dua aspek yakni :
- pertama, aspek kinerja penyelenggara, bahwa pelaksana evaluasi menganut falsafah integritas, kewibawaan dan reputasi lembaga perlu dijaga dan ditegakkan.
 - Kedua adalah peserta diklat/reformer dalam hal ini mengevaluasi laboratorium kepemimpinan dalam bentuk proyek perubahan yang dilakukan oleh reformer selama melakukan breakthrough II. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap hasil proyek perubahan yang diimplementasikan oleh reformer secara berkelanjutan yang dilakukan di SKPD masing-masing.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Fokus masalah dan tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan secara mendalam bagaimana evaluasi penyelenggaraan Diklat Pim III berdasarkan PERKA LAN Nomor 12 tahun 2013 di Kabupaten Nunukan, untuk mendapatkan sumber data dalam rangka menjawab rumusan masalah pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang fokus terhadap manajemen Konteks, Input, proses, dan output untuk mencapai efektifitas menciptakan pemimpin perubahan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan pendekatan evaluasi program CIPP. Menurut Wirawan, studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang banyak digunakan dalam evaluasi program. Robert K.Yin menyatakan studi kasus merupakan cerita mengenai sesuatu yang unik, khusus, menarik. Cerita tersebut dapat mengenai individu-individu, proses, program-program, institusi-institusi, dan bahkan kejadian-kejadian. Istilah kasus menunjukkan topik atau unit analisis yang dipilih untuk dipelajari.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan bagaimana aturan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 diselenggarakan, menelaah dokumen-dokumen yang menyertainya, memperhatikan, memeriksa sebab-sebabnya, fakta-faktanya dan sejauh mana proses penyelenggaraan ini berlangsung. Penelitian dengan sifat tersebut, dipertimbangan bahwa hasilnya nanti akan melahirkan analisis mengenai keterkaitan terhadap berbagai kelemahan (keterbatasan),

kekuatan, kesesuaian, dan ketidaktepatan antar konteks, input, proses dan output yang dihasilkan, sehingga tingkat deskriptif sudah memungkinkan untuk menemukan tujuan penelitian. Hal tersebut dinyatakan oleh Sutopo (2002:114) bahwa kalau kecenderungannya untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari beragam unsur (unit/variabel) yang terlibat dengan analisis keberkaitan yang mengarah pada berbagai kelemahan, kekuatan, kesesuaian, dan ketidaktepatan antar unitnya, maka kebanyakan penelitian ini menggunakan tingkat penelitian deskriptif saja yang dipandang sudah cukup memadai dan bisa menemukan tujuannya.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan yang terletak di jalan Pangeran Antasari Kelurahan Nunukan Tengah. Yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- Kebijakan terkait penyelenggaraan Diklat Pim III sesuai Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 tersebut dan petunjuk teknis lainnya.
- Evaluasi manajemen terkait konteks, input, proses dan output dalam penyelenggaraan Diklat Pim III sesuai Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 bagaimana program-program yang dilakukan, sejauhmana komitmen pemerintah dalam melaksanakannya, dan bagaimana efektifitasnya dan hasil yang ditunjukkan terhadap pencapaian pemimpin perubahan serta apa saja hambatannya dan bagaimana mengatasinya. Terkait hal tersebut, akan dilakukan cek dan ricek serta perbandingan dengan beberapa pejabat yang terlibat dari PKP2A III LAN Samarinda.

Sedangkan Informan terdiri dari :

1) Bagian Internal Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten

Nunukan yang direncanakan terdiri atas:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
- b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- c. Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Karier
- d. Panitia Diklat Pim III

2) Bagian Eksternal BKDD, diantaranya :

- a. Beberapa Widyaswara
- b. Beberapa Mentor
- c. Beberapa Coach
- d. Beberapa Alumni Peserta Diklat Pim III (Reformer)

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis akan melakukannya dengan terlebih dahulu mengambil data dari :

- Mencari data dari laporan-laporan yang ada pada BKDD Kabupaten Nunukan, kemudian menelaah dokumen tersebut.
- Selanjutnya melakukan wawancara melalui informan dari pihak yang berwenang mulai dari bawahan sampai pimpinan.

Ada pun instrument dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya :

1) Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman Telaah Dokumen berisi daftar nama dokumen yang direncanakan akan dikumpulkan oleh peneliti. Seperti halnya pedoman observasi, daftar dokumen juga bisa bertambah atau berkurang atau berubah selama proses pengambilan data.

2) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang mengacu pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini hanya sebagai panduan umum dan divariasikan sesuai respon dari informan.

D. Prosedur Pengolahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin Bungin Burhan (2008 : 82) mengajukan empat criteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Diantaranya adalah Keabsahan Konstruk (*Construct validity*) yang bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Namun yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Di mana penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, yaitu metode wawancara dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode telaah dokumen pada saat wawancara dilakukan.

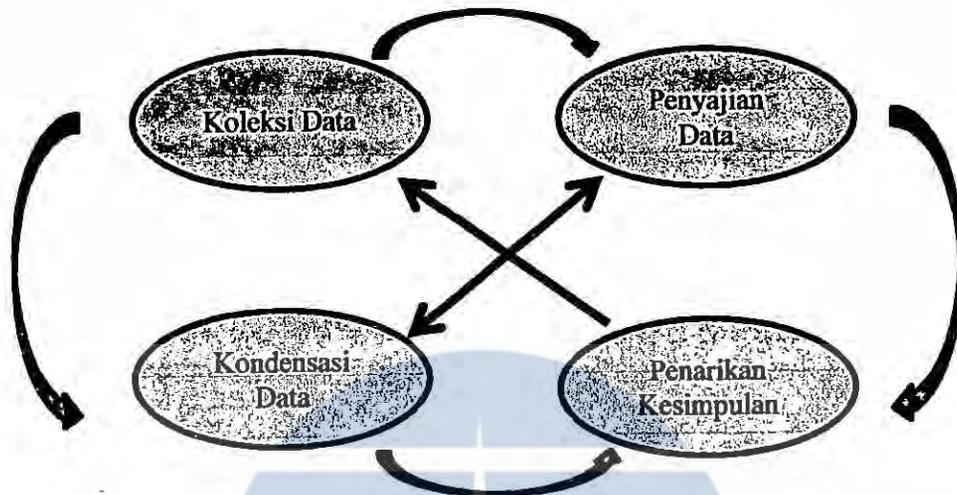
E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Bungin Burhan (2008 : 78) “prosedur pengolahan data adalah juga metode analisis data, sehingga proses pengumpulan data juga adalah proses analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan, maka sesungguhnya peneliti sudah menganalisis datanya”.

Sedangkan Rumusan Miles & Huberman dalam (Saldana, 2014 : 31) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

- 1) Kondensasi Data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.
- 2) Penyajian Data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk apa melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3) Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang penting, karena dari permulaan pengumpulan data seseorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan pemberi dana.

Model analisis interaktif Mile dan Huberman ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1
Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Berangkat dari asumsi itu, maka penulis menggabungkan prosedur pengolahan data dan analisis data dengan tahapan sistematisnya sebagai berikut :

a. Klasifikasi Materi Data, diantaranya adalah :

- Data sekunder dari kantor yang bersangkutan
- Gambar lokasi penelitian (meliputi susunan organisasi dan tupoksinya)
- Catatan-catatan lapangan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memberikan presepsi dan argument.
- Dokumentasi yang akan dijadikan sebagai pertanggungjawaban akan keabsahan penelitian.

b. Mengklasifikasikan berbagai gejala dan fator-faktor serta kondisi yang ada dalam penyelenggaraan Diklat Pim III ini dengan berbagai komponen yang telah ditetapkan sesuai dengan yang ada dalam kerangka fikir.

- c. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen yang ada dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pada fokus permasalahan.
- d. Mendeskripsikan secara keseluruhan dari hasil wawancara, telaahan dokumen dan beserta pedoman dari berbagai literatur dan buku yang ada, secara sistematis, dan keterkaitan yang menjadikan penelitian ini dapat dipahami dan memberikan suatu pengetahuan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Dalam hal ini berupa uraian yang memaparkan fakta-fakta di lapangan yang dianggap penting untuk memperoleh evaluasi penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan pada masing-masing konsep yaitu evaluasi terhadap input, evaluasi proses dan evaluasi produknya
- e. Setelah kaitan antara semua kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Selanjutnya memaknai hasil deskripsi data sehingga jawaban terhadap pertanyaan penelitian bisa terungkap.
- f. Dari jawaban tersebut, penulis kemudian menyimpulkan secara konferehensif penyelenggaraan Diklat, hambatan dan cara penyelesaiannya yang diharapkan menghasilkan rekomendasi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan Diklat Pim berikutnya.

BAB IV PEMBAHASAN

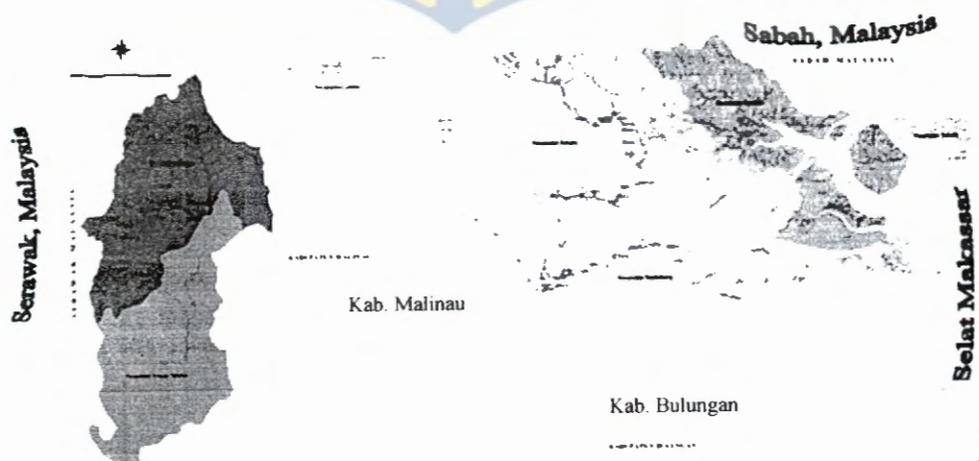
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Kabupaten Nunukan

Sebelum memaparkan dan membahas hasil penelitian, terlebih dahulu digambarkan Kabupaten Nunukan yang merupakan konteks dimana penelitian ini dilakukan. Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.263,68 km². Berdasarkan geografisnya Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30' 00" – 4° 24' 55" Lintang Utara dan 115° 22'30" – 118° 44'55" Bujur Timur. Secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur - Sabah
- Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
- Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur – Serawak

Posisi geografis Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nunukan

Dengan letak geografis tersebut merupakan potensi besar bagi daerah ini untuk menjadi pembanding aparatur Sipil negaranya dalam hubungan internasional dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga menjadi barometer tersendiri bagi pemerintah daerah mengembangkan sumber daya manusia khususnya kapasitas kepemimpinan sebagai cerminan kemajuan di wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh perbukitan, di sebelah utara memiliki perbukitan terjal dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut, perbukitan di sebelah selatan memiliki ketinggian berkisar 500 m – 1.500 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan sudut di lereng perbukitan rata-rata berkisar antara 0 - 50 %. Kabupaten Nunukan juga memiliki sekitar 10 sungai dan 25 pulau yang tersebar di seluruh kabupaten.

b. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi sebanyak pada 15 Dinas dan 11 Lembaga Teknis Daerah (LTD), dan 2 Sekretariat serta Kepala Satuan Kerja setingkat eselon III yaitu sebanyak 2 Kepala Kantor, 16 camat, dan 8 lurah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- Bupati Nunukan ;
- Wakil Bupati Nunukan ;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ;
- Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, yang dibantu oleh :

- ❖ Asisten Tata Pemerintahan, yang terbagi dalam bagian sbb :
 - Bagian Pemerintahan;
 - Bagian Hukum
 - Bagian Pertanahan;
 - ❖ Asisten Ekonomi & Pembangunan yang terbagi dalam bagian sbb :
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - Bagian Ekonomi;
 - Bagian Pembangunan;
 - ❖ Asisten Administrasi , yang terbagi dalam bagian sebagai berikut :
 - Bagian Organisasi;
 - Bagian Umum;
 - Bagian Humas dan Protokol;
- 1) Sebanyak 15 dinas, yaitu :
1. Dinas Pekerjaan Umum
 2. Dinas Perhubungan,
 3. Dinas Pendidikan,
 4. Dinas Kesehatan,
 5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan,
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,
 9. Dinas Pertambangan dan Energi,
 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
 11. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
 12. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran,
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 15. Dinas Pendapatan

- 2) Lembaga Teknis sebanyak 11, yang terdiri dari
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah,
 3. Inspektorat,
 4. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD),
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah,
 7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu,
 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah,
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 11. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- 3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI
- 4) Camat sebanyak 16 yaitu : Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Camat Sei Menggaris, Camat Sebuku, Camat Sebatik, Camat Sebatik Barat, Camat Sebatik Utara, Camat Sebatik Tengah, Camat Sebatik Timur, Camat Sembakung, Camat Lumbis, Camat Lumbis Ogong, Camat Krayan, Krayan Selatan, Camat Tulin Onsoi, Camat Sembakung Atulai;
- 5) Kantor Kelurahan sebanyak 8 yaitu : Kelurahan Nunukan Timur, Nunukan Barat, Nunukan Utara, Nunukan Tengah, Nunukan Selatan, Selisun, Tanjung Harapan Dan Mansapa, serta
- 6) Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Paragraf 2 Pasal 13 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan aparatur, dengan jumlah personil sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Pegawai BKDD berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Maret 2016

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ D-IV	D-III/ D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural								
	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	1	3	-	-	-	-	4
	Kepala Seksi	-	-	11	-	-	-	-	8
	Sub Jumlah	-	1	16	-	-	-	-	17
2	Pegawai	-	-	4	5	10	2	-	21
	Sub Jumlah	-	1	20	5	10	2	-	38
3	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Honor Lepas	-	-	4	-	19	-	5	28
	Sub Jumlah	-	-	4	-	19	-	5	28
Jumlah Total Personil BKDD									66

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan

Sedangkan jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Nunukan per 31 Maret 2016 berdasarkan kategori masing-masing, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rekap ASN Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Doktor / S3	0	1	1
2.	Pasca sarjana / S2	91	55	146
3.	Sarjana / S1	1077	907	1984
4.	D IV	60	23	83
5.	D III	174	318	492
6.	D II	113	107	220
7.	DI	16	20	36
8.	SMA	901	391	1292
9.	SMP	88	5	93
10.	SD	77	0	77
Jumlah		2597	1827	4424

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan

Tabel 4.3
Rekap ASN Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	I. A	0	0	0
2.	I. B	0	0	0
3.	II. A	1	0	1
4.	II. B	29	1	30
5.	III. A	54	5	59
6.	III. B	84	24	108
7.	IV. A	268	135	403
8.	IV. B	64	42	106
9.	V. A	0	0	0
ESELON		500	207	707
NON ESELON		2097	1620	3717
JUMLAH		2597	1827	4424

Sumber : BKDD Kab. Nunukan

Tabel 4.4
Rekap ASN Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

NO	USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	> 55	116	20	136
2.	51 - 55	234	84	318
3.	46 - 50	431	188	619
4.	41 - 45	538	285	823
5.	36 - 40	620	408	1028
6.	31 - 35	451	514	965
7.	26 - 30	177	268	445
8.	21 - 25	30	59	89
9.	< 21	0	1	1
JUMLAH		2597	1827	4424

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan

Tabel 4.5
Rekap ASN Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	IV	374	166	540
2.	III	1180	1071	2251
3.	II	4911	586	1497
4.	I	132	4	136
JUMLAH		2597	1827	4424

c. Dasar Pembentukan BKDD

1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 6

(enam) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi Ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai :

- a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil.
- b. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan.
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dari dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan. Karakteristik dari Sasaran paling tidak terdiri atas : (S.M.A.R.T) yaitu :

- Specific = Spesifik dan Jelas,
- Measurable = Dapat diukur secara Obyektif,
- Attainable = Dapat dicapai,
- Relevance = Terkait pada Hasil,
- Time Bound = Kurun waktu tertentu).

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan sebagaimana diuraikan pada tabel 4. berikut ini :

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan.

No	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya PNS yang berkualitas	1. Mewujudkan PNS yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan produktif dalam melaksanakan tugas 2. Meningkatkan Disiplin PNS
2.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Prima	1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian 2. Tersedianya Sistem Informasi kepegawaian yang handal

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator-indikator dari masing-masing sasaran tersebut, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
 Sasaran dan Indikator Jangka Menengah
 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan

No	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan PNS yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan produktif dalam melaksanakan tugas	1. Persentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan (CPNS & PNS) 2. Persentase Aparatur luluhan S1/S2/S3 Terhadap jumlah apartur
2.	Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Jumlah Pegawai yang mendapat <i>reward</i> 2. Jumlah Pegawai yang terkena <i>punishment</i>
3.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase Terpenuhinya kebutuhan PNS 2. Persentase penyerahan SK pegawai tepat waktu 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
4.	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian yang Handal	1. Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 2. Jumlah Pengunjung <i>website bkd-nunukan.com</i> 3. Persentase DUK yang diterbitkan tepat waktu

2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang membawahi 3 (tiga) subbagian sebagai berikut :

- 1) Sub.Bagian Perencanaan Program
 - 2) Sub.Bagian Umum
 - 3) Sub.Bagian Keuangan
- c. Bidang Informasi Kepegawaian :
- 1) Sub.Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
 - 2) Sub.Bidang Informasi dan Dokumentasi
- d. Bidang Mutasi Pegawai :
- 1) Sub.Bidang Mutasi Struktural
 - 2) Sub.Bidang Mutasi Fungsional
- e. Bidang Pengembangan Dan Kedudukan Hukum Pegawai :
- 1) Sub.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai
 - 2) Sub.Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Sub.Bidang Diklat Kepemimpinan dan Karier
 - 2) Sub.Bidang Diklat Fungsional & Prajabatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi terlampir pada lampiran nomor 1.

3. Visi Dan Misi BKDD

Visi BKDD Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi daripada Kabupaten Nunukan yang secara dimensional pernyataan Visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Dalam upaya mewujudkan Misi 1 Pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 tersebut maka Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk lima tahun ke depan (2011-2016) yaitu :

“Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik”.

Visi tersebut dapat dijelaskan dimana Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dapat diartikan memiliki kompetensi dibidangnya, dalam pengabdianya mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keilmuan, memiliki integritas dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan berorientasi pada prestasi kerja, sehingga dengan meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabupaten dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggungjawab serta profesional mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pelayanan umum yang berkualitas tinggi serta dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik).

Mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil

Penjelasan :

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal dan efisiensi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sehingga dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat optimal.

b. Meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian dimana dengan akan diterapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) berbasis website dapat memberikan kepuasan dan kemudahan mendapatkan pelayanan dan informasi kepada *customer* (Pegawai Kabupaten Nunukan) dalam bidang kepegawaian dan diklat daerah.

B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan

Penelitian ini berfokus pada evaluasi penyelenggaraan diklat Pim III studi Perka Lan Nomor 12 tahun 2013, dimana konsepnya menggunakan model evaluasi CIPP yang dipopulerkan oleh Stuppelman yang terdiri dari :

- Konteks
- Input
- Proses
- Produk/Hasil

Penyelenggaraan diklat pim pola baru ini, pada hakekatnya LAN berkeinginan membuat kebijakan dengan cara meningkatkan kapasitas aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola konflik yang terjadi sebagai akibat perubahan, dan memastikan perubahan berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Pemimpin instansi dari peserta memberi otorisasi kepada peserta untuk menjual gagasan perubahan kepada stakeholder yang ada di instansinya. Menjadikan gagasan perubahan menjadi milik bersama. Menempatkan peserta diklat dalam leadership laboratory, peserta mengelola proses perubahan yang

sesungguhnya dibawah bimbingan mentor, coach, dan counselor. Melibatkan pimpinan masing-masing instansi pengirim dalam proses pembelajaran; Apresiasi dan kepemilikan; sehingga peran pemimpin instansi untuk ikut bertanggung jawab menyiapkan calon pemimpin.

Akhir dari serangkaian yang ingin dicapai dari penyelenggaraan melalui keikutsertaan Diklatpim Tk.III, maka diharapkan diakhir pembelajaran diklat, dapat diketahui kualitas dan kapasitas kepemimpinannya sebagai agen perubahan, yang diindikasikan dengan kemampuan dalam:

- 1) Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung-jawab dalam memimpin unit instansinya;
- 2) Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;
- 3) Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program;
- 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya, guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien;
- 5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk komitmen dan sesuai dengan tupoksi dan visi misinya dalam mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nunukan, BKDD dalam pencapaian tujuan kediklatan

maka seluruh stakeholder yang terlibat saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri, karena itu keberhasilan tersebut adalah rangkaian keterkaitan antara penyelenggara, peserta, widyaiswara, mentor, coach serta faktor pendukung lainnya. Untuk menilai sejauhmana tingkat keberhasilan, apa yang perlu dibenahi dan dikembangkan dalam pelaksanaan berikutnya, penelitian dalam bentuk evaluasi ini, dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

A. Evaluasi terhadap Konteks penyelenggaraan diklat Pim III

Sebagaimana yang dipaparkan pada konseptual bahwa yang dimaksud evaluasi konteks adalah terkait dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan, serta kelayakan penyelenggara. Sebagaimana termuat dalam perka LAN Nomor 12 tahun 2013, tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Dijelaskan pula bahwa Bab IV bahwa perencanaan pelaksanaan Diklatpim Tingkat III dilakukan apabila calon peserta Diklat telah menduduki jabatan struktural eselon III dan ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila belum menduduki jabatan struktural eselon III, maka calon peserta telah masuk dalam perencanaan pola karir yang diindikasikan dengan adanya rekomendasi untuk menduduki jabatan struktural eselon III.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks pelaksanaan diklat Pim III, dijelaskan oleh Kepala BKDD Kabupaten Nunukan Drs. Syafaruddin :

“Perencanaan awal Pemerintah Kabupaten Nunukan berkeinginan Melaksanakan diklat Pim Tingkat III sebanyak 1 Kelas/Angkatan. Pada Tahun Anggaran 2015 didasari hasil inventarisir terhadap Pejabat Eselon III yang telah menduduki jabatan secara definitif berjumlah 40 (empat

puluh) orang, namun belum mengikuti Diklat Pim Tingkat III. Persyaratan bagi Pejabat Eselon III sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pasal 7 ayat 1 (satu) berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diajukanlah permohonan untuk mengadakan Diklat Pim III di Kabupaten Nunukan”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kabid Pendidikan Dan Pelatihan,

bahwa:

“ketika kami menginventarisir jumlah pegawai yang telah menduduki eselon III di tahun 2015, pas berjumlah 40 orang, dan ketika kami sampaikan kepala pak Kaban, beliau mencoba berkoordinasi dengan sekretaris daerah untuk melaksanakan diklat pim III di Nunukan. Ketika dikonfirmasi, pak Sekda setuju, kemudian kami mulai menyusun rencana selanjutnya terkait anggaran dan mekanisme penyelenggaraannya”.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis kemudian menelaah dokumen terkait jumlah dan nama peserta yang akan mengikuti Diklat Pim III. Dari dokumen yang ada, semua peserta pada dasarnya telah menduduki eselon III. Adapun nama-nama peserta terlampir pada lampiran 2.

Selain sasaran dan tujuan sebagaimana penjelasan diatas, dalam konteks penyelenggaraan diklat Pim III pada Bab VII Perka Lan Nomor 12 Tahun 2013 dikatakan bahwa Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, sementara BKDD Kabupaten Nunukan belum mendapatkan predikat tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKDD Kabupaten Nunukan menjelaskan :

“kami menyadari bahwa BKDD Kabupaten Nunukan sebagai SKPD yang menangani Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan belum terakreditasi, karena itu Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui BKDD mengajukan Permohonan

melalui Surat Bupati Nunukan kepada Kepala LAN RI. Ini kami lakukan untuk mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat III di Kabupaten Nunukan dengan bekerjasama dengan lembaga diklat yang terakreditasi dan direkomendasikan oleh LAN RI sebagai penjamin mutu. Ini kami usahakan dalam rangka efisiensi anggaran, karena apabila Penyelenggaraan Diklat Pim nya di Kabupaten Nunukan bisa lebih mudah dan murah jika dibandingkan harus melakukan pengiriman peserta dengan pola kontribusi ke luar Kabupaten Nunukan dengan sistem on – off campus. Dan ijin prinsip itu telah kita ajukan secara intensif dan alhamdulillah, Kepala LAN RI menyetujui permohonan kami.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis kemudian berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut kepada Kepala PKP2A III LAN sebagai penjamin mutu penyelenggara. Dari hasil wawancara Bapak Mariman menjelaskan :

“begini, sebelum kita bercerita lanjut, saya ingin jelaskan tentang diklat pim pola baru. Selama ini tidak pernah kita mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan diklat mulai dari tahun 1957 sampai sekarang dan setelah di evaluasi dibandingkan dengan data terlihat gamblang, kenapa korupsi masih tinggi, apa kontribusi peserta diklat yang telah dilakukan dengan kondisi perubahan dilingkungan masing masing tidak ada, dan di internal pengelolaan diklat muncul banyak persoalan (mencari untung). Di bandingkan dengan konsep pola baru yang terdiri dari integritas, wasbang, anti korupsi dan yang paling penting mengedepankan etika dalam melaksanakan tugas. Nah alasan kenapa PKP2A III Lan mau merekomendasikan dan bersedia menjadi penjamin mutu penyelenggaraan diklat Pim III dilaksanakan di nunukan ? Karena saya berangkat dari sisi makro bahwa Kalimantan itu sudah harus berubah. Salah satu kelemahan Kalimantan itu adalah Sumber Daya Manusianya, karena dari sisi SDM nya terutama aparatur, dan dari sisi lain terutama infrastruktur yang belum memadai, karena itu kondisi tersebut jangan dibuat berlarut-larut. Karena itu PKP2A III LAN Samarinda harus membina, dan memberikan kesempatan untuk mencoba memberi kesempatan. Pembinaan bukan dengan marah marah tapi pembinaan itu dengan terus mencoba sehingga dengan kemampuan dan pasilitas apa adanya melahirkan inovasi yang bisa dipakai”

Evaluasi konteks meliputi analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan program yang dilaksanakan, yang secara khusus berpengaruh pada konteks masalah yang menjadi komponen dalam program. Evaluasi konteks

menjelaskan atau menggambarkan secara jelas tentang tujuan program yang akan dicapai. Secara singkat dapat dikatakan evaluasi konteks merupakan evaluasi terhadap kebutuhan, yaitu memperkecil kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan, tujuan pemenuhan dan karakteristik individu yang menangani, menentukan prioritas kebutuhan dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan program. Menurut Gilbert Sax, evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program. Evaluasi konteks terutama berhubungan dengan intervensi yang dilakukan dalam program.

Dari berbagai informasi tersebut diatas, maka tepatlah kiranya pendapat Carl Friedrich bahwa kebijakan publik adalah suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran. Ditambahkan pula Subarsono, 2005 bahwa Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers*. Untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran, bahwa kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.

Lebih konferehensif lagi dinyatakan bahwa *Public Policy* sebagai suatu keputusan senantiasa berwawasan kehari-depan (*goal-oriented*) atau bersifat futuristis. Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan

situasi tertentu nampak sebagai masalah (*problem*), yang kemudian merupakan "*public issue*", maka *Public Policy* sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa, namun juga tidak boleh ditetapkan secara terlambat. Ada ungkapan dalam hubungan dengan pembuatan *Public Policy*, bahwa *Public Policy* itu haruslah ditetapkan dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Keinginan-keinginan dan pendapat-pendapat dalam masyarakat itu bermacam-macam, ada yang sama, ada yang berbeda, malahan ada yang bertentangan. Karena itulah Dimock menekankan definisinya sebagai "*reconciliation*" dan "*crystallization*" dari pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan tersebut.

Dari hal tersebut, penulis dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konteks penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan, aturan tidak harus kaku diterapkan. Ada sebuah kebijakan yang harus diambil terkait kondisi yang riil dan didasari efektifitas dan efisiensi terhadap sebuah kegiatan. Komitmen dalam melaksanakan pelayanan publik harus dikedepankan sepanjang tidak merusak tatanan birokrasi.

Maka sejalan dengan itu, tepatlah ketika Crawford menyatakan fungsi evaluasi adalah : untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan dan untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Bagaimana penyajian evaluasi program diidentifikasi bahwa semua bermuara pada penyediaan informasi dalam rangkaian pengambilan keputusan (*decision*) oleh *decision maker*. Artinya bahwa ketika pada akhirnya BKDD diberikan ijin prinsip, BKDD telah memberikan informasi kepada LAN RI tentang berbagai aspek ketersediaan dan kelayakan BKDD melalui presentase ke pusat. Hal ini

juga diperkuat oleh stufflebeam bahwa CIPP evaluasi harus memegang prinsip kewajaran dan keadilan, menegaskan pentingnya melibatkan dan menginformasikan semua program dari *stakeholder*.

B. Evaluasi terhadap Input penyelenggaraan diklat Pim III

Penyelenggaraan diklat Pim III pola baru dalam kategori input sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, meliputi karakteristik peserta Diklat, keadaan Widyaiswara (rasio jumlah Widyaiswara dengan kebutuhan Diklat, kualifikasi akademik Widyaiswara, kesesuaian kompetensi dengan bidang yang diajarkan), ketersediaan kurikulum, sarana dan prasarana penyelenggaraan program. Hal-hal tersebut dalam evaluasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Karakteristik Peserta Diklat

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik peserta, berdasarkan data dari BKDD Kabupaten Nunukan yang mengikuti Diklat Pim III tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel : 4.8
Keadaan Peserta Berdasarkan Umur

No.	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	30 – 40	7	4	11
2	40- 50	19	6	25
3	< 50	4	0	4

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan

Tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdapat 4 orang peserta diklat yang telah memasuki masa usia pensiun (BUP). Hal ini menurut penulis tentu menimbulkan inefisiensi, dan tidak ideal

sehingga terkesan sarat dengan kepentingan tertentu. Dan ketika ditanyakan kepada kepala BKDD Kabupaten Nunukan, beliau menjelaskan bahwa :

“untuk saya pribadi saya selalu menggaris bawahi bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan eselon III, dan jika dikaitkan dengan PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus diklat pim sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Sehingga menurut saya adalah kewajiban BKDD untuk mengikutsertakan siapapun bagi pejabat yang telah dilantik untuk mendiklatkan dalam jabatan seperti Diklat Pim Tk. III. Disamping itu juga menindaklanjuti hasil temuan dari Auditor Kepegawaian, bahwa di beberapa SKPD terdapat Pejabat Eselon IV maupun III yang belum Diklat Pim, sehingga kami tidak membedakan apakah Pejabat tersebut memasuki BUP atau tidak. Dengan demikian, pejabat eselon III yang memasuki BUP, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat Pim III sebagai bentuk apresiasi dan rasa kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada yang bersangkutan atas pengabdianya selama sekian tahun dengan masa kerja yang cukup lama”.

Namun hal ini berbeda pandangan dengan Kepala PKP2A LAN III Samarinda, bahwa:

“Ini untuk kesekian kalinya saya jelaskan, bahwa kita boleh apresiasi dan sebagai rasa kemanusiaan. Namun apresiasi itu dapat dilakukan dengan pilihan lain, misalnya dengan pemberian skill melalui pilihannya untuk diklat teknis fungsional sebagai persiapan diri (post power syndrom) biar tidak terjadi gejala, seperti diklat pra pensiun. Harapannya ini bisa dijadikan sebagai kerangka kebijakan bersama, karena LAN tidak bisa sendiri, jika bisa daerah harus ikut menyikapi ini dengan benar dan ukuran yang standar. Konsep ideal dalam pandangan saya untuk karakteristik batas usia yang akan mengikuti diklat Pim III adalah 50 tahun, hal ini didasari batasan usia manusia produktif adalah 50 Tahun dan ini ilmiah serta untuk kepentingan organisasi lebih panjang. Disamping itu dalam hal pertimbangan penggunaan anggaran, ini akan inefisiensi dan saya tidak lepas tangan sebagai penyelenggara saya bertanggungjawab terhadap hal itu. Terus terang kami sering kecolongan dari banyak daerah terkait dengan BUP ini. Jadi kedepan kita sepakat agar yang BUP yang boleh ikut Diklat Pim di daerah 50 tahun saja”.

Dari hasil wawancara terhadap 2 (dua) nara sumber tersebut diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan Peserta Diklat yang akan

diikutsertakan dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan ke depannya BKDD harus memperhatikan karakteristik peserta tidak terkecuali terkait BUP. Bagi penulis, melihat tahapan diklat pim III yang membutuhkan mental dan kekuatan fisik serta stamina yang prima, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BKDD Kabupaten Nunukan agar selalu berorientasi pada jangka panjang, dan bisa mengubah pola pikir yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Jones, bahwa kebijakan publik adalah suatu kelanjutan kegiatan pemerintah dimasa lampau dengan mengubah sedikit demi sedikit.

- 2) Sesuai data hasil wawancara Kabid diklat BKDD dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen kepegawaian BKDD, berupa data calon peserta diklat maupun data-data alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III serta data administrasi lainnya, ditemukan hal-hal yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya dan belum sesuai ketentuan PP 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 antara lain :
 - a) Pejabat struktural Eselon III yang telah menduduki jabatan setelah dilantik dari jabatannya dan belum didiklatkan padahal sudah melewati 12 bulan masa pelantikannya. Sesuai PP 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS yang akan/telah menduduki jabatan struktural eselon wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Di Kabupaten Nunukan, peserta yang mengikuti Diklatpim Tk. III adalah pejabat yang telah menduduki jabatan eselon III. Berdasarkan data dari Bidang Diklat BKDD Kabupaten Nunukan bahwa

untuk eselon III data yang belum melaksanakan diklat pim sudah tidak ada lagi, sehingga bagi penulis, hal ini tidaklah menjadi masalah yang perlu untuk dievaluasi mengenai ideal atau tidaknya. Sebagaimana dijelaskan Kabid diklat bahwa :

“Berdasarkan hasil pendataan bagi Pejabat Eselon III yang telah menduduki Jabatan secara definitif namun belum mengikuti Diklat Pim Tingkat III terdapat 40 (empat puluh). Dan Pada Tahun 2015 Pejabat Eselon III sebanyak 40 orang tersebut telah mengikuti Diklat Pim Tingkat III dan dinyatakan Lulus, sehingga sampai dengan saat ini untuk semua Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengikuti Diklat Pim Tingkat III sebagaimana yang diwajibkan sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pasal 7 ayat 1 (satu) berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut”.

Aturan dan penjelasan tersebut dilihat dari karakteristik peserta berdasarkan eselon, dalam pandangan penulis bahwa kebijakan pemerintah kabupaten Nunukan dalam hal ini telah sesuai dan tidak menimbulkan pertentangan dalam aturan, sehingga dianggap tidak perlu dievaluasi.

- b) Persyaratan peserta Diklatpim Tk. III yang belum melampirkan sertifikat TOEFL. Dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan, dari segi persyaratan peserta yang mengikuti Diklatpim Tk. III belum sepenuhnya ditaati/dipenuhi. Dari hasil telaahan dokumen dan wawancara langsung dengan panitia penyelenggara Diklatpim III bahwa masih terdapat 2 (dua) persyaratan peserta yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan Perka LAN nomor 12 tahun 2013, yaitu 1). Pangkat /Golongan

minimal Penata Tk. I (III/d); 2). Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL.

Permasalahan pertama yang dihadapi oleh BKDD selaku penyelenggara bahwa untuk persyaratan Pangkat /Golongan minimal tersebut, sebenarnya walaupun pangkat masih III/c akan tetapi sudah menduduki jabatan struktural Eselon III maka pangkat minimal III/c tidak berlaku. Karena secara otomatis Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah dilantik wajib mengikuti dan lulus Diklatpim Tk. III, sehingga sama halnya dengan poin pertama bahwa bagi penulis hal ini jika dievaluasi sangat tergantung pada sisi yang mana mendahului, dan dianggap masih memenuhi ketentuan yang ada.

Sedangkan permasalahan peserta yang mengikuti Diklatpim III tanpa melampirkan sertifikat TOEFL disebabkan karena dalam persyaratan yang diedarkan oleh panitia penyelenggara tersebut tidak disebutkan/tidak dilampirkan tentang sertifikat TOEFL, namun pelaksanaan diklat tetap berjalan. Jawaban Kabid Diklat BKDD Kabupaten Nunukan ketika ditanya tentang persyaratan tersebut bahwa :

“idealnya memang sertifikat TOEFL menjadi persyaratan peserta sebagai lampiran sebelum melaksanakan diklat, namun karena kondisi dan waktu yang terbatas, hal tersebut bukan berarti diabaikan namun dibuatkan waktu khusus untuk melaksanakan ujian tersebut. Oleh karena itu, BKDD bekerjasama dengan Balai Bahasa Unmul Samarinda mengadakan test Toefl yang diselenggarakan di BKDD Nunukan. Kami menyadari bahwa ini kurang ideal, namun inilah upaya dan bentuk komitmen kami terhadap keinginan untuk melaksanakan semua persyaratan yang telah ditetapkan. Tentu harapannya pelaksanaan kedepan hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi polemik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada”.

Adapun contoh hasil test toefl yang diselenggarakan oleh BKDD sebagai kelengkapan persyaratan peserta dapat dilihat pada lampiran nomor 4. Mencermati hasil poin diatas, menurut penulis seharusnya sertifikat TOEFL sebagai persyaratan wajib harus dilengkapi bagi calon Peserta sebelum mengikuti Diklat Pim Tingkat III. Sebagai syarat bahwa peserta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan diklat pim, namun kenyataannya tidak di lakukan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 dimana kewajiban kelengkapan administrasi peserta yang harus dilampirkan salah satunya adalah sertifikat TOEFL dengan skor minimal 425. Hal-hal seperti ini, biasanya memang selalu menjadi kesalahan yang berulang-ulang dan tidak pernah dievaluasi sehingga penyelenggara *move on* dan tidak berusaha mengantisipasi sebelumnya.

Dalam pemeriksaan dokumen, penulis tidak menemukan persyaratan toefl tersebut menjadi bagian dari syarat pemanggilan bagi peserta yang harus dilengkapi peserta, sehingga peserta tidak menganggap itu sebagai kewajiban. Dan hal ini menjadi evaluasi BKDD Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara Diklat seharusnya dalam membuat surat Pemanggilan Peserta dan menguraikan Persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta salah satunya harus melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 425 sebagaimana yang tertuang aturan yang ada. Terkait jika BKDD Kabupaten Nunukan selaku penyelenggara Diklat ingin mengadakan Tes TOEFL bagi calon peserta diklat Pim, sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan diklat berlangsung. Tentu ini bukan hanya sekedar pencapaian proses administrasi yang baik dan benar saja, tapi lebih dari itu, aturan biasanya telah menunjukkan

tujuan-tujuan tertentu dari sebuah persyaratan. George Terry mengemukakan bahwa administrasi merupakan sebuah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakkan kepada orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- c) Mengenai Jumlah peserta dalam kelas dalam perka LAN dijelaskan bahwa maksimal 30 orang per angkatan dengan minimal 50% berasal dari instansi penyelenggara diklat yang bersangkutan. Namun berdasarkan telaahan dokumen dan data peserta sebagaimana yang ditampilkan diatas, ternyata jumlah peserta mencapai 40 orang. Mencermati hal tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala BKDD, beliau menjelaskan :

“dalam pelaksanaan diklat, baik diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan berdasarkan pengalaman batas maksimal jumlah peserta setiap angkatan atau setiap kelas adalah berjumlah 40 orang . Walaupun didalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 dimana Batas Maksimal jumlah Peserta Diklat Pim Tk. III adalah 30 orang. Dan biasanya ketika kita mengajukan calon peserta diklat ke pihak Lan, tidak ada penolakan terkait jumlah peserta”

Hal inipun didukung dengan hasil wawancara melalui telepon dengan Kabid Diklat Aparatur Kepala PKP2A LAN III di Samarinda, bahwasannya dalam pelaksanaan diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan untuk jumlah peserta dapat mengambil batas maksimal yaitu 40 orang.

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Pelaksanaan diklat Pim Tingkat III yang telah dilaksanakan berjumlah 40 orang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2015. Dengan demikian diharapkan BKDD Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggaraan diklat yang akan datang agar dapat memenuhi semua

ketentuan yang telah ditetapkan. Namun jika hal tersebut dapat menjadi syarat yang ideal, perlu kiranya untuk dilakukan revisi terhadap Perka LAN berkaitan dengan batas maksimal jumlah peserta diklat dalam 1 angkatan atau 1 kelas yang diperbolehkan. Bukankah perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda ? (1) Perubahan Rutin, dimana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi; (2) Perubahan Peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi; (3) Perubahan Inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Dan tipe kedua dapat dilakukan dalam hal ini.

d) Terkait mekanisme pencalonan dan penetapan peserta diklat Pim III, sesuai dengan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, dijelaskan aturannya sebagai berikut :

- Calon peserta Diklatpim Tk. III yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI), kemudian dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan calon peserta Diklatpim Tk. III kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi;
- Kepala Lembaga diklat Pemerintah terakreditasi menetapkan peserta Diklatpim Tk. III dalam Surat Keputusan.

Mencermati aturan tersebut diatas, BKDD Kabupaten Nunukan ternyata tidak membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi, tetapi hanya melakukan inventarisasi calon peserta melalui Data pejabat struktural yang sudah definitif dilantik yang belum mengikuti diklat pim III. Dari data yang ada tersebut selanjutnya oleh Kabid Diklat dikoordinasikan antar Bidang berkaitan dengan

status calon peserta berkaitan dengan pernah atau tidaknya mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang atau Berat, serta dengan menyusun data tersebut berdasarkan TMT Pelantikan dan juga Pangkat tertinggi. Kemudian Selanjutnya Data tersebut menjadi dasar diajukannya telaahan staf untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati Nunukan untuk mendapatkan arahan dan persetujuan atas usulan calon Peserta Diklat Pim Tingkat III yang akan ditugaskan untuk mengikuti Diklat Pim Tingkat III yang akan dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dengan Pola Kerjasama PKP2A III LAN yang berada di Samarinda. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekda, wakil Bupati atau Bupati Nunukan, selanjutnya pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Nunukan menyampaikan nama-nama calon peserta diklatpim III tersebut ke PKP2A III LAN Samarinda sebagai Penjamin Mutu. PKP2A III LAN Samarinda menetapkan peserta dalam surat keputusan.

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara Kepala BKDD Kabupaten Nunukan yang menyatakan :

“Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) memang tidak ada, namun pola yang dilakukan adalah Kabid diminta merekap data pejabat eselon III yang sudah menduduki jabatan dan belum melaksanakan diklat pim III, dan setelah direkap jumlahnya 40 orang. Namun ada 1 orang pejabat eselon IV yang sudah lulus Tes Pim Tingkat III tapi bukan dilembaga Pemerintah Kabupaten Nunukan tapi di Lembaga lain karena yang bersangkutan pindah masuk menjadi PNS Pemerintah Kabupaten. Tetapi pemerintah kabupaten Nunukan tetap mengutamakan pejabat eselon III yang sudah duduk. Langkah selanjutnya adalah kabid kemudian melakukan koordinasi antar Bidang, untuk memastikan ada tidaknya yang melakukan pelanggaran disiplin untuk diteruskan pertimbangannya sebagai bahan rekomendasi menjadi calon peserta diklat, karena ini untuk karir mereka juga. Jika hal tersebut telah selesai, dibuatkan daftar sesuai dengan TMTnya, DUKnya, Pangkat dan sebagainya dan jika sudah terpenuhi kemudian diajukan untuk dijadikan peserta. Karena jumlahnya 40, yang diajukan kepada pimpinan (Bupati) melalui Sekda juga 40 juga, sehingga alhamdulillah pas bisa buka 1 kelas. Dan dari data yang ada, tidak ada yang pernah dijatuhi hukuman disiplin”.

Terkait penjelasan tersebut diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya mekanisme pencalonan dan penetapan peserta diklat Pim III tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2015. Ini terkait dengan proses pertanggungjawaban nantinya, dengan demikian diharapkan BKDD Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggaraan diklat yang akan datang sebelum pencalonan dan penetapan peserta diklat harus membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sehingga dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan dalam rangkaian memenuhi standar dan bisa lebih efektif koordinasinya, sehingga fungsi-fungsi administrasi dapat terlihat dijalankan dengan baik.

b. Karakteristik Tenaga Kediklatan

Tenaga kediklatan yang dimaksud dalam perka LAN Nomor 12 tahun 2013 ini adalah terdiri dari Widyaiswara dan Fasilitator, Mentor Dan Coach serta Pengelola/penyelenggara Diklat.

- 1) Widyaiswara dan Fasilitator merupakan unsur yang berada pada lini terdepan dalam proses pembelajaran dan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan diklat. Widyaiswara dapat memfasilitasi terwujudnya proses pembelajaran sehingga dapat tercipta kompetensi pada diri peserta diklat. Mengingat perannya yang sangat strategis, maka Widyaiswara dituntut agar lebih profesional. Dalam hal ini, mampu menguasai materi substansi yang diajarkan kemudian mentransfer ilmu kepada peserta diklat. Pada dasarnya persyaratan yang harus dimiliki oleh penyelenggara Diklat Kepemimpinana yaitu kemampuan dalam mengelola diklat yang dibuktikan dengan :

- Keikutsertaan Widyaswara dalam Diklat TOF (Training Of Fasilitator) terhadap materi yang diampuhnya.
- Fasilitator dalam diklat pola baru ini, berbasis pada orang yang memiliki pengalaman dikaitkan dengan teori-teori/pendekatan-pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan.

Ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada PKP2A III LAN sebagai lembaga yang berhak menentukan penunjukan widyasaranya, hasil wawancara dijelaskan berikut ini :

“Bahwa PKP2A III LAN dimana dalam pemilihan Widyaiswara berdasarkan kompetensi Widyaswara, dan kompetensi WI itu ditunjukan dengan keikutsertaan WI dalam diklat *Training Of Fasilitator* (TOF) untuk diklat Pim III dan IV. Diklat pim III di Kabupaten Nunukan, telah disesuaikan dengan TOF widyasaranya, misalnya si A mengampu materi apa, setelah itu juga tidak saklek, terdapat beberapa Pejabat struktural yang tetap ditugaskan sesuai kompetensi yang dimiliki. Dan orang-orang yang telah kami tunjuk pada intinya pertimbangan utama adalah Kompetensi yang dimiliki oleh Widyaswara dan Pejabat Struktural yang merupakan fasilitator. Kenapa dengan Fasilitator, dikarenakan dalam diklat Pim pola baru ini lebih menekankan kepada penggalian pengalaman, dalam kurikulum menyatakan bahwa diklat pola baru berbasis pada *Experinckle Learning* Pembelajaran dikenal dengan istilah On – OFF, peran Widyaiswara pada fasilitasi menggali pengalaman dan dikaitkan dengan terori-teori atau pendekatan-pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan.

Sementara ketika hal ini ditanyakan kepada kepala BKDD beliau menjelaskan,bahwa:

“terkait masalah widyasaranya, itu domain penjamin mutu, kami hanya menerima jadwal dan tenaga pengajarnya. Walaupun biasanya kami terkadang meminta orang-orang tertentu yang kami kenal sebagai widyasaranya bagus dan berkompetensi tinggi, namun semua itu tetap terpulang pada kebijakan PKP2A III LAN.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan dimana

Widyaiswara dan Fasilitator yang ditugaskan oleh PKP2A III LAN baik itu

Widyaiswara dari Kota Tarakan, PKP2A III LAN maupun dari LAN RI

selama pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan untuk mengajar dianggap mampu menyampaikan materi yang diampunya sesuai diklat TOF yang diikuti. Sehingga hal ini menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013.

Mencermati penjelasan diatas, bagi penulis, adalah memungkinkan jika kedepan BKDD Kabupaten Nunukan sudah bisa mulai mendorong bagi Pejabat-pejabat struktural yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pengajar baik sebagai Fasilitator untuk mengikuti Diklat-Diklat TOF baik diklat Prajabatan maupun Diklat Pim IV dan III. Sehingga pada saat pelaksanaan diklat Kabupaten Nunukan tidak semua bergantung kepada Widyaiswara atau Fasilitator dari Luar Nunukan. Ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat TOF berdasarkan mata diklat yang diampunya untuk mengajar pada diklat tersebut sehingga akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengefisiensikan penyediaan anggaran diklat dimana mengurangi biaya transportasi bagi pengajar dari Luar Daerah.

2) Mentor Dan Coach

Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap breakthrough I dan breakthrough II. Mentor adalah atasan langsung peserta, sedangkan coach adalah tenaga pembimbing yang memiliki kompetensi :

- a. membekali peserta dengan kompetensi yang diperlukan selama tahap breakthrough I dan breakthrough II;
- b. memotivasi peserta melalui konsultasi selama pelaksanaan breakthrough I dan breakthrough II

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan penulis, dapat disampaikan bahwa Coach yang ditunjuk sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang dari PKP2A III LAN dan 3 orang dari Bandiklat Kota tarakan. Keempat orang tersebut ditugaskan melalui surat penunjukan dari PKP2A LAN yang selanjutnya di SK-kan oleh Bupati Nunukan Nomor : 188.45/370/V/2015 tentang Penetapan Peserta, Mentor, Coach, Evaluator dan tenaga Pengajar Diklat Pim tingkat III Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 dan tanggal ditetapkan pada 25 Mei 2015 sebagaimana terlampir. Adapun nama-nama Coach dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Daftar Nama Coach Diklat Pim III
Angkatan

No	NAMA	UNIT KERJA
1	Rahmat Suparman	PKP2A III LAN
2	Wartono	Bandiklat Kota Tarakan
3	Heriyanto	Bandiklat Kota Tarakan
4	Suprpto Subdiyo	Bandiklat Kota Tarakan

Sumber : BKDD Kab. Nunukan

Jika dilihat dari tabel diatas, menjadi pertanyaan bagi penulis, hal yang mendasari PKP2A III LAN menunjuk Coach dari Bandiklat Kota tarakan sebanyak 3 orang dan hanya 1 orang dari PKP2A III. Dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN mengenai penunjukan coach tersebut, dijelaskan bahwa :

“sebelumnya coach sudah ditentukan orang-orangnya, dan berasal dari PKP2A III LAN, namun dengan adanya beberapa pertimbangan terutama kendala geografis, maka yang bersangkutan tidak bisa menjadi coach. Disamping itu, kita juga tidak bisa menunjuk dari Kabupaten Nunukan, kesulitan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk menjadi Coach yang lebih pengalaman atau yang memahami kurikulum pola baru. Sehingga alternatif yang kita ambil adalah dengan menunjuk

coach dari bandiklat Tarakan dengan pertimbangan lebih dekat dan telah ada beberapa orang yang telah memahami diklat pim pola baru tersebut.

Adapun peran Coach yang disampaikan oleh mereka berdasarkan wawancara diantaranya : Bapak Rahmat Suparman (PKP2A III LAN) :

“Coach lebih banyak memotivasi dan membantu peserta menemukan area Perubahan yang kemudian disepakati dengan mentor. Saat awal-awal peserta merasa proyek perubahan ini sulit dan cara berpikirnya masih membandingkan dengan diklat pola lama, sehingga peran coach saat pertemuan awal yang harus dilakukan adalah menyemangati dimana bahwa perubahan itu seperti ini tidak harus besar bisa yang kecil, intinya bagaimana peserta bisa memanfaatkan peran sebagai pejabat eselon III di Daerah untuk memberikan layanan yang terbaik. Dari hasil pertemuan awal tersebut coach menyemangati dan membantu menggali dan juga saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok sampai akhirnya didapati proyek perubahan yang inovasi”.

Sedangkan Bapak Suprpto Subdiyo (Bandiklat Kota Tarakan) :

“Yang kami lakukan sesuai dengan tahapan sesuai dengan Perka LAN sebagai Coach harus Aktif untuk membimbing peserta diklat Pim III dan Sharing pengalaman sesuai kapasitas Coach. Karena jaraknya jauh antara Nunukan dan Tarakan peserta melakukan konsultasi secara intens memanfaatkan teknologi melalui WA, Email maupun Sms . Dan juga melakukan bimbingan kepada Peserta yang 10 orang tersebut di Bandara Tarakan saat peserta akan melakukan Benc marking ke Bantaeng”.

Bapak Wartono (Bandiklat Kota Tarakan) :

“Sebagai Peserta PIM harus menyusun jadwal rangkaian kegiatan dengan jelas dan peserta harus aktif berkomunikasi dengan coach dalam melakukan bimbingan dan konsultasi selama menyusun Proyek Perubahan. Dan komunikasi dilakukan lewat WA dimana dibuat Blok atau group khusus untuk peserta bimbingan saya. Sehingga komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja”.

Mencermati hasil wawancara diatas, menurut penulis sudah saatnya BKDD Kabupaten Nunukan membuat terobosan baru, misalnya dengan memberi kesempatan pejabat eselon II atau eselon III yang memahami diklat pim pola baru untuk menjadi coach atau terkhusus kepada pejabat yang telah mengikuti diklat pim pola baru, agar lebih efisien. Dan jika memungkinkan, pemerintah

kabupaten menugaskan beberapa pejabat yang memiliki kompetensi untuk mengikuti diklat coach.

Sesuai hasil wawancara Kabid diklat PKP2A III LAN yang berada di Samarinda dimana Coach yang telah ditunjuk tersebut dianggap mampu menyampaikan materi yang diampunya sesuai diklat TOF yang diikuti. Sehingga hal ini menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013. Penugasan 3 (tiga) Orang dari Bandiklat Kota Tarakan dan 1 (satu) orang dari PKP2A III LAN di Samarinda untuk menjadi Coach pada penyelenggaraan diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan diklat pim yang akan datang. Bahwa dalam rangka efisiensi anggaran maka PKP2A III LAN dapat menunjuk Pejabat di Lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan terutama pejabat eselon II maupun eselon II yang paham dengan diklat pola baru dan/atau yang pernah mengikuti diklat Coach. Karena menurut penulis banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mampu menjadi Coach, mengingat beberapa Pejabat eselon II dan III tersebut juga pernah mengikuti diklat Pim Pola baru. Saat ini terdapat 6 orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang pernah ditugaskan mengikuti diklat Pim Tingkat II dengan Pola Baru, 2 orang di LAN RI Panjempongan Jakarta, 3 orang di PKP2A III LAN di Samarinda dan 1 orangnya lagi di Bandiklat Propinsi Jawa Timur. Dan diantara 6 orang tersebut terdapat 1 orang pejabat eselon II yang menjadi Peserta terbaik ke 2 dari 60 peserta yang mengikuti diklat PIM tingkat II di PKP2A III LAN di Samarinda. Demikian juga Pejabat eselon III yang telah mengikuti diklat Pim Tingkat III dengan pola baru ada 40 orang dan 5 orang

peserta yang menjadi lulusan terbaik mendapat apresiasi dari PKP2A III LAN sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan berikutnya dalam penunjukan Coach bagi peserta diklat pim III maupun Diklat Prajabatan yang akan datang.

Khusus untuk Mentor, telah dijelaskan bahwa mereka adalah atasan langsung peserta diklat. Adapun tugas dan fungsinya adalah :

- Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
- Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (disebut *Reformer*) dalam mempersiapkan proposal Proyek Perubahan yang akan dilakukan;
- Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan krusial organisasi yang memerlukan terapi melalui proyek perubahan;
- Membantu peserta diklat (*Reformer*) dalam memetakan agenda proyek yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
- Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta diklat (*Reformer*);
- Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh peserta diklat (*Reformer*);
- Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (*Reformer*) dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan;
- Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (*Reformer*) dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan;
- Memberikan bimbingan kepada peserta diklat (*Reformer*) dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
- Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat (*Reformer*) dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.
- Memantau jalannya proyek perubahan yang dilakukan oleh para peserta diklat (*Reformer*).

Namun dilihat dari dokumen yang ada, terdapat beberapa mentor yang mengalami perubahan. Dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada kepala BKDD dijelaskan bahwa :

“pada saat penetapan surat keputusan, mentor peserta sesuai dengan yang seharusnya, namun dalam pelaksanaannya terdapat pergantian mentor berkaitan dengan kendala teknis, diantaranya adalah :

- adanya kepala dinas/kepala badan yang juga harus mengikuti diklat pim II, misalnya Kepala Disperindakop, kepala dinas perikanan dan kepalutan serta kepala dinas kesehatan.
- terdapat kepala dinas yang tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa sama sekali menghadiri seminar laboratorium kepemimpinan.
- Terdapat jabatan kosong pada eselon II misalnya kepala BPPD yang saat itu mengajukan pensiun dini terkait pencalonannya sebagai wakil bupati Nunukan.

Hal-hal tersebut, membuat kami mengajukan telaahan kepada bupati/wakil bupati untuk menunjuk assissten berdasarkan garis koordinasinya untuk menjadi mentor. Misalnya Kadisperindakop penggantinya asisten II dan seterusnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik mentor di diklat pim III telah sesuai dengan strukturisasi kewenangan, sehingga tidak melewati jalur berdasarkan hirarki birokrasi.

Informasi hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa coach dan mentor yang ditunjuk telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam perka Lan tersebut. Dan dari opini yang terbangun, penulis merasa yakin bahwa Kabupaten Nunukan harus memastikan diri memiliki sumber daya aparatur yang dapat menjadi coach kedepan, karena standar menjadi coach telah tersedia. Tinggal bagaimana usaha dan upaya serta komitmen itu dapat ditunjukkan, agar mendapat kepercayaan dari stakeholder.

3) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah

Sebagaimana diterangkan dalam Bab IV Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 bahwa pengelola dan penyelenggara Diklat Tingkat III memiliki kemampuan dalam mengelola diklat yang dibuktikan dengan :

1. Sertifikat Diklat *Management of Training* bagi pengelola Diklat
2. Sertifikat *Training Officer Course* bagi penyelenggara Diklat

Sebelumnya perlu diketahui, BKDD Kabupaten jumlah PNS pada Bidang Diklat terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang Eselon III (Kabid Diklat), 2 (dua) orang Eselon IV/a (Kasubbid Diklat Kepemimpinan dan karir dan Kasubbid Diklat fungsional dan jabatan). Masing masing Kasubbid Diklat membawahi 1 orang staf serta dibantu 5 (lima) orang tenaga honorer. Dan diantara 5 (orang) PNS yang ada di Bidang Diklat belum ada yang memiliki sertifikat MOT dan TOC.

Pelaksanaan diklat PIM Tingkat III oleh BKDD Kabupaten Nunukan dengan pola kerjasama dengan PKP2A III LAN yang berada di Samarinda sebagai Penjamin Mutu. Pada Pelaksanaan Diklat Pim Pola Baru terhitung mulai Tahun 2014 sampai dengan saat ini dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan kabid diklat bahwa :

“kami setiap tahun alhamdulillah selalu diberi ijin untuk menyelenggarakan diklat. Pengelola diklat (BKDD) dan penyelenggara diklat PKP2A LAN selaku penjamin mutu selalu melakukan kordinasi secara insentif, kami selaku panitia berusaha bekerja secara kerja tim (*team work*) yang ditunjukkan dengan kekompakan, saling mengisi dan membantu satu sama lain tanpa mengabaikan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Jalinan koordinasi dan komunikasi yang terus menerus dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan kepada PKP2A III LAN baik melalui telepon serta bertemu langsung, yang bertujuan untuk sama-sama mensukseskan penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan.

Ketika penulis mengemukakan bahwa aturan dalam perka Lan menyatakan aturan sebagaimana 2 poin diatas, lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa :

“penyelenggara diklat memang harus memiliki sertifikat tersebut, namun berdasarkan kerjasama tersebut, penjamin mutu telah menyiapkan pembekalan tersebut dalam rangkaian pelaksanaan diklat pim III ini. Maka secara implisit, kita dianggap telah memenuhi kriteria sebagai tempat penyelenggaraan diklat pim. Sekalipun demikian, telah kita sampaikan kepada PKP2A III LAN, komitmen kami kedepan akan mengirimkan pegawai untuk ikut pelatihan MOT dan TOC, dan hal tersebut akan kami tuangkan dalam anggaran APBDP tahun 2016 ini”

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala PKP2A III LAN dan Kabid

Diklat Aparatur pada PKP2A III LAN melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa :

“Untuk penyelenggaraan yang akan datang, kami harapkan BKDD Kabupaten Nunukan harus mengajukan Akreditasi dalam Penyelenggaraan Diklat Prajabatan maupun Diklat kepemimpinan. Dan yang menjadi persyaratan utamanya adalah harus tersedianya Sumber Daya Manusia atau ASN di BKDD Kabupaten Nunukan yang memiliki kemampuan sebagai pengelola dan penyelenggaraan diklat yang dibuktikan dengan adanya sertifikat MOT maupun TOC. Sehingga ke depannya BKDD Kabupaten Nunukan dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan secara mandiri. Kami selalu mendorong kearah itu, jangan sampai terlalu nyaman dengan penjamin mutu, sehingga terlupa terhadap upaya untuk bisa berdiri diatas kaki sendiri”.

Menyimak hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, BKDD Kabupaten Nunukan belum memenuhi syarat sebagai penyelenggara ataupun pengelola diklat, karena tidak memiliki sertifikat MOT dan TOC. Dalam kaitannya menuju badan diklat yang terakreditasi, BKDD tentu akan sulit memenuhi target tersebut.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana diklat (fasilitas diklat) merupakan hal terpenting yang harus disiapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penyiapan Prasarana dan sarana diklat tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran proses penyelenggaraan diklat. Dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013

pada Bab V mengenai prasarana dan sarana (fasilitas diklat) yang diperlukan dalam Diklatpim meliputi:

- 1) Aula
- 2) Ruang Kelas
- 3) Ruang Seminar
- 4) Ruang Diskusi
- 5) Ruang Kantor
- 6) Ruang Kebugaran
- 7) Ruang Komputer
- 8) Ruang Laboratorium
- 9) Asrama bagi Peserta
- 10) Wisma Tenaga Kediklatan
- 11) Perpustakaan
- 12) Ruang Makan
- 13) Fasilitas Olah Raga
- 14) Fasilitas Rekreasi
- 15) Unit Kesehatan
- 16) Tempat Ibadah.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III menggunakan sarana sebagai berikut :

- 1) Papan Tulis
- 2) Flip Chart
- 3) *Overhead Projector* (OHP)
- 4) *Sound System*,
- 5) TV dan Vidio
- 6) Kaset, *Compact disc*
- 7) Perekam
- 8) Komputer Laptop
- 9) *LCD Projector*
- 10) Jaringan *Wireless Fidelity* (Wi-Fi)

- 11) Buku Referensi
- 12) Modul/Bahan ajar
- 13) Bank Kasus dan
- 14) Teknologi Multimedia

Adapun hasil telaahan terhadap dokumen tentang evaluasi terhadap keadaan saran prasarana, penulis tidak menemukan panitia/penyelenggara terhadap adanya upaya tersebut. Misalnya adanya kuisisioner terhadap tanggapan peserta terhadap fasilitas yang disediakan oleh BKDD Nunukan, sehingga tidak terlihat penilaian peserta terhadap sarana dan prasarana diklat pada BKDD, dengan demikian kami tidak dapat menampilkan tabel terhadap kepuasan peserta setelah mengikuti diklat.

Mengenai sarana dan prasarana diklat kami hanya meminta gambaran dari panitia penyelenggara dengan hasil bahwa :

“Sarana dan prasarana diklat di BKDD Kab. Nunukan belum semuanya tersedia seperti ruang seminar yang belum permanen yang idealnya 4 ruangan, ruang olahraga yang belum memadai dan yang paling sulit kami lakukan adalah ketersediaan wifi yang sebenarnya sangat diperlukan baik oleh peserta maupun widyaiswara. Hal ini sudah berkali-kali kami benahi, namun menurut pihak telkom BKDD Nunukan ini masuk dalam area black spot sehingga kami belum mampu untuk mengatasi keadaan tersebut. Terkait asrama, kami telah memiliki, namun standar idealnya LAN itu, dalam 1 kamar setidaknya hanya memuat 2 orang peserta, namun karena kita belum mampu menambah kamar tidur, maka terpaksa kami menyediakan 1 kamar ditempati 3-4 orang. Hal ini belum dapat kami benahi, dan semoga kedepan bisa dicarikan solusi terbaik”
(wawancara : 24 April 2016)

Hal yang sama disampaikan Widyaiswara tentang sarana dan prasarana diklat :

“Alhamdulillah sudah cukup mendukung, dan akan lebih baik lagi apabila secara bertahap dilengkapi dan disempurnakan. Sarana dan prasarana yang ada cukup mendukung proses belajar mengajar. Hanya saja wifi dan ruang seminarnya dapat difasilitasi sehingga kelancaran penyelenggaraan diklat bisa maksimal. Sarana dan prasarana mendukung untuk proses belajar

mengajar terutama infocus (LCD), laptop, white board, sound system sudah bagus, dan kami apresiasi.

Dalam wawancara terpisah, ketikahal ini kami konfirmasi kepada kasubid

Diklat kepemimpinan, beliau menjelaskan bahwa :

“evaluasi mengenai sarana prasarana diklat Pim III kita lakukan bersama antara peserta, PKP2A III Lan, panitia dan Widyaswara. Tanggapan yang paling banyak dikeluhkan adalah ketersediaan wifi yang tidak memadai, termasuk konsumsi sebagian besar peserta Diklatpim, ada sebagian yang menyatakan kurang asupan gizinya. Terkait kendala ruang seminar, telah dibicarakan bersma, bahwa kedepan gedung eks pendidikan yang berada tepat disamping BKDD akan dilakukan rehab 2 lantai, sehingga akan disetting sedemikian rupa agar disediakan ruang khusus seminar yang multi guna”

Secara keseluruhan dapat diperoleh gambaran bahwa reaksi peserta dan responden lainnya (WI & Panitia) Diklatpim III terhadap sarana dan prasarana diklat cukup baik namun belum optimal. Sebaiknya sarana dan prasarana lebih dilengkapi dan disempurnakan sesuai yang ditetapkan oleh Keputusan LAN Nomor 12 Tahun 2013.

Mayer dan Green Wood menegaskan bahwa dalam tahap implementasi mungkin akan memerlukan proses perencanaan sendiri, namun perencanaan yang berkaitan dengan implementasi tak lebih sebagai program atau perencanaan administratif. Tentu saja gambaran demikian berperspektif sangat top-down, seolah seluruh faktor penentu keberhasilan kebijakan mencapai tujuannya dapat diperhitungkan sebelumnya dan mereduksi peran implementor menjadi sekedar pelaksanaan tugas yang bersifat administratif belaka. Padahal sesungguhnya keberhasilan telah dapat diprediksi apabila proses administrasi juga memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end,*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, bukan suatu tujuan yang sekedar

diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada "faktor pendukung" yang diperlukan, ada rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

Dari berbagai input yang telah dijelaskan diatas mulai dari karakteristik peserta, widyawara, tenaga kediklatan lainnya, mentor dan coach, pengelola, serta sarana prasarana kediklatan, menurut penulis tergambar bahwa BKDD Kabupaten Nunukan banyak mengabaikan proses administrasi dalam pengelolaannya. Hal ini menjadi catatan evaluasi bagi BKDD bahwa proses administrasi tidak boleh diabaikan karena merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, sebuah bentuk pertanggungjawaban dan merupakan bagian dari manajemen publik yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas.

Dikaitkan dengan teori evaluasi stufflebeam menyatakan bahwa input evaluasi menginventarisir dan menganalisa manusia, materi penelitian, strategi penyelesaian dan desain prosedur sebagai dasar untuk pelaksanaan pertimbangan. Artinya hal-hal yang telah dijelaskan diatas, menjadi bagian untuk penentuan program yang mana membuat perubahan kebutuhan, karena stufflebeam mengatakan input adalah pelopor dari keberhasilan atau kegagalan dan efisiensi dari perubahan usaha.

C. Evaluasi terhadap Proses penyelenggaraan diklat Pim III

Sebelum lebih jauh membahas hal-hal terkait proses penyelenggaraan diklat pim III di Kabupaten Nunukan, ada baiknya penulis menggambarkan tahapan dan agenda yang harus dilakukan oleh reformer (peserta) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 sebagai berikut :



Sumber : LAN RI

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap yaitu :

1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan. Tahap ini merupakan tahap penentuan area dari program organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada tahap ini peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi sehingga mampu mengidentifikasi area dari program organisasi yang perlu direformasi. Ada lima mata diklat (8 Hari Kerja) pada tahap ini, meliputi : Wawasan Kebangsaan, Integritas, Pembekalan Isu Strategis, *Diagnostic Reading*, dan Penjelasan Proyek Perubahan.

2. Tahap *Taking Ownership (Breakthrough I)*. Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun *organizational learning* atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari program organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi kepada *stakeholder*-nya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta diminta mengumpulkan data selengkap mungkin untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. Hanya ada dua mata diklat, yaitu: *Coaching* dan *Counselling* yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik (selama 5 Hari Kerja).
3. Merancang Perubahan dan Membangun Tim

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal dari program organisasi yang dicita-citakan. Peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi *stakeholder* yang terkait dengan rancangannya, termasuk dibekali dengan berbagai teknik komunikasi strategis kepada *stakeholder* tersebut, guna membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan oleh masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di hadapan *stakeholder* strategis untuk mendapatkan masukan dan dukungan terhadap implementasi proyek. Tahap ini menyajikan sembilan mata diklat (17 Hari Kerja), yaitu: Pengembangan Potensi

Diri, Inovasi, Jejaring Kerja, Budaya Kerja dalam Efektifitas Kepemimpinan, Membangun Tim Efektif, *Benchmarking ke Best Practice*, Merancang Proyek Perubahan, Seminar Presentasi Proyek Perubahan, dan Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan.

4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (*Breakthrough II*)

Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuat. Hanya ada dua mata diklat, yaitu: *Coaching* dan *Counselling* yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik (selama 60 Hari Kerja).

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, ada dua mata diklat yaitu: berupa seminar (sehari) implementasi proyek (mata diklat: Seminar Laboratorium Kepemimpinan), yang merupakan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi proyek perubahan. Peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan akan dinyatakan lulus Diklatpim Tk.III, sedangkan peserta yang tidak berhasil, akan diberi sertifikat telah mengikuti Diklatpim Tk.III. Pada hari terakhir pembelajaran Diklatpim Tk.III diisi mata diklat : Evaluasi Kepemimpinan, dilanjutkan Penutupan Diklat. Dengan melakukan evaluasi diklat, dapat diketahui seberapa besar diklat yang diberikan telah menambah, merubah, serta meningkatkan

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap para peserta sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga.

Kelima tahapan diatas yang harus dilakukan oleh seorang reformer bahwa peran seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mendiagnosa masalah, mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, khususnya dalam perubahan keterampilan dan sikap bawahannya. Maka dari itu, calon reformer perlu dibekali dengan segala pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan pelaksanaan proses perubahan yang akan mereka lakukan di arena mereka. Dalam melakukan perubahan, reformer didampingi oleh seorang coach dan mentor yang tugasnya sebagai pembimbing bahkan seorang konselor jika dalam proses perubahan tersebut para reformer mengalami masalah psikologis misalnya kurang motivasi atau merasa tertekan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang akan dievaluasi dalam proses diklat Pim III di Kabupaten Nunukan dalam penelitian ini adalah

- 1) sejauh mana kesesuaian antara kurikulum dan jadwal, kompetensi mengajar Widyaiswara serta proses belajar di kelas yang meliputi : sistematika penyajian dari Widyaiswara, kemampuan menyajikan, penggunaan metode, penggunaan alat dan media diklat serta performansi Widyaiswara. Berkenaan hal ini ketika ditanyakan kepada kepala bidang diklat BKDD Kabupaten Nunukan, dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan dengan Pola Kerjasama dengan PKP2A III LAN yang berada di samarinda sebagai Penjamin Mutu, maka yang mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan jadwal dengan mengikuti kurikulum yang telah diatur dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 beserta Widyaiswara yang di tugaskan adalah menjadi Domain dari pada PKP2A III LAN. Penyelenggaraan Diklat Pim Tingkat III tersebut dari 5 tahapan pembelajaran yaitu 1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking Ownership;

3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi. Bentuk pembelajaran Diklatpim Tk.III menggunakan *Coaching* dan *Counseling*. Proses pembelajaran dengan *Experiential Learning* (belajar berdasar pengalaman) yang dilaksanakan selama 93 Hari Kerja. Adapun pembelajaran Diklatpim Tk.III dilaksanakan selama 93 Hari Kerja, yang dibagi menjadi: 28 Hari Kerja berupa pembelajaran klasikal, dan 65 Hari Kerja berupa pembelajaran non-klasikal.

Hal tersebut didukung hasil Wawancara dengan Kabid Diklat Kabupaten

Nunukan dimana menjelaskan :

“berkaitan dengan jadwal diklat pim III itu yang menyusun adalah PKP2A III LAN di samarinda yang selanjutnya diemail ke kami dan jadwal tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang ada berdasarkan tahapan-tahapannya. Baik on Campus maupun Off Campus (*Breakthrough I*) selanjutnya On Campus kembali Tahapan ketiga dimana peserta mulai merancang Proyek perubahan dan membangun tim dalam mendukung penyusunan proyek perubahan kemudian peserta memasuki tahap ke empat (Off Campus) tahap Laboratorium Kepemimpinan (*Breakthrough II*) dimana peserta harus mengerjakan apa yang menjadi proyek perubahan di SKPDnya masing-masing dan tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi dimana peserta akan seminar implementasi proyek perubahan yang sudah dilakukan dan dibuktikan dengan menunjukkan eviden –eviden yang ada. Adapun jadwal yang telah disusun memang kadang-kadang ada perubahan jadwal berkaitan ketersediaan widyaiswara yang ditugaskan oleh PKP2A III LAN dan hal tersebut dikarenakan kadang-kadang diklat dilaksanakan bersamaan baik LAN RI di jakarta, PKP2A III LAN di samarinda dan juga Bandiklat Kota Tarakan. Sehingga pelaksanaan dan jadwal yang ada tersebut sangat bergantung dari Widyaiswara dari LAN, PKP2A III LAN maupun Bandiklat Kota Tarakan.

Adapun proses belajar mengajar yang dilakukan dalam berbagai tahapan diatas, telah dilakukan evaluasi terhadap respon peserta melalui pembagian kuesioner setelah pembelajaran selesai, dalam tabel 4. 10 berikut ini :

Tabel 4.10
Respon Peserta terhadap Mata Diklat Widyaswara

MATA DIKLAT	UNSUR YANG DINILAI (Rata-Rata/MATA DIKLAT)										TOTAL	RATA-RATA
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10		
Wawasan Kebangsaan	85,6	83,5	91	85	85	85	85,3	91	85	85	861,4	86,14
Integritas	93,18	95,24	91	92	95	94	96,2	93	97	95	941,62	94,16
Pembekalan Isu Strategis	94	94	94	95,2	95	94	94	94	95	95	944,2	94,42
<i>Diagnostic Reading</i>	90	85	90	95,4	82	85	92	92	90	87	888,4	88,84
Penjelasan Proyek Perubahan	95	95	95	90	90	95	95	90	90	91	926	92,60
TOTAL	457,78	452,74	461	457,6	447	453	462,5	460	457	453	4561,62	456,162
RT.	91,56	90,55	92,20	91,52	89,40	90,60	92,50	92,00	91,40	90,60	912,32	91,23

KET :

U1 : Sistem Penyajian

U2 : Kemampuan Menyajikan

U3 : Ketepatan Waktu dan kehadiran

U4 : Penggunaan Metode dan Sarana Diklat

U5 : Sikap dan Perilaku

U6 : Cara Menjawab Pertanyaan dari Peserta

U7 : Penggunaan Bahasa

U8 : Pemberian Motivasi terhadap Peserta

U9 : Kerapian Berpakaian

U10: Kerjasama antar Tenaga Pengajar

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran antara widyaswara dengan peserta memuaskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh widyaswara mampu dicerna dan dapat dipahami oleh peserta diklat pim III.

2) Sejauh mana kesiapan *Mentor* yang mendampingi reformer dan seberapa besar mensupport *reformer* mengeksekusi proyek perubahannya.

Dalam penyusunan mulai dari Rancangan Proyek Perubahan dan mengimplementasikan diperlukan dukungan dari pada Mentor yang merupakan atasan langsung reformer atau peserta diklat pim tingkat III.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mentor dan telaahan dokumen terkait proyek perubahan reformer, didapati jawaban yang hampir sama. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua mentor disaat awal pelaksanaan diklat Pim tingkat III dengan pola baru belum memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mentor. Namun setelah di jelaskan oleh Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di sebuah pertemuan kepada

semua mentor, kemudian memahami, justru Mentor sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap diklat pim pola baru tentang proyek perubahan yang dibuat oleh reformer. Karena mentor memiliki peran yang sangat besar dengan kesuksesan terlaksananya proyek perubahan reformer dan akan menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi SKPDnya masing-masing dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat (terlampir dalam lampiran beberapa testimoni Kepala Dinas SKPD).

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari kepala BKDD selaku Ketua penyelenggara Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan melalui wawancara sebagai berikut :

“Dukungan para mentor dapat dilihat dari Hadirnya para Mentor selaku atasan langsung pada saat proses Seminar Rancangan Proyek Perubahan dan juga Seminar Proyek Perubahan. Bahkan dalam pelaksanaannya mentor berjnji akan mendukung melalui dukungan anggaran dalam mengimplementasikan proyek perubahan para reformer, apakah itu dalam APBD Perubahan maupun pada APBD murni pada tahun berikutnya”

Dari informasi melalui dokumen kuesioner dan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa telah ada interaksi yang baik antara mentor dengan peserta (*reformer*), mentor pada dasarnya mau melakukan perubahan di SKPDnya sehingga melahirkan proyek-proyek unggulan dalam mempermudah administrasi, mempermudah pelayanan sehingga tercipta ASN yang *responsibility* terhadap *publik service*.

3) Seberapa besar *Coach* memberi arahan dan bimbingan kepada reformer sehingga menghasilkan laporan proyek perubahan yang baik dan benar;

Sebelum terlalu jauh membahas pelaksanaan pembimbingan coach ada baiknya dipaparkan peran coach sebagai berikut :

- Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap *Taking The Ownership* dan *Leadership Laboratory* melalui media teknologi informasi (IT);
- Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta (*Reformer*) apabila peserta (*Reformer*) mengalami permasalahan selama tahapan *Taking The Ownership* dan *Leadership Laboratory* ;
- Memberikan *feedback* terhadap laporan perkembangan implementasi proyek perubahan yang disampaikan peserta (*Reformer*) bimbingan minimal seminggu sekali (setiap hari Jum'at);
- Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap perkembangan yang dilaporkan oleh peserta (*Reformer*) bimbingannya;
- Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil *coaching* kepada penyelenggara Diklatpim Tingkat III;
- Menjadi Counselor pada saat peserta mengalami *lack of motivation* selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan

Peran Coach sebagai pembimbing peserta selama pelaksanaan tahap *Breakthrough I* dan *Breakthrough II*. Pada berlangsungnya diklat peserta yang berjumlah 40 dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok didampingi 1 orang Coach. Dimana Coach dapat membekali setiap peserta dengan kompetensi yang diperlukan serta memotivasi peserta melalui konsultasi yang dilakukan oleh para peserta selama *Breakthrough I* dan *Breakthrough II*.

Adapun pembagian 40 peserta ke dalam 4 kelompok dengan penanggung jawab masing-masing Coach dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Pembagian Kelompok berdasarkan Coach
Diklat Pim III

KELOMPOK	COACH	PESERTA
I	Dr. Rahmat, MA	<ul style="list-style-type: none"> • Rudiansyah • Rusmansyah • Sabaruddin • Sapto Hari Sampurno • Silvia HW Q Mone • Sirajuddin • Siti Hasnah • Devi Ruyen • Yoseph • Heberli
II	Hariyanto, S.Pt., M.HP	<ul style="list-style-type: none"> • I Ketut Karyawan • Jefri • Joned • Lother • Lukas Iskandar • Mariani • Muhammad Ramli • Ramsidah • Rasna • Alis Sujono
III	Wartono, SE, MM	<ul style="list-style-type: none"> • Abd. Haris Bebe Aran • Agus • Drs. Hasan Basri • Rina Dwi Julianti • Baharuddin Sampe Ruru • Budi Haryanto • Darius • Dedy Suprayitno • Sugianto Albert • Elirath
IV		<ul style="list-style-type: none"> • Endah Kurniawati • Eurike Suppa • Eva Rahmifa • Fajar Budhayanto • Freddiyanto • Agus Arief Darmawan • Hasan Basri, S.IP • Yuni Sere • Helmi Pudaaslikar • Herry Ageng Santoso

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan

Terkait proses antara coach dengan reformer dalam proses *Breakthrough I* dan *Breakthrough II* dilakukan melalui konsultasi melalui tatap muka, dan dengan mempergunakan teknologi komunikasi atau informasi berbasis elektronik.

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dari Coach yang ada diantaranya:

Bapak Rahmat Suparman (PKP2A III LAN) :

”Selama proses bimbingan dengan reformer, kami melakukan konsultasi secara intens dengan memanfaatkan teknologi melalui WA, Email maupun Sms . Dan juga pertemuan langsung sebelum dilaksanakannya Ujian Seminar Rancangan Proyek Perubahan maupun Ujian Seminar Proyek Perubahan, yang dilakukan di BKDD Kabupaten Nunukan”.

Bapak Suprpto Subdiyo (Bandiklat Kota Tarakan) :

”Karena jaraknya jauh antara Nunukan dan Tarakan peserta melakukan konsultasi secara intens memanfaatkan teknologi melalui WA, Email maupun Sms . kami juga melakukan bimbingan kepada Peserta yang 10 orang tersebut di Bandara Tarakan saat peserta akan melakukan *Benchmarking* ke Bantaeng. Beberapa kali juga kami melakukan tatap muka langsung bimbingan sebelum dilaksanakan ujian Seminar Rancangan Proyek Perubahan maupun Ujian Seminar Proyek Perubahan.

Bapak Wartono (Bandiklat Kota Tarakan) :

“untuk reformer yang melakukan coaching dengan saya, komunikasinya dilakukan lewat WA dimana dibuat Blok atau group khusus untuk peserta bimbingan saya. Sehingga komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dilanjutkan dengan pertemuan di Nunukan bimbingan secara langsung sebelum Ujian Seminar Rancangan Proyek Perubahan maupun Ujian Seminar Proyek Perubahan.

Dari beberapa penjelasan coach diatas, jawaban yang diberikan hampir sama, sehingga disimpulkan bahwa antara coach satu dengan lainnya memberlakukan perlakuan yang sama terhadap reformer. Ini menunjukkan adanya kesepakatan dan komitmen yang sama antara coach satu dan lainnya bahwa semua cara komunikasi dilakukan, dengan memanfaatkan aspek perubahan sehingga menjadi efektif, efisien dan tidak menimbulkan kecemburuan satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Sarosa bahwa teori

administrasi yang menyangkut pelayanan publik, salah satunya adalah harus dapat mendorong lahirnya cara-cara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

4) Bagaimana reformer mengikuti secara keseluruhan tahapan proses penyelenggaraan diklat pim III sehingga menghasilkan proyek perubahan.

Dari 5 tahapan sebagaimana yang diuraikan diatas, tahapan yang paling penting dalam menciptakan proyek perubahan adalah pada tahap *Taking Ownership (Breakthrough I)*. Pada tahap ini reformer selama 5 hari akan membangun jaringan ke semua stakeholder dalam rangka mendapatkan dukungan dan persetujuan, sehingga peran mentor sangat dibutuhkan dalam mendorong bawahannya melewati tahap ini. Ketika hal-hal sedemikian ini ditanyakan kepada beberapa peserta diklat melalui kuesioner dan survey lapangan, beberapa testimoni telah diberikan oleh mereka. Dari telaahan dokumen yang dilakukan oleh penulis, hampir semua peserta memberikan jawaban yang sama bahwa dukungan mentor sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek perubahan mereka, karena itu mereka sangat apresiasi dan bersemangat untuk melanjutkan proyek perubahannya dengan cara banyak mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tujuannya untuk melayani masyarakat dapat optimal.

Tahap yang juga sangat menjadi perhatian khusus dalam proses pembelajaran adalah mengenai *Benchmarking* ke *Best Practice*. Ini dilakukan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki *best practice* dalam pengelolaan kegiatan melalui pembelajaran *Benchmarking*, *Knowledge replication* dan *knowledge customerzation*. Pembelajaran disampaikan secara

interaktif dengan metode kunjungan lapangan, tanya jawab, dan diskusi. Ketika hal ini ditanyakan kepada kepala BKDD tujuan daripada Benchmarking, beliau menjelaskan :

“Benchmarking ke best practice merupakan implementasi suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan Rancangan Proyek Perubahan Untuk mendapatkan input guna perkuatan rancangan proyek perubahan dimaksud diperlukan kegiatan benchmarking dan diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang dijadikan obyek *benchmarking* yang memiliki *best practice* dalam pengelolaan kegiatan. Jadi kemarin kami, mendatangi Kabupaten Bantaeng karena beliau telah banyak melakukan inovasi terkait dengan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sangat efektif dan efisien. Contoh-contoh tersebut diharapkan memberi inspirasi bagi peserta untuk merancang Proyek Perubahan.

Adapun dokumentasi *benchmarking* sebagaimana dilampirkan pada lampiran nomor 5 dalam tesis ini, yang bersumber dari BKDD Kabupaten Nunukan.

Kemudian tahap yang paling menentukan bagi peserta adalah tahap laboratorium Kepemimpinan (*Breakthrough II*). Pada tahap ini peran coach dan mentor sangat tinggi. Reformer akan melakukan milestone yang telah dirancang untuk dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek dan jika bisa sampai jangka menengah. Peran keduanya sangat menentukan tingkat pencapaian target dan pendokumentasian proyek perubahan berupa eviden-eviden sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan salah satu peserta, bahwa :

“dalam tahap IV kami harus memmanage waktu sebaik-baiknya, dukungan mentor menjadi penyemangat agar pencapaian target sesuai dengan rancangan yang telah kami bangun. Konsep yang telah kami bangun sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan tertinggi tetap ada ditangan mentor. Tapi semua berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tujuan kami dapat tercapai”

Mencermati penjelasan dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjalin harmonisasi antara mentor, peserta dan coach dalam proses menghasilkan proyek perubahan. Masing-masing menyadari dan melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing sehingga manajemen waktu dan dukungan kebijakan telah mampu membuat reformer mencapai target yang telah dirancang sebelumnya.

Proses merupakan variable penilaian mutu yang penting. Penilaian terhadap proses adalah evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan reformer melaksanakan dalam rangka menghasilkan proyek perubahan yang didalamnya meliputi keterkaitan widyaiswara, mentor, coach. Kriteria yang digunakan adalah derajat keterkaitan, harmonisasi, koordinasi dan kolaborasi semua yang berkepentingan dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pelaksanaan berlangsung sesuai dengan standar-standar dan harapan- harapan masing-masing proses.

Evaluasi proses meliputi evaluasi yang telah ditentukan (dirancang) dan diterapkan di dalam praktek (proses). Seorang penilai proses disebut sebagai pemonitor sistem pengumpulan data dari pelaksanaan program sehari hari. Evaluator harus mencatat secara detail apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program, mempunyai catatan harian dan perkembangan setiap langkah dalam pelaksanaan program yang digunakan untuk pengambil keputusan dan menentukan tindak lanjut program apabila waktu berakhir telah tiba. Tugas lain dari penilai proses adalah melihat catatan kejadian-kejadian yang muncul selama program tersebut berlangsung dari waktu ke waktu yang akan sangat berguna dalam menentukan kelemahan dan kekuatan atau faktor pendukung serta faktor penghambat program jika dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan.

Suatu program yang baik (yang pantas untuk dinilai), yaitu: 1). Program/kegiatan tersebut sudah dirancang dan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap program/kegiatan tersebut; 2). Bentuk kegiatannya nyata dan dapat di monitor dengan baik serta jelas terhadap unsur yang terlibat; 3). Waktu kegiatannya jelas. Tujuannya adalah membantu penanggung jawab pemantau (monitor) agar lebih mudah mengetahui kelemahan kelemahan program dari berbagai aspek untuk kemudian dapat dengan mudah melakukan remedial atau perbaikan di dalam proses pelaksanaan program.

Rossi & Freeman menyatakan bahwa Evaluasi Formatif adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan evaluasi terhadap proses
2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan
3. Menggunakan model-model dalam implementasi
4. Biasanya bersifat kuantitatif
5. Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program

Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melihat :

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;
3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, jika dilihat dari keseluruhan proses penyelenggaraan yang merupakan bagian dari proses diklat Pim III di BKDD Kabupaten Nunukan, penulis berpendapat bahwa BKDD telah cukup baik menyelenggarakan diklat Pim III, dalam hal ini bagaimana memfasilitasi interaksi, koordinasi, kolaborasi dan semua proses yang berkenaan dengan hubungan dan harmonisasi antara wi, coach, mentor dan reformer dalam menghasilkan proyek perubahannya sehingga terjalin dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana teori evaluasi stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi proses mengidentifikasi atau memperkirakan kerusakan dalam pelaksanaan, menyediakan informasi untuk pertimbangan program dana catatan/laporan dan mempertimbangkan kegiatan dan aktifitas. Hal ini akan menjadi penopang aktualisasi untuk nantinya digunakan sebagai taksiran terhadap hasil. Karena itu, dikatakannya bahwa proses evaluasi terus menerus memeriksa pelaksanaan rencana dan dokumentasi dari proses. Objek dikomentari sebagai umpan balik tentang keberadaan dimana, melaksanakan rencana kerja yang ada pada jadwal. Sponsor dan institusi rutin melaksanakan tinjauan dan dokumentasi aktifitas yang cermat dan membuat pertemuan/rapat, laporan pertemuan dan laporan pertanggungjawaban secara berkala.

D. Evaluasi terhadap Produk/Hasil penyelenggaraan diklat Pim III

Product Evaluation (Evaluasi Produk/Hasil). Pada evaluasi produk penilaian hasil program Diklatpim III berupa evaluasi keseluruhan dilihat dari dua aspek yakni :

- a. pertama, aspek kinerja penyelenggara, bahwa pelaksana evaluasi menganut falsafah integritas, kewibawaan dan reputasi lembaga perlu dijaga dan ditegakkan.

Terkait aspek terhadap evaluasi pelaksanaan diklat pim III di Kabupaten Nunukan dan kinerja penyelenggaranya, penulis tidak menemukan hal-hal yang dilaporkan secara tertulis maupun telaah dokumen lainnya yang menukik langsung kepada substansi tersebut. BKDD Kabupaten Nunukan tidak membuat sebuah evaluasi menyeluruh

terhadap pelaksanaan diklat pim III, dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kepala BKDD beliau menjelaskan :

“memang secara tertulis kami tidak mendokumentasikan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan diklat, namun secara lisan, disetiap selesai penyelenggaraan diklat selalu kita duduk bersama membahas hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan. Misalnya pada diklat pim III kemarin, evaluasi yang kami bahas bersama antara peserta, penyelenggara dan penjamin mutu PKP2A III Lan Samarinda terkait masalah sarpras yang dikeluhkan peserta dan PKP2A III Lan sendiri, terutama wifi, tidak adanya ruang khusus ujian, tidak adanya perpustakaan yang dapat menunjang pengetahuan, tidak tersedianya laundry dan fasilitas olahraga yang kurang. Terkait evaluasi lainnya, biasanya kami lakukan secara tertutup dengan pihak PKP2A III Lan, misalnya rekomendasi terhadap widyaiswara yang kurang mampu membuat peserta bergairah, coach yang kurang peduli terhadap peserta bimbingannya, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan selanjutnya.

Mencermati penjelasan tersebut, peneliti melihatnya secara berturut-turut terhadap apa yang dijelaskan melalui wawancara dengan PKP2A III Lan, wawancara dengan Kepala BKDD, Kabid Diklat, mentor, coach dan juga dengan peserta serta telaah dokumen lainnya yang telah dibahas pada poin-poin diatas, dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penyelenggaraan diklat pim III terkait input dan prosesnya sudah berjalan sesuai yang diharapkan, walaupun masih terdapat tambal sulam dalam menyasati pelaksanaannya. Disamping itu masih didapati kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang dilakukan dan belum diperbaiki pada periode berikutnya, sehingga dibutuhkan komitmen untuk segera melakukan pengantisipasi pada pelaksanaan berikutnya.

Kendala-kendala teknis lainnya terkait sarpras, memang menjadi hal yang paling banyak menjadi sorotan pada penyelenggaraan diklat pim di BKDD, hal tersebut diperkuat dengan penjelasan kabid diklat bahwa :

“Keadaan gedung diklat BKDD masih belum memungkinkan untuk menyiapkan sekaligus sarana prasarana. Terkait keluhan dari PKP2A III Lan misalnya ruang ujian khusus, diharapkan tahun depan sudah ada, karena gedung eks Diknas telah masuk dalam anggaran tahun ini akan direhab, dengan dua lantai sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian sarana olahraga (tennis meja) akan kita siapkan disamping ruang makan mess, namun terkait wifi kita ini terkendala geografis. Menurut pihak telkom yang berkali-kali kami panggil untuk perbaikan jaringan, ternyata area BKDD ini termasuk *black spot*, sehingga dalam hal ini kami belum bisa apa-apa. Mudah-mudahan kedepan ini bisa dimaksimalkan penggunaannya dan mendapatkan solusi yang tepat untuk memuaskan semua pihak.

- b. Kedua adalah peserta diklat/reformer dalam hal ini mengevaluasi laboratorium kepemimpinan dalam bentuk proyek perubahan yang dilakukan oleh reformer selama melakukan breakthrough II. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap hasil proyek perubahan yang diimplementasikan oleh reformer secara berkelanjutan yang dilakukan di SKPD masing-masing (Pasca diklat).

Evaluasi terhadap hasil proyek perubahan peserta, dijelaskan dalam perka LAN, proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta dinilai oleh penguji meliputi 2 aspek dengan bobot dengan tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Aspek yang dinilai penguji dalam Proyek Perubahan

No	Aspek	Unsur	Bobot
1.	Sikap Dan Perilaku	Integritas	10
		Etika	10
		Kedisiplinan	10
		Kerjasama	5
		Prakarsa	5
2.	Kualitas Perubahan	Identifikasi Perubahan	10
		Rancangan Perubahan	10
		Pemimpin Perubahan	40
JUMLAH			100

Sumber : Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013

Evaluasi terhadap aspek dan unsur-unsur tersebut diatas, dijadikan sebagai evaluasi akhir untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta diklat pim III yang tentukan melalui suatu tim. Susunan tim evaluasi akhir ini ditetapkan oleh pimpinan instansi penyelenggara diklat dengan jumlah anggota maksimum 9orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Lembaga Diklat selaku ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris Lembaga Diklat selaku sekretaris merangkap anggota;
- c. Pejabat struktural yang terkait penyelenggaraan Diklat selaku anggota;
- d. Seorang Pejabat dari Unit Kepegawaian masing-masing peserta Diklat sebagai Anggota;
- e. Koordinator Widyaiswara.
- f. Coach selaku anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek kualitas perubahan. Nilai aspek sikap dan perilaku serta aspek kualitas perubahan direkapitulasi dengan pembobotan masing-masing sehingga menghasilkan Nilai Akhir. Ketidakhadiran peserta melebihi 6 (enam) sesi atau 18 (delapan belas) jam pembelajaran dinyatakan gugur.

Terkait penjelasan perka LAN diatas, penulis tidak menemukan surat keputusan ataupun surat penunjukan lainnya mengenai susunan tim evaluasi akhir. Hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti, apa alasannya hal ini tidak dilakukan, sementara bagi peneliti ini adalah sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan nilai akhir seseorang yang membutuhkan penilaian banyak pihak dan harus berintegritas. Menelisik pentingnya hal

ini, sehingga penulis menanyakan hal tersebut kepada kepala BKDD Kabupaten Nunukan. Mengenai tim evaluasi akhir, kepala BKDD mengungkapkan bahwa :

“Kami menyadari terlalu nyaman dengan kondisi yang sudah-sudah, sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang kelihatan kecil tapi sesungguhnya dampaknya besar. Tapi secara substansi orang-orang yang menjadi penentu kelulusan itu, unsur-unsurnya sudah sesuai dengan perka lan, hanya saja kami terlupa untuk mengSK-kan, yang tentunya terkait dengan pertanggungjawabannya. Namun kedepan, ini menjadi bahan evaluasi bagi kami agar bisa lebih hati-hati menyikapi aturan yang ada.

Terkait untuk kualifikasi kelulusan peserta Diklat, dalam perka LAN nomor 12 tahun 2013 ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sangat Memuaskan (skor 92,5 – 100);
- b. Memuaskan (skor 85,0 – 92,4);
- c. Cukup memuaskan (skor 77,5 – 84,9);
- d. Kurang memuaskan (skor 70,00 – 77,4).
- e. Peserta Diklat yang memperoleh nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan tidak lulus

Menjawab kualifikasi kelulusan diklat pim III pada tahun 2015 di Kabupaten Nunukan, berdasarkan telaah dokumen yang ada, dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini :

No	Kualifikasi	Jumlah	Ket.
1.	Sangat Memuaskan	7	5 orang terbaik
2.	Memuaskan	30	
3.	Cukup Memuaskan	3	
4.	Kurang Memuaskan	0	
Total		40	

Mencermati tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa rata-rata hasil akhir proyek perubahan diklat pim III tahun 2015 di Kabupaten Nunukan lulus dengan kualifikasi Memuaskan, dan cukup memuaskan hanya terdapat 3 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa lulusan diklat pim III patut diapresiasi. Dan bentuk apresiasi yang dilakukan PKP2A III LAN dengan memberikan sertifikat kelulusan dengan mencantumkan Peringkat terbaik I, II, III, IV dan V sebagaimana terlampir pada lampiran 6. Penulis dapat menegaskan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN bahwa :

“Kriteria penilaian kelulusan peserta diklat pim tingkat III tetap mengacu kepada Perka LAN Nomor 12 tahun 2013. Adapun pemberian Sertifikat kepada lulusan 5 (lima) terbaik tersebut sebagai bentuk penghargaan saja sebagai motivasi bagi para peserta diklat Pim Tingkat III yang ada. Dan hal tersebut memang tidak diatur dalam Perka LAN yang ada.”

Adapun hasil dari proyek perubahan yang dibuat oleh para peserta diklat pim tingkat III di Kabupaten Nunukan yang menjadi penentu kelulusan peserta mendapatkan apresiasi berdasarkan wawancara :

Dr. Mariman Darto (Kepala PKP2A III LAN)

“Proyek Perubahan yang teman-teman peserta diklat pim tingkat III Kabupaten Nunukan buat tidak kalah dengan Kabupaten lainnya, semangat sebagai orang perbatasan dalam mengikuti diklat pim III. “

Dr. Rahmat MA. (Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN) :

“Proyek perubahan yang dibuat teman-teman di Nunukan di luar ekspektasi saya, sekalipun jauh berada diperbatasan namun tidak kalah dengan peserta yang berada di Balikpapan, dan ini membahagiakan kami tentunya. “

Sehingga dari hasil beberapa wawancara tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil akhir bagi evaluasi terhadap kelulusan peserta diklat

pim tingkat III dimana kriteria-kriteria yang menjadi penilaian kelulusan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun ke depannya kepada BKDD Kabupaten Nunukan untuk tetap membuat tim evaluasi akhir yang ditetapkan oleh Bupati Nunukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penegasan akan tanggungjawab Tim evaluasi akhir terhadap kelulusan peserta diklat.

Adapun berkaitan dengan evaluasi pasca diklat dimana sebagaimana yang diamanatkan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 harus dilakukan oleh Penyelenggara Diklat dalam hal ini adalah BKDD Kabupaten Nunukan.

Hasil wawancara dari kepala BKDD Kabupaten Nunukan :

“Evaluasi pasca diklat memang harus dan wajib dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perka LAN, dan evaluasi pasca diklat tersebut sudah pernah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan kesibukan banyaknya kegiatan di kantor dan juga alumni peserta diklat pim yang ada tersebar di beberapa Kecamatan”

Wawancara tersebut dipertegas kembali oleh Kabid Diklat Kabupaten Nunukan:

“Evaluasi pasca diklat pim III sudah pernah dilakukan namun belum maksimal, dan yang dievaluasi baru beberapa SKPD, dengan banyaknya kegiatan diklat di BKDD seperti diklat prajabatan K2 dan diklat pim IV yang saat ini sedang berjalan”

Hasil wawancara dari Kasubid Diklat Pim :

“Kami sudah melaksanakan evaluasi pasca diklat di beberapa SKPD namun belum semuanya sehingga hasilnya belum maksimal karena padatnya kegiatan diklat, namun ada beberapa yang telah mengembalikan sebaran kuesioner yang kami berikan, dan pada dasarnya semua peserta dan mentor menyambut baik program ini, karena menyadari bahwa banyak yang harus dibenahi dalam SKPD mereka, sehingga ASN yang didiklatkan dapat bersemangat membangun konsep pelayanan publik di kantor masing-masing”

Hasil evaluasi kinerja kebijakan sebagai pengembangan, dengan fokus sasaran pada kinerja outcomes, diperoleh informasi bahwa pada umumnya atasan langsung alumni menyatakan bahwa setelah mengikuti Diklatpim Pola pikir dan

Cara Kerja mereka Bagus (Sudjarwo, 2008). Demikian pula dengan hasil penelitian Nurseha 2015 bahwa dampak hasil kerja peserta diklat berdasarkan hasil wawancara dengan atasan langsung peserta secara keseluruhan menyatakan bahwa ada peningkatan kinerja. Ini adalah merupakan gambaran bahwa biasanya diklat pim menghasilkan kinerja ataupun dampak serta hasil yang memperlihatkan peningkatan yang baik. Artinya bahwa penyelenggaraan diklat Pim telah mampu merubah mindset, merubah kearah yang lebih baik terhadap pesertanya sehingga sangat relevan jika dikatakan bahwa diklat Pim pola baru ini lebih mampu menjadikan peserta menciptakan proyek perubahan yang berguna bagi kepentingan organisasi dalam rangka menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga citra ASN dapat meningkat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Untuk melengkapi kriteria tersebut, Peter Drucker mengingatkan kita semua bahwa “Ancaman utama yang dihadapi oleh organisasi di masa depan bukanlah turbulensi (pergolakan/kekacauan), akan tetapi yang paling berbahaya adalah jika organisasi dikelola dengan menggunakan logika masa lalu”. Disinilah perlunya perubahan, termasuk keinginan untuk berubah dengan membuat standar kompetensi yang kompetitif dan up to date.

Sesuai dengan wawancara dan berbagai pendapat serta hasil kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa diklat telah mampu menghasilkan alumni yang memiliki kinerja lebih baik. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Nunukan, bahwa para alumni telah menghasilkan proyek perubahan yang cukup diapresiasi berbagai pihak. Bahkan hasil yang masuk 5 (lima) besar didaulat pula sebagai salah satu nominator tingkat nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa diklat Pim III di Kabupaten Nunukan berkategori baik dan memuaskan.

Evaluasi produk menurut *stufflebeam* adalah merupakan penggabungan penggambaran dan pertimbangan dari hasil dari hubungannya terhadap objek konteks, input dan proses informasi dengan penaksiran yang baik, berarti dan kejujuran. Bagaimana kriteria diukur, pertimbangan hasil dari seluruh *stakeholder* untuk menentukan kelanjutan, mengakhiri untuk menghadirkan catatan bersih dari dampak (negatif/positif) berbanding dengan penaksiran kebutuhan, keobjektifan target dan merupakan kesimpulan terhadap prestasi organisasi.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan

Setiap penyelenggaraan kegiatan di organisasi manapun biasanya selalu ada faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mengoptimalkan sebuah program, termasuk penyelenggaraan Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan.

- a. Berdasarkan beberapa wawancara dengan stakeholder, dikemukakan faktor pendukung penyelenggaraan diklat Pim III diantaranya adalah :
 - 1) Keberadaan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, yang merupakan landasan pelaksanaan dalam menyelenggarakan Diklat Pim III dimana memuat hal-hal yang harus kami jadikan garis frame sehingga tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan
 - 2) Dengan adanya program NAWA CITA Jokowi, membuat kami yang tinggal diperbatasan mendapat apresiasi khusus sehingga walaupun tidak terakreditasi masih diberi peluang untuk menyelenggarakan Diklat Pim III. Sebagaimana ditekankan oleh Kepala PKP2A III LAN bahwa :

“Bagaimana kedepan visi Bupati, Gubernur dan Presiden Jokowi harus diselaraskan agar ke depan cita-cita Nawacita ”Membangun negeri dari pinggiran” benar-benar teraktualisasi khususnya di Nunukan sebagai Kota perbatasan. Karena itu, kami telah mengupayakan agar Nunukan bisa mendapatkan ijin prinsip penyelenggaraan Diklat, sebagai manifestasi cita-cita Jokowi”

- 3) Adanya komitmen, inisiatif dan kesungguhan dari pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menjemput bola sehingga bisa mendapatkan ijin prinsip penyelenggaraan Diklat Pim III.
 - 4) Ketersediaan anggaran yang telah dipersiapkan oleh BKDD dalam anggaran murni APBD.
 - 5) Tersedianya sarana dan prasarana kediklatan yang memadai dan masih berfungsi dengan baik.
- b. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah :
- 1) Kondisi geografis yang terdiri atas daratan dan pulau dan perlu ditempuh dengan transportasi laut dan udara sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengingat diklat pola baru terkait dengan sisten on of kampus bagi peserta dan mentor.
 - 2) Sumber daya manusia yang masih terbatas, terkait baik bukan hanya sebagai penyelenggaran dan pengelola diklat karena belum melaksanakan MOT dan TOC, maupun SDM sebagai widyaswara dan coach.
 - 3) Masih terbatasnya sarana prasarana terutama ruang diskusi, Wifi dan perpustakaan sekaligus sebagai faktor pendukung.

3. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh BKDD Dalam Penyelenggaraan Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan

Terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya adalah :

- a. Dalam menjemput bola sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Nunukan, ditandai dengan upaya melakukan koordinasi dan presentase ke LAN RI untuk mendapatkan ijin prinsip. Hal tersebut dinyatakan oleh kepala BKDD dalam wawancara sebagai berikut :

“BKDD telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ijin prinsip penyelenggaraan diklat Pim III, dengan meminta dukungan dari PKP2A III LAN Samarinda bersama – sama dengan Wakil Bupati Nunukan, Asisten Administrasi Setkab Nunukan dan Tim Anggaran Kabupaten Nunukan serta Inspektorat Kabupaten Nunukan menghadap ke Direktur Diklat Aparatur LAN RI sekaligus mempresentasikan tentang Gambaran Umum tentang Kabupaten Nunukan (letak Geografis Kabupaten yang terdiri dari Pulau – Pulau dan Daratan Kalimantan) yang membutuhkan biaya transportasi yang sangat tinggi. Disamping itu juga dipaparkan fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang diklat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai tanda kesiapan daerah apabila diselenggarakan di Kabupaten Nunukan. Dan kita bersyukur, tahun 2015 Pemerintah kabupaten Nunukan mendapatkan Izin Prinsip untuk menyelenggarakan Diklat Pim Tingkat III dengan Penjamin Mutu PKP2A III LAN dengan sistem Pola Kerjasama.

Untuk lebih meyakinkan penulis tentang hal-hal yang dijelaskan diatas, melalui telaahan dokumen penulis temukan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini BKDD telah mengirimkan Surat permohonan kepada LAN RI yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nunukan Nomor: 893.3/09/BKDD-V/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal Pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III. LAN RI kemudian

menindaklanjuti berdasarkan surat Nomor : 409/D.2/PDP.09 tanggal 17 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang kemudian didukung oleh PKP2A III LAN sebagai penjamin mutu sebagaimana surat Nomor : 323/P III.I.I/PDP.09.2 tanggal 26 Februari 2015 perihal kesediaan memfasilitasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten Nunukan sebagaimana terlampir pada lampiran nomor 8.

- b. BKDD telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana, namun tetap bertahap mengingat kondisi anggaran yang belum memungkinkan.
- c. Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan 10 hektar, khusus pembangunan sarana dan prasarana diklat yang lebih konperhensif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan LAN RI, termasuk didalamnya fasilitas pendukung lainnya seperti outbond dan lain-lain. Hal ini adalah tindak lanjut dari wawancara kepala PKP2A III LAN yang menyatakan :

“Dari sisi makro, BKDD Kabupaten Nunukan harus memutuskan sesegera mungkin memperbaiki tahapan sarana dan prasarana terhadap kritik yang telah diberikan. Harapannya, yang ada sekarang agar menjaga dan semakin giat memperbaiki diri. Sekarang pertanyaannya adalah maukah Bupati Nunukan kedepan membangun kerangka itu. Saya menginginkan Nunukan ke depan jauh lebih dahsyat dalam membangun SDMnya dan saya pribadi bersedia membantu untuk memastikan bahwa kedepan kita akan membangun konsep dan arsitek Diklat yang terdepan di Kaltara. Dan penting juga adalah bangun kolaborasi dengan DPRD dan aset daerah, bangun kerjasama untuk membangun Diklat perbatasan”

- d. Sebagaimana yang disarankan oleh PKP2A III LAN agar mengajukan akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat, maka BKDD pada tahun ini mengajukan anggaran perubahan APBD untuk menindaklanjuti hal tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada bab IV, maka dapat disimpulkan ha-hal sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan diklat pim III di Kabupaten Nunukan secara garis besar telah memenuhi ketentuan perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, namun masih terdapat beberapa yang belum sesuai diantaranya :

- a. Hasil dari pada evaluasi terhadap Konteks berkaitan dengan BKDD Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara diklat pim III di Kabupaten Nunukan dapat melaksanakan melainkan dengan pola kerjasama dengan penjamin mutu yaitu PKP2A III LAN Samarinda, sdan merupakan bentuk diskresi terhadap peraturan yang ada sehingga bukan merupakan bentuk pelanggaran secara substansi.
- b. Evaluasi terhadap Input penyelenggaraan diklat pim III yang berkaitan dengan karakteristik peserta menunjukkan BKDD belum tertib administrasi, tidak dibentuknya Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi, sedangkan berkaitan dengan jumlah peserta perlu kiranya untuk merevisi kembali atas persyaratan jumlah peserta.

Karakteristik Tenaga kediklatan Pemda harus mendorong bagi Pejabat-pejabat struktural yang memiliki kompetensi dan memahami diklat pola baru untuk mengikuti diklat-diklat TOF sehingga bisa mandiri. Adapun Pengelola dan penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah BKDD harus memiliki sertifikat MOT dan TOC. Sedangkan Sarana dan Prasarana penunjang kediklatan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah

Kabupaten untuk memenuhi standar yang ada sebagaimana yang dipersyaratkan.

- c. Evaluasi terhadap proses telah sesuai dan menunjukkan kepuasan bagi peserta diklat. Dukungan mentor telah dapat ditunjukkan keseriusannya dalam mendukung proyek perubahan reformer.
 - d. Evaluasi terhadap Produk/hasil diklat pim III berkaitan dengan aspek kinerja penyelenggara tidak dilakukan secara tertulis sehingga tidak terdokumentasi. Sedangkan untuk evaluasi terhadap peserta dinyatakan LULUS seluruhnya dengan 3 predikat dan menghasilkan proyek perubahan dengan 5 terbaik. BKDD telah melakukan evaluasi pasca diklat namun belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terencana sehingga masih harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Adapun faktor-faktor pendukung Dalam penyelenggaraan diklat pim III di Kabupaten Nunukan adalah : Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, Program NAWA CITA JOKOWI, komitmen/inisiatif dan kesungguhan BKDD, ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat adalah : kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang jauh dari akses mudah dan murah, sumber daya manusi yang terbatas, baik sebagai tenaga Coach maupun widyaswara serta tidak adanya SDM yang memiliki MOT dan TOC. Disamping itu, sarana prasarana yang merupakan faktor pendukung, masih terbatas terutama wifi dan ruang diskusi.
- 3) Usaha-usaha yang dilakukan oleh BKDD antara lain, (a) menjemput bola dengan mengajukan ijin prinsip bersama dengan stake holder agar dapat mengadakan diklat pim III di Kabupaten Nunukan; (b) Mengadakan

perbaikan sarana prasarana walaupun secara bertahap (c) telah menyiapkan lahan 10 Ha untuk membangun pasilitas diklat yang lebih komprehensif dan (d) Telah mengajukan anggaran untuk dalam rangka mendapatkan akreditasi sehingga kedepannya dapat menyelenggarakan diklat pim dengan mandiri.

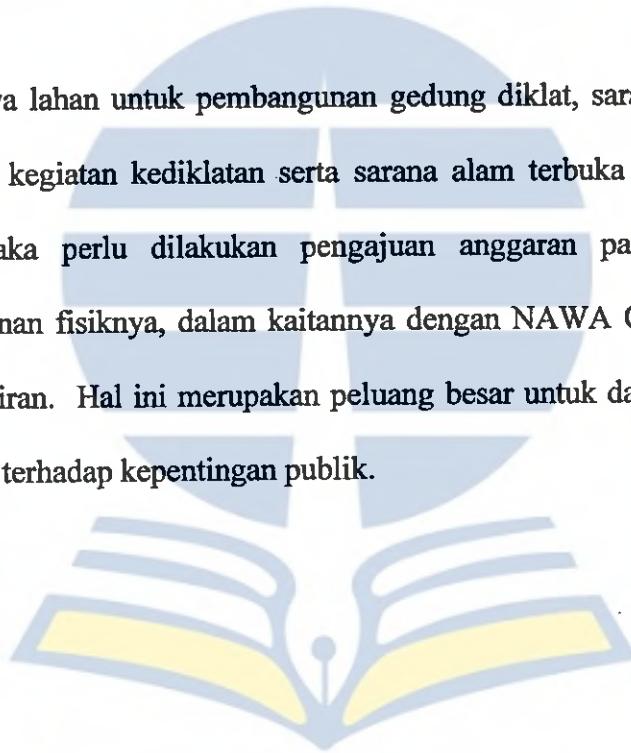
2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Membentuk TSPDI di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyeleksi dan menentukan calon peserta Diklatpim. Disamping itu, perlu pengoptimalan peran institusi penyelenggara Diklatpim dalam menetapkan dan menerima calon peserta Diklatpim. Selanjutnya BKDD Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan diklat pim lebih tertib administrasi dengan cara melengkapi persyaratan yang telah standar dari LAN RI sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan; perlu peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh LAN RI terutama signal wifi yang lebih kuat, sarana olahraga yang lebih lengkap dan ruang seminar yang cukup; peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui diklat MOT dan TOC (sebagai penyelenggara dan pengelola), penyiapan perangkat pendukung SDM lainnya misalnya fasilitator/widyaswara, Coach minimal 4 orang agar lebih efektif efisien. Pengoptimalan terhadap pemanfaatan dan kemanfaatan alumni Diklatpim, memperhatikan alumni Diklatpim terkait dengan pemanfaatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh selama Diklatpim. Dan yang juga perlu

dipikirkan adalah pengembangan karir alumni Diklatpim, terutama bagi mereka yang memperoleh prestasi baik dalam mengikuti Diklatpim.

- 2) Hal-hal yang merupakan faktor pendukung dimaksimalkan seperti halnya Program NAWA CITA dan dijadikan peluang untuk semakin meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Nunukan, agar penyelenggaraan diklat masa mendatang tetap diberikan. Berusaha semaksimalnya memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi badan diklat yang mandiri.
- 3) Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung diklat, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kediklatan serta sarana alam terbuka (*in class* dan *out class*), maka perlu dilakukan pengajuan anggaran pada APBN untuk pembangunan fisiknya, dalam kaitannya dengan NAWA CITA membangun dari pinggiran. Hal ini merupakan peluang besar untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan publik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Afiffuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, 2010. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____ 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arman Hakim., 2003. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Surabaya : Guna Widya
- Burhanudin, Danang Sunyoto. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian, Jilid Pertama, Jakarta: PT Buku seru
- Blaine, Worten B., James R. Sanders, dan Jodi L. Fitzpatrick, 2004. Program *Evaluation Alternatives Approach and Practical Guidelines*. Boston: Pearson Education Inc versi terjemahan.
- Childers, 2000. Thomas Evaluative Research in the Library and Information Field. *Library Trends*, 38(2). Edisi terjemahan.
- Djaali dan Puji Mulyono, 2000. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PPs UNJ.
- Dwiyanto, Agus. 2013. Reförmasi Birokrasi Publik di Indonesia. PSKK UGM. Yogyakarta.
- Gronlund, Noman E. dan Robert L. Linn, 2000. *Measurement and Evaluation in Teaching*. New York: McMilan Publishing Co.
- Hasibuan S.P. Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Kamil, Mustofa. 2010. Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Lababa, 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta, Bumi Aksara

Mondy. R., Wayne dan Robert M. Noe 1990. *Human Resource Management*
Pustaka Setia

Mustopadidjaja, A.R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Salusu, J. , 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik : untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Refika Aditama, Bandung.

Solichin Wahab. 1991. *Analisa Kebijakan : Dari Evaluasi ke Implementation*, Jakarta. PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suparman, 2010. *Peran Guru dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan Sejarah-AGSI*

Stufflebeam, Daniel L. 2003. "*The CIPP Model or Evaluation,*" makalah disampaikan pada *Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN)*

Tayibnapis, Farida Yusuf. , 2008. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta

Toha Miftah. 2000. *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Makalah, Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Umar Tirtarahardja dan La Sula, 2000. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka. Cipta

Uzer usmar. 2003. *Menjadi Guru Profisional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Dokumen :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pim Tingkat III.

Renstra BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2016

PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

A. EVALUASI KONTEKS

- 1) Bagaimana perencanaan awal ketika kabupaten nunukan berkeinginan Melaksanakan penyelenggaraan diklat pim III ?
- 2) Apakah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada ?
- 3) Jika tidak, bagaimana mendapatkan ijin tersebut ?
- 4) Langkah-langkah apa yang diupayakan oleh pemda nunukan dalam mengantisipasi hal tersebut ?
- 5) Apa yang mendasari upaya tersebut dilakukan ?
- 6) Apakah hasilnya efektif dan Efisien ?

B. EVALUASI INPUT

- 1) Bagaimana karakteristik peserta ? Apakah sesuai dengan aturan yang ada ? Jika tidak apa yang mendasari keputusan tersebut tetap dilaksanakan ?
- 2) Apakah terstruktur dalam pengambilan keputusannya ?
- 3) Bagaimana karakteristik widyaswara ?
- 4) Apakah jumlah WI rasionya seimbang dgn kebutuhan diklat ?
- 5) Apakah kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki WI sesuai dengan Mata Diklat yang ada ? Jika tidak, kenapa dan apa kendalanya, serta apa yang mendasari Keputusan tetap dilaksanakan ?
- 6) Apakah ketersediaan kurikulum dan perangkat pembelajaran telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ada ?
- 7) Bagaimana ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan diklat pim ?
- 8) Apakah terdapat kendala dilapangan terhadap aspek input diatas ?
- 9) Langkah-langkah apa untuk mengatasinya kendala tersebut ?

C. EVALUASI PROSES

- 1) Bagaimana jadwal pembelajaran Diklat Pim III, proses belajar mengajarnya, ketersediaan alat dan media pembelajarannya, apakah sesuai atau tidak ?

- 2) Bagaimana kesediaan dan kesiapan coach dalam mendampingi peserta dalam menghasilkan proyek perubahan ?
- 3) Bagaimana pula antusiasme mentor mensupport peserta dalaam menghasilkan proyek perubahan ?
- 4) Bagaimana tanggapan peserta terhadap seluruh aspek penyelenggaraan diklat, baik terhadap WI, Penyelenggara, sarana Prasarana, Coach dan mentornya ?
- 5) Apakah perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah sesuai dengan penyelenggaraan yang telah dilaksanakan ?
- 6) Adakah kendala yang dihadapi ?
- 7) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

D. EVALUASI HASIL

- 1) Bagaimana hasil proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta, apakah sesuai dengan tupoksi yang dimiliki?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi peserta dalam mengeksekusi proyek perubahan di SKPD nya masing-masing ?
- 3) Upaya apa yang dilakukan oleh peserta dan bagaimana koordinasinya dengan stakeholder ?
- 4) Bagaimana tingkat kelulusan peserta ?
- 5) Adakah perangkanian terhadap hasil proyek perubahan ?
- 6) Apa tujuannya ?
- 7) Apakah ada evaluasi pasca diklat yang dilakukan oleh penyelenggara ?
- 8) Bagaimana hasilnya ?
- 9) Apakah ada kendala dalam hasil proyek perubahan berkelanjutan ?
- 10) Bagaimana mengatasinya ?
- 11) Bagaimana hasil akhir dari proyek perubahan berkelanjutan yang dihasilkan oleh peserta ?
- 12) Apakah proyek perubahan yang dibuat memberikan peningkatan kinerja bagi organisasinya dan Pemerintah Kabupaten Nunukan?

HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	Dr. MARIMAN DARTO
2	Instansi	KEPALA PKP2A III LAN

1. Berkaitan dengan Fenomena didasarnya diklat pola baru yang kita merubah dari pola lama ke pola baru

Yang pertama, kita ini kan tidak pernah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan diklat mulai dari tahun 57 hingga sekarang ini. Dan ketika kita evaluasi kita bandingkan dengan data maka terlihat gamblang. Kenapa sih korupsi ternyata juga masih tinggi

Kemudian yang kedua, apa sih kontribusi peserta diklat yang telah kita lakukan dengan kondisi perubahan yang ada dilingkungan mereka itu juga nggak ada

Yang ketiga, diinternal penyelenggaraan diklat sendiri muncul banyak persoalan, misalkan diklat menjadi tempat mencari untung freeleader. Nah, apakah diklat seperti paper pecae ini bisa merubah. Itu kan tidak merubah, bisa saja dicopy paste. Nah, itukan tidak akan pernah menyentuh, apakah komponen mainseat eserta diklat. Kita bandingkan sekarang, salah satu yang di didik dari konsep dari peserta diklat inikan sebenarnya diintegritas, wasbang, dan yang kedua itu kan anti korupsi dn yang lebih penting dari itu kan bagaimana mengedepankan etika dalam melaksanakan tugas. Pada jenjang disetiap level di eselon II jelas kemampuan operasional lesson park, manajerial dilevel eselon III kemudian yang kedua adalah bagaimana kompetensi kepemimpinan strategik itu dilakukan. Keterkaitan bagaimana dia membangun konsep keterkaitan antara proyek perubahannya dengan visi misi seorang bupati dan visi misi seorang gubernur dan bagaimana keterkaitan program itu dengan nawacita dsb. Nah, inikan tidak pernah difikirkan, itu kira kira alasan. Sehingga ini kan perlu dirubah, nah perubahannya tidak hanya kurikulum, pada metode pembelajarannya pada output diklat dan sebagainya, bahkan komponen sikap dan perilaku itu tetap penting

2. Apa Alasan PKP2A LAN sehingga mau menjadi penjamin mutu dalam pelaksanaan diklat ?

Iya, Saya menempatkan dari sisi makro yah bu, Kalimantan itu harus berubah. salah sat kelemahan kalimantan ini adalah pada SDM, nah karena dari sisi SDMnya terutama di Aparaturnya, karena itu, dari sisi itu saya harus bisa memastikan ini harus dilakukan. Persoalannya adalah Infrastruktur. Tidak ada satupun bandiklat kecuali bandiklat

kalimantan timur yang dalam posisi yang sangat baik, kemudian sekarang baru kalsel. Tapi yang lainnya tidak cukup memadai. Apa kemudian kita biarkan kondisi seperti itu akan berlarut dan saya tetap akan tidak menempatkan diklat dikawan kawan, kecuali saya akan mengajukan diri untuk melakukan penjaminan mutu terhadap mereka, bahwa PKP2A III LAN harus melakukan itu. Ini unsur pembinaan bu, pembinaan itu bukan dengan marah marah tapi pembinaan itu adalah cobalah, jangan jangan dengan infrastruktur apa adanya, dengan kemampuan apa adanya kan melahirkan seperti nunukan, hasil inovasinya bisa dipakai bisa digunakan. Itu kan lebih penting dari pada sekedar tadi. Karena itu yang menjadi bahan perdebatan kita selalu adalah Lantas bagaimana konsep diakreditasi. Saya setuju, yang diakreditasi adalah kita, biarkan mereka dalam proses itu. makanya saya bilang kalo ada arahan dari kita untuk segera menyiapkan infrastruktur agar kita diakreditasi, yah itu sj kita lakukan

3. Kira kira upaya apasaja yang harus kami lakukan atas nama pemerintah atau BKDD Kabupaten Nunukan ?

Nah, ini urusan yang paling penting yang harus dilakukan kawan kawan |

Pertama, kita sudah paham dengan perka LAN nomor 5 tahun 2015 tentang akreditasi. Kita menjadi tahu lemahnya kita dimana. Kalau kita sudah bisa membandingkan antara kebijakan sebagai sebuah standar dan faktanya seperti ada gap yang cukup jauh antara standar dengan kenyataan dilapangan maka yang harus kita perbaiki disinternal apasaja sih, baru kemudian kita mapping bersama kawan kawan yang ada didaerah, setelah kita tahu mapping persoalan yang kita hadapi dengan cara membandingkan tadi, maka fase itu kita menyampaikan kepada pimpinan yah, kalo pada level ini, yah nanti kepada pak kaban, yah harus dipastikan bahwa harus ada eksemplain. Apasih terobosan yang bisa dilakukan, istilahnya yang menjadi prioritas diinternal yang harus dilakukan. dan ini buka tanpa sebab, sebaiknya ada data. Mimpi pak jokowi itu tidak akan bisa nyambung dengan kita kalo tidak dimulai dengan cara kita membangun sdm itu. ini terkait mbak, terkait dengan pak jokowi ingin membangun dari kalimantan. Inikan infrastrukturnya, bukan hanya itu tapi menyiapkan sdmnya, karena itu tadi, kemungkinan strategik pada level eselon II itu adalah sejauhmana kita mengkaitkan antara visi pak bupati nunukan dan visi gubernur kaltara dan visi pak jokowi dimana letak kaitan itu. Kalo itu bisa mengkonsep keterkaitan itu ketahuan jelas, ini loh yang kita siapkan, jangan ragu ragu untuk mengembangkan diklat jauh jauh hari. Dari sisi internal itu bu

Yang kedua, dari sisi makro sekarang, ini hal yang harus segera diambil memutuskan sesegera mungkin tahapan pengembangan sarana dan prasarana ditempat kita bu. Berkali kali kritik yang muncul setiap kedatangan pa deputy mungkin pa deputy sungkan ngobrol dengan kawan kawan. MOhon maaf saya ini apaadanya mbak, kalo saya senang dengan keterus terangan bu, jadi saya menyampaikan apaadanya bu tri. Tri ini lebih penting dari pada dibelakang hari, misalkan lah mbak reni, say paham kenapa mbak reni seperti itu, karena dia kan menjaga kebijakan akreditasi itu. Pa deputy kan, itulah pa deputy orangnya baik makanya harapan kita setelah ini adalah mau nggak seorang bupati menaikkan master

plan ataw roadmap pengembangan bandiklat dikabupaten nunukan, terus terang mbak, ini penting. Kalo nanti ada dijamin keterkaitan, saya yakin saya akan bawa itu ke bappenas, saya sudah menyampaikan berkali kali, tapi apa yang harus saya bawa. Kan tidak bisa sekedar profosal tentang tanah tadi, nggak bisa bu tapi harus dalam kerangka kebijakan yang jauh lebih besar. Saya menginginkan nunukan itu jauh lebih dahsyatlah. Bangun nunukan itu, Saya akan membantu mbak erlina sebagai kepala bandiklat disana untuk memastikan apasih konsep membangun gedung. Saya tahu mbak kenapa saya mengajukan konsep yang berbeda dengan wagub itu. Pertimbangannya adalah yah karena saya tahu apa yang saya lakukan diinternal, viewnya seperti apa, konsepnya seperti apa, saya sudah belajar dengan kawan kawan arsitektur dsb, itu penting dan kaloperlu kolaborasi jga dengan dpr, orang orang aset yah tolong lah nanti dikasih kesempatan kewenanganlah siapa nanti yang bicara dsbnya kan kawan kawan, selama ini kan kita berikan. Saya bilang pa rahmat, untuk hal hal yang sifatnya ceramah itu bapak harus lebih tahu, kasi kesempatan orang orang seperti itu, sama dengan saya, kasih kesempatan kawan kawan insan pers dan semuanya lancar. Itu pendekatan penting

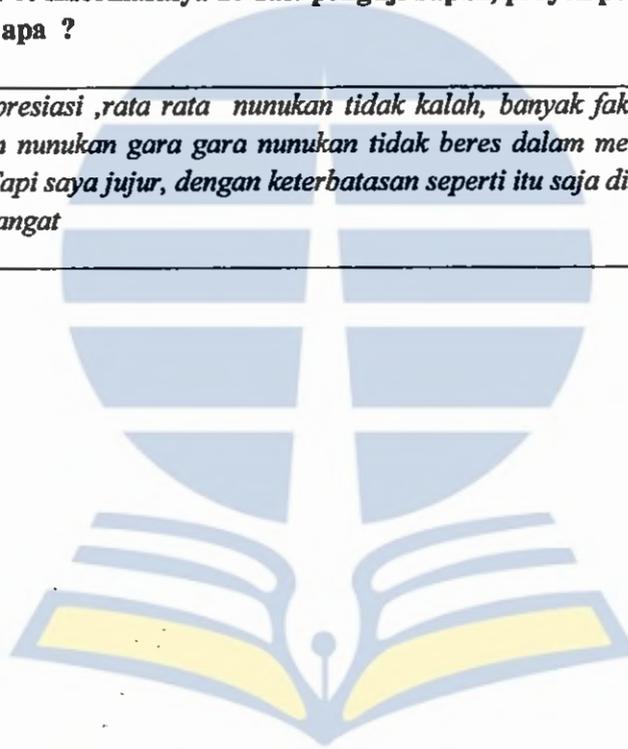
4. **Kalo di perka LAN tidak diatur masalah BUP (batas usia pensiun), kenapa LAN tidak buat sebuah penegasan ?**

Ini saya sudah kesekian kalinya bicara tentang hal ini dihadapan kawan kawan sendiri, kalo saya kebutuhan perubahan itu dari siapa saja, kan yang tahu dari daerah, nah cara pandang seperti itukan berbahaya, jangan jangan mereka malah tidak mau. Saya senang apresiasi terhadap pegawai itu mbak erlina, itu penting karena itu bentuk aktualisasi kemanusiaan yang diberikan kepada mereka tetapi kadang kadang mereka tidak mau. Satu sisikan tadi, nah kita berada garis tengah. Rata rata di usia BUP 2 tahun menjelang pensiun, dia teriak sudah g mau karena persepsi tentang diklat itu adalah persfektif yang memberatkan. Itukan image, nah karena itu, eh ini tentu perimbangan anggaran yah mbak, nah kalo kita lihat dari sisi konsep, lifetime atau usia produktif seseorang itu dalam diklat, 50 itu kan sudah batas akhir yah. Karena ketika seseorang untuk mendaftar WI pun, usia minimal kenapa sih 50 untuk WI, peneliti 40 dsbnya. Itu Artinya bahwa memang diusia usia seperti itu usia yang sudah tidak statis lagi untuk kepentingan organisasi jangka panjang. Tetapi tadi saya pengennya pada level 5 jadi 55 itu boleh lah, nah kan masih ada usia 3 tahun. Nah itu yang minimal, pertimbangan saya adalah tadi paruh yah nilai tengah antara 50 sebagai batas minimal perhitungan seseorang dengan batas maksimal non 60 itu tadi. Kalo tadi pertanyaan mungkin kah itu dijadikan sebagai kerangka kebijakan,,oh, sangat mungkin, nah sekali lagi LAN kan tidak bisa sendiri memutuskan itu. Masukan dari daerah seperti apa. Tidak semata mata memang jadi pertimbangan memberikan apresiasi atas pekerjaan mereka. Apresiasikan tidak perlu dengan cara seperti itu, meningkatkan mereka dalam tingkat teknis, bayangkan mbak kalo orang tinggal 2 tahun sementara kompetensi kepemimpinan strategiknya yang diukur, kebijakan tentang visi seorang bupati, dia bicara tentang visi seorang gubernur, dia bicara tentang visi seorang presiden dan lifetime diay tinggal sesaat lagi tapi kalo pilihannya pada diklat utf untuk mempersiapkan diri pas power syndromenya itu biar tidak terjadi gejolak diklat pra pensiun itu yang lebih penting

dari pada itu tapi makanya syarat minimal 55 itu, makanya itu syarat seharusnya paling.....disini, yah saya kembalikan, mohon maaf bisa nggak. Balik papan sering, pasir sering. Kemarin misalkan ini yang diluar kontrol saya, saya sudah bilang, sampaikan kepada jakarta, bahwa ini loh kriteria yang saya mintakan itu, kemudian yang usianya 56 itu cukup untuk menjadi anak bawang saja. Rupanya kemarin masuk dalam waitinglist daftar tunggu. Rupanya Bontang, berau itu mengundurkan diri karena tidak punya anggaran. Anggarannya dipotong itu, akhirnya yah sudah, masuk lagi mereka.lho saya kan sudah nggak mau pa, nah coba seperti itu.dia sendiri ngomong sama saya. nggak mau

5. **Bapak kan kemarin kebetulan termasuk salah satu penguji PIM III, menurut bapak dari yang bapak uji, proyek perubahan dari peserta PIM kami seperti apa selama ini, mungkin dari 40 informasinya 10 dari penguji bapak, proyek perubahan yang mereka susun seperti apa ?**

Saya mengapresiasi ,rata rata nunukan tidak kalah, banyak faktor. Saya jujur, saya ini benci dengan nunukan gara gara nunukan tidak beres dalam mengelola permintaan kita, saya sedih. Tapi saya jujur, dengan keterbatasan seperti itu saja dia serius. Ada faktor yang menjadi semangat



HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	DR. Rahmat, MA
2	Instansi	Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di Samarinda

1. Berkaitan dengan proyek perubahan itu, saya kemarin dengar pak katanya ada surat edaran dari kepala LAN pak yah, bahwa proyek perubahan saya tertarik yang dituangkan kedalam SKP?

Iya, jadi gini, didalam surat edaran yang terbaru dari Kepala LAN itu mbak, yang namanya eh, apa namanya,,misalnya diklat PIM tingkat IV, mereka kan membuat semacam ide perubahan. Nah, yang menjadi ide mereka itu, judul itu. Harus dimasukkan kedalam skp 2017. Termasuk yang kemaren PIM III. Nah PIM III itu harusnya di 2016 ini masuk. Misalnya dia itu apa itu jadi skp.asaran kinerja pegawai tapi mentor sebenarnya harus memastikan betul. Misalnya dia kayak mentor eselon II, pastikan bahwa proyek perubahan itu jadi skpnya yang bersangkutan di tahun berikutnya, supaya apa, supaya untuk memastikan proyek perubahan tidak berhenti mbak. Dia akan terus berlanjut di tahun berikutnya.

Bagusnya begini mbak, menurut saya.nanti mbak buat surat, berdasarkan surat edaran dari Kepala LAN itu, dari Pak Sekda kepada seluruh Kepala SKPD bahwa proyek perubahan PIM III dan IV yang sudah dilakukan oleh pegawai pegawai di Lingkungan SKPD saudara, mohon atau wajib dimasukkan dalam SKP tahun berjalan/tahun berikutnya. Supaya ini jadi perhatian.

Ada beberapa itu mbak, disana itu yah, untuk kepentingan kualitas diklat PIM pola baru :

1. Pada saat seminar RPP memungkinkan yang tidak layak itu mengulang, misalnya seminar RPP itu mbak, selesai langsung pulang kan, nah, peserta yang tidak layak, tidak boleh pulang. Harus memperbaiki RPP sampai dikatakan layak oleh penguji dan mentor

2. Bahan Tayang seminar Laboran Umum diharapkan berbasis video jangan lagi pakai foto-foto karena disinyalir cuma sekedar foto doang, kalo video kan betul betul dilaksanakan termasuk yang itu, bahwa proyek perubahan yang dilakukan

oleh peserta PIM harus dijadikan SKP ditahun berikutnya. Jadi sebagai komitmen bahwa proyek perubahan ini akan ditindak lanjuti dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kepala LAN itu menyarankan pihak penyelenggara itu membuat data base, nanti mgk gini, di kita ini kan sudah disusun dan dirancang walaupun sederhana data basenya. dan seluruh yang dinumukan itu sudah dimasukkan dalam data base kita. Nanti mbak lina kan bisa mengcopi saja yang punya kita. Kalo arahan nanti untuk akreditasi 2017 bisa mengcopi saja ditanamkan di sistem informasi disana dibidang diklat. Nanti dengan data base itu sangat menolong mbak :

1 Semua data kan di infut dari awal mbak, dari mulai nama, nip, alamat email, nama judul proyek perubahannya apa. Kan tinggal di panggil.

- 2. Nah, kemudian untuk yang terakhir pak, kalo bapak melihat kemaren penyelenggaraan walaupun dengan keterbatasan dianggap berhasil atau gimana pak?**

Saya kira berhasil mbak,

1. Yang saya lihat proyek perubahannya cukup membanggakan lah mbak. Bahkan siapa itu...bahwa ada nuansa baru, jadi peserta ini lebih semangat untuk melakukan perubahan ditengah keterbatasan.. Yang kita tahu berbagai hal karena baik internet susah, sdm terbatas tapi toh teman teman bisa melakukan sesuatu yang baik. Proyek perubahannya luar biasa, makanya saya sarankan,,,,mas joned sudah,

Saya kira di dorong mbak, tapi saya kira kalo sudah didorong dan tidak mau yah,,,,,sayang gtu loh padahal itu bagian dari apresiasi kan, bahkan kalo ikut si novi, kayak joned kan juara I yah. Juara I Kan luar biasa, itu prestasi nunukan gitu loh, kebanggaan lah bahwa inisial awal dari PIM tp kemudian menjadi Inovasi yang terus dilakukan

- 3. Bapak selaku kabid diklat berkaitan dengan kurikulum, jadwal dengan karakteristik WI yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengajar di PIM III, yang pertama mungkin berkaitan dengan kurikulum yang sudah disusun kita pada saat itu dengan jadwal itu sudah sesuai dengan perka lan kan pa', kemudian dengan pemilihan WInya gimana pa**

Kalo pemilihan WI pertama kriterianya tentu didasarkan kepada kompetensi WI, nah kompetensi WI itu kan ditunjukkan pertama dengan keikutsertaan WI dalam TOF, TOF diklat PIM III dan IV, nah kemarin kan sesuai dengan TOF misalnya si A mengampu materi apa, nah setelah itu artinya tidak saklok lah. artinya ada beberapa pejabat struktural yang tetap ditugaskan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. jadi pada intinya pertimbangan utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh WI

4. Kalo untuk pejabat struktural kan Fasilitator y pa?

Fasilitator itu Berarti Fasilitator itu yang dianggap mampulah

Memang dalam diklat PIM pola baru lebih menekankan dalam penggalian pengalaman, dalam kurikulum kan dinyatakan bahwa didalam pola baru berbasis pada eksperensial learning pembelajaran. makanya ada istilah on off.....sehingga penekanan WI adalah fasilitasi. Menggali pengalaman yang dikaitan dengan teriteori atau pendekatan pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan

5. Terus berkaitan dengan penunjukan coach pa, kan kalo penunjukan coach domainnya adalah PKP2A III LAN, apa saja yang menjadi kriteria atau yang menjadi pertimbangan selama ini untuk penunjukan coach pada saat PIM III kemarin?

Yah, terus terang kan ini kesulitan utama, nunukan ini kan, karena apa yh.keterbatasan SDM untuk coach gitu yah, yang memiliki pengalaman atau memahami kurikulum diklat pola baru, sehingga kemarin ada beberapa pertimbangan sebetulnya, eh ada pergantianlah

Yang awalnya kita plot tapi yang bersangkutan karena jauh geografisnya misalnya dari samarinda maka yang bersangkutan tidak bisa menadi coach. Akhirnya kemarin hasil diskusi kriteria yang di pakai, satu, memang pengetahuan yang bersangkutan tentang Diklat PIM pola baru, yang kedua dari sisi pengalaman, sebagai coach maka dia harus memiliki pengalaman dalam konteks kepemimpinan sebagai eselon III dan yang ketiga adalah pengetahuan yang bersangkutan tentang coaching itu sendiri. Mungkin mbak Lina juga tau bahwa pemahaman tentang coaching itu berbeda beda. Tapi intinya sebetulnya kalo menurut saya fokus utama adalah bagaimana coach itu membantu peserta untuk menghasilkan inovasi proyek perubahan sesuai dengan visi yang dimiliki

6. Kalau penunjukan penguji pa?

Penguji tentu kami konsultasikan dengan pihak pimpinan. Oleh karena itu penguji kami konsultasikan dengan....

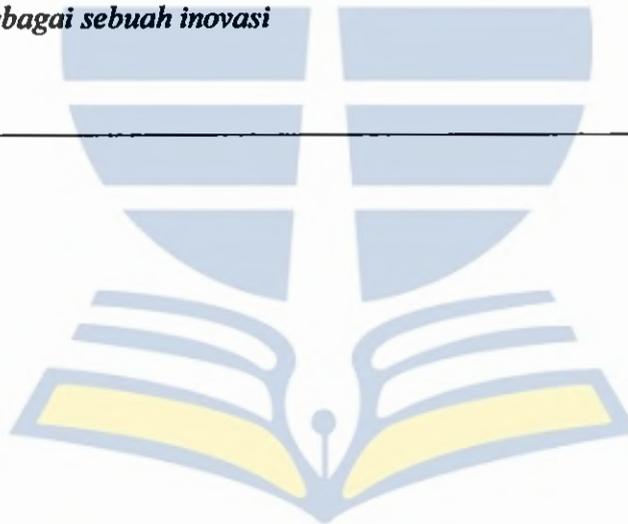
Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana PIM pola baru itu bisa proyek perubahan dan inovasi harus dilakukan. Nah, ini jadi kriteria utama kan karena dia jadi penguji. Penguji dia kan yang menentukan apakah perubahan ini layak, tidak layak, oke tidak oke, berhasil tidak berhasil. Itu kan krusial. Kalo diuji oleh yang tidak berpengalaman maka itu akan sulit. Oleh karena itu, terus terang pendekatan pertama kami konsul ke Jakarta tentang diklat PIM ini, kedua ada orang tertentu yang di plot, misalnya dari perguruan tinggi oleh pak apus atau pa mariman harus di berikan informasi dulu, lebih awal kita rapat dulu, briefing dulu untuk memberikan informasi apa itu hakikat inovasi proyek perubahan yang dilakukan, begitu. Jadi intinya supaya pemahaman sebagai penguji itu betul betul minimal ada pemahaman yang relatif sama antar penguji

7. Berarti kita kayak kemarin pa, ada beberapa akademisi, berarti pertimbangannya yang pasti tahu dengan pola baru dan hakikat inovasi sebuah perubahan intinya, kemudian pa, kalo didalam ini terkait dengan bapak kan salah satu jadi coach juga, mungkin kendalanya pa, karena mungkin pihak kita kami pahami sih dengan letak geografis kami dan mungkin jg kesibukan bapak dan jg teman teman peserta biasanya juga kendala kendalanya berkaitan dengan pembimbingan pada saat coachingnya itu pa ?

Terus terang gitu yh, kendala kalo di daerah kemarin PIM III di nunukan itu yah adalah media komunikasi bagi sebagian yah. Kalo yang saya alami sebagai coach sebetulnya dari sisi pemahaman coaching saya baik baik saja. Bahkan beberapa yang saya bimbing itu inovasinya diluar ekspektasi artinya ada yang sangat bagus, yang mendekati sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan pelayanan publik di nunukan. Tetapi coaching ini karena letak geografis yang jauh dengan saya lebih banyak pake teknologi informasi via email, WA, sms, telpon dan sebagainya. Nah bagi setiap peserta yang ada di pelosok itu kesulitan karena kadang kadang signal hp tidak ada, lain ini sebetulnya. Tapi kan ini hanya beberapa saja sebetulnya, mungkin dari 10 orang yah 3 lah, yang lainnya sih lancar lancar saja. Dan saya lihat semangat teman teman sebagai coach itu sudah sangat baik dan mereka memahami betul keterbatasan di daerah perbatasan sehingga memacu semangat mereka untuk melakukan proyek perubahan di instansinya.

8. Kemudian pa, boleh diceritakan sedikit peran bapak agar mereka bisa, potensi potensi cara berfikir.upaya upaya yang bapak lakukan?

Coach itu lebih banyak memotivasi. Saya sebagai coach waktu itu, pertemuan awalnya waktu itu kita menyepakati adanya perubahan. Membantu mereka menemukan adanya perubahan yang nanti disepakati dengan mentor. Pada saat itu ada banyak, apa yh....istilahnya mereka merasa bahwa proyek perubahan itu sulit dan sebagainya.banyak yang merasa ini hanya seperti PIM pola lama. Sehingga peran coach pada saat pertemuan awalnya, mereka itu menyemangati, bahwa proyek perubahan itu seperti ini.tidak harus yang besar. intinya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peran sebagai pejabat eselon III malahirkan layanan yang terbaik. Nah, dipertemuan awal itu yang saya tekankan, jadi mereka saya kasih semangat, coba area perubahan bapak apa, ada yang menyatakan saya hanya ini dan ini tapi kemudian kita coba gali dibantu karena kita diskusi satu kelompok dibantu yang lain, sampai betul betul ketemualah area perubahan yang bisa dikatanak sebagai sebuah inovasi



HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	Drh. Wiprartono Soebagio, M.Si
2	Instansi	Kepala BANDIKLAT Kota Tarakan (Coach)

1. Waktu bapak ditunjuk sebagai coach, kira kira apa yang bapak lakukan dalam mendampingi peserta Itu, apasaja yang bapak lakukan

Iya, jadi yang kami lakukan sesuai dengan perka LAN, itu memang coach inikan memang harus aktif untuk membimbing peserta diklat PIM III nunukan yang lalu. Teman teman karena jarak jauh, nunukan dan tarakan kemarin juga alhamdulillah bisa intens melalui teknologi, ada yang lewat WA, email yang terbanyak, WA kemudian sms. Nah, kemudian waktu bencmaking ke bantaeng sempat juga 1 jam kami diskusi secara teknis di bandara waktu itu. Jadi full teman teman yang sepuluh orang itu sempat sambil menunggu pesawat, kita satu satu. Jadi prinsipnya waktu bimbingan diklat PIM III alhamduillah dari 10 peserta itu aktif melakukan interaksi komunikatif dengan saya dan ditengah tengah kesibukan saya juga senang itu bisa memberikan sharing pengalaman sesuai kapasitas coach

2. Kira kira ada kendala kah pak sewaktu melaksanakan bimbingan ?

Alhamdulillah kendala tidak ada, hanya yang di sembakung yah, kalo g salah pa sekcem. Hanya karena signal dan sebagainya sembakung. Yang lain lain itu, kemudian apa, yang dinunukan itu yah lancar semua. Tapi setelah itu sudah kita tuntaskan

3. Terus berkaitan dengan proyek perubahannya sendiri pa, dari 10 peserta yang bapak bimbing selaku coach bagaimana apresiasi bapak, dalam arti apakah bisa dinyatakan bahwa proyek perubahannya mereka itu berhasil dan bagaimana juga teman teman selaku peserta memang bapak katakan bahwa mereka itu memang merupakan peserta yang layak?

Terkait dengan kualitas atau apa yah, didalam menyusun proyek perubahan ini kan diharapkan ada suatu pembaharuan inovasi. Dan kami dari 10 itu menurut kami

bagus, ada 6 orang, kemudian yang 4 orang yah cukup sesuai dengan diatas standar lah , artinya yang 6 orang itu bagus kemudian yang 4 orang diatas standar dan kami melihat dari 10 itu memang suatu yang memang original yah. Artinya memang betul inovasi dan kami juga belum pernah mendengar, melihat bahwa kegiatan itu di tempat lain, ditarakan, di kaltara ini. Mudah mudahan nanti mainstone tahapan itu bisa maksimal, jangka panjang dan jangka menengah. Ini kan sudah 6 bulan yah, jadi mudah mudahan jangka menengah dan jangka panjang itu sudah betul" bisa dijalankan

4. **Tapi pa, pada umumnya kalo boleh minta pandangan dan tanggapan berkaitan dengan 10 peserta yang bapak bimbing mereka sangat mampu ?**

Oh, sangat" mampu, artinya begini, saya kan disini bu terus KTT, bagus itu. Saya kan malah memberikan spirit di tarakan. Ini nunukan bagus, KTT bagus juga, ini kan diklat PIM IV sekarang lagi off . Jadi kami menitipkan pesan: untuk bimbingan kami kemarin :

1. Memang, nanti bulan oktober, ulang tahunnya nunukan kapan, ini kan sudah jalan bu, jadi kalo bisa ada stand khusus untuk alumni. Saya melihat itu sayang kalo masyarakat tidak tahu dan nanti kalo ada pameran khusus alumni, ada semacam tenda, banner atau apa, itu supaya tahu kalo ini lah hasil karya

2. Yang kedua kami pesan ini, saya merasa masih ada itikaf , tanggung jawab, ikatan emosional lah, yang kedua diharapkan ada dukungan dari setiap stakeholder skpd. Ini bu nanti yang menjadi motivator skpd supaya bisa berkelanjutan. Baik nanti anggaran perubahan, anggaran murni kemudian nanti itu bisa disampaikan ke kabidnya atau skpd yang bersangkutan, dan yang tatkala pentingnya memang dengan masalah bappeda bu. Jadi memang apapun bappeda termasuk stakeholder tadi bappeda harus mendukung klo memang itu harus berkelanjutan anggaran itu untuk mendukung proyek perubahan. Karena kan salah satu kriteria proyek perubahan inovatinsi berkelanjutan bu. Didukung stakeholder juga.

Proyek perubahan itu tidak lepas dari mentor atasan, makanya kami ini setiap ada diklat PIM itu secara intens kita panggil. Itu kita berikan setengah hari, artinya ada masukan masukan, karena memang kan mentornya juga tidak pernah mengalami, baru dia kan KKP(Kertas Kerja Perorangan)

3. Terus berkaitan dengan dari 10 yang bimbinga bapak, proyek perubahan yang mereka susun seperti apa ?

Yah, luar biasa karena saya belum pernah melihat di diklat pola baru ini kan masih umum sih modelnya. Dalam arti gini, itu bisa digabung tingkat urutan kegiatannya bisa di modifikasi dari LAN begini dari BKD begini jadi kita ketemu rumus kemarin tuh formulanya, kemudian dicover sampulnya juga bebas, misalnya mengenai persampahan, yah gambar gambar sampah muncul disitu. Bahan bahan bekas muncul di covernya itu dulu kan modelnya harus terbentuk. Seperti mbak rina yang juara 1 itu, mbak rina itu covernya itu IT e-kepegawaian yah. Si ade itu berhasil ke tingkat kabupaten, gambarnya juga berIT semua disitu

4. Jadi pada dasarnya hampir semua kurang lebih istilahnya apresiasi dari bapak , penilaian bapak pada dasarnya cukup bagus ?

Ada 2 orang yang dikirim ke senopadik banjarmasin kemarin. Saya fikir coachnya ikut dikirim

5. Kemudian anu pa, menurut bapak dari 10 peserta yang dibimbing , apakah dari 10 peserta yang dibimbing apakah mampu atau menurut bpk seperti apa ?

Yah, saya kira hampir semuanya mampu. Disamping mbak rina, mas dedi, ada lagi yang kemarin itu, yang POM bensin itu. Dia membuat aturan di POM bensin yang sebelumnya belum ada rambu rambu dibuat macam macam, pa elirat yang pertambangan itu. Tapi rata rata menurut saya diatas rata rata semua. Cuma kan saya belum bisa anu, seperti ditarakan senopadiknya dinunukan sejauh mana jangka panjang dan menengah

Tambahan untuk benchmakingnya, mang sebaiknya nyambung yah supaya kan untuk melengkapi,,,,,,yang kemarin dibanding untuk tarakan.Mengadopsi dari apa, yang diambil umbul umbul yang disana. Ternyata banyak yang teradopsi seperti kemaren banyak yang dikecamatan sana biar bisa diterapkan disini. Timbul fikiran baru untuk diterapkan dilokasinya kalo bisa nyambung, kemaren kan nggak. Putus . Mungkin saya pas Isi PIM II samarinda

HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	DR. Rahmat, MA
2	Instansi	Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di Samarinda

II. Pertanyaan terkait Evaluasi Diklat PIM III di Kab. Nunukan :

A. Tanggapan/Reaksi Peserta Diklat

1. Bapak selaku kabid diklat berkaitan dengan kurikulum, jadwal dengan karakteristik WI yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengajar di PIM III, yang pertama mungkin berkaitan dengan kurikulum yang sudah disusun kita pada saat itu dengan jadwal itu sudah sesuai dengan perka lan kan pa', kemudian dengan pemilihan WInya gimana pa

Kalo pemilihan WI pertama kriterianya tentu didasarkan kepada kompetensi WI, nah kompetensi WI itu kan ditunjukkan pertama dengan keikutsertaan WI dalam TOF, TOF diklat PIM III dan IV, nah kemarin kan sesuai dengan TOF misalnya si A mampu materi apa, nah setelah itu artinya tidak saklok lah.artinya ada beberapa pejabat struktural yang tetap ditugaskan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.jadi pada intinya pertimbangan utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh WI

2. Kalo untuk pejabat struktural kan Fasilitator yh pa? .

Fasilitator itu Berarti Fasilitator itu yang dianggap mampulah

Memang dalam diklat PIM pola baru lebih menekankan dalam penggalian pengalaman, dalam kurikulum kan dinyatakan bahwa didalam pola baru berbasis pada eksperensial learning pembelajaran.makanya ada istilah on off.....sehingga penekanan WI adalah fasilitasi. Menggali pengalaman yang dikaitan dengan teriteori atau pendekatan pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan

3. Terus berkaitan dengan penunjukan coach pa, kan kalo penunjukan coach domainnya adalah PKP2A III LAN, apa saja yang menjadi kriteria atau yang menjadi pertimbangan selama ini untuk penunjukan coach pada saat PIM III kemarin?

Yah, terus terang kan ini kesulitan utama, nunukan ini kan, karena apa yh.keterbatasan SDM untuk coach gitu yah, yang memiliki pengalaman atau memahami kurikulum diklat pola baru, sehingga kemarin ada beberapa pertimbangan sebetulnya, eh ada pergantianlah

Yang awalnya kita plot tapi yang bersangkutan karena jauh geografisnya misalnya dari samarinda maka yang bersangkutan tidak bisa menadi coach.Akhirnya kemarin hasil diskusi kriteria yang di pakai, satu, memang pengetahuan yang bersangkutan tentang Diklat PIM pola baru, yang kedua dari sisi pengalaman, sebagai coach maka dia harus memiliki pengalaman dalam konteks kepemimpinan sebagai eselon III dan yang ketiga adalah pengetahuan yang bersangkutan tentang coaching itu sendiri. Mungkin mbak Lina juga tau bahwa pemahaman tentang coaching itu berbeda beda. Tapi intinya sebetulnya kalo menurut saya fokus utama adalah bagaimana coach itu membantu peserta untuk menghasilkan inovasi proyek perubahan sesuai dengan visi yang dimiliki

4. Kalau penunjukan penguji pa?

Penguji tentu kami konsultasikan dengan pihak pimpinan. Oleh karena itu penguji kami konsultan dengan....

Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana PIM pola baru itu bisa proyek perubahan dan inovasi harus dilakukan. Nah, ini jadi kriteria utama kan karena dia jadi penguji. Penguji dia kan yang menentukan apakah perubahan ini layak, tidak layak, oke tidak oke, berhasil tidak berhasil. Itukan krusial . Kalo diuji oleh yang tidak berpengalaman maka itu akan sulit. Oleh karena itu, terus terang pendekatan pertama kami konsul ke Jakarta tentang diklat PIM ini, kedua ada orang tertentu yang di plot, misalnya dari perguruan tinggi oleh pak apus atau pa mariman harus di berikan informasi dulu, lebih awal kita rapat dulu, breafing dulu untuk memberikan iformasi apa itu hakikat inovasi proyek perubahan yang dilakukan, begitu. Jadi intinya supaya pemahaman sebagai penguji itu betul betul minimal ada pemahaman yang relatif sama antar penguji

5. Berarti kita kayak kemarin pa, ada beberapa akademisi, berarti pertimbangannya yang pasti tahu dengan pola baru dan hakikat inovasi sebuah perubahan intinya, kemudian pa, kalo didalam ini terkait dengan bapak kan salah satu jadi coach juga, mungkin kendalanya pa, karena mungkin pihak kita.kami pahami sih dengan letak geografis kami dan mungkin jg kesibukan bapak dan jg teman teman peserta biasanya juga kendala kendalanya berkaitan dengan pembimbingan pada saat coachingnya itu pa ?

Terus terang gitu yh, kendala kalo didaerah kemarin PIM III di nunukan itu yah adalah media komunikasi bagi sebagian yah. Kalo yang saya alami sebagai coach sebetulnya dari sisi pemahaman coaching saya baik baik saja. Bahkan beberapa yang saya bimbing itu inovasinya diluar ekspektasi artinya ada yang sangat bagus, yang mendekati sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan pelayanan publik di nunukan. Tetapi coaching ini karena letak geografis yang jauh dengan saya lebih banyak pake teknologi informasi via email, WA, sms, telpon dan sebagainya. Nah bagi setiap peserta yang ada di pelosok itu kesulitan karena kadang kadang signal hp tidak ada, lain ini sebetulnya. Tapi kan ini hanya beberapa saja sebetulnya, mungkin dari 10 orang yah 3 lah, yang lainnya sih lancar lancar saja. Dan saya lihat semangat teman teman sebagai coach itu sudah sangat baik dan mereka memahami betul keterbatasan di daerah perbatasan sehingga memacu semangat mereka untuk melakukan proyek perubahan di instansinya.

1. Kemudian pa, boleh diceritakan sedikit peran bapak agar mereka bisa, potensi potensi cara berfikir.upaya upaya yang bapak lakukan?

Coach itu lebih banyak memotivasi. Saya sebagai coach waktu itu, pertemuan awalnya waktu itu kita menyepakati adanya perubahan. Membantu mereka menemukan adanya perubahan yang nanti disepakati dengan mentor. Pada saat itu ada banyak, apa yh....istilahnya mereka merasa bahwa proyek perubahan itu sulit dan sebagainya.banyak yang merasa ini hanya seperti PIM pola lama. Sehingga peran coach pada saat pertemuan awalnya, mereka itu menyemangati, bahwa proyek perubahan itu seperti ini.tidak harus yang besar. intinya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peran sebagai pejabat eselon III malahirkan layanan yang terbaik. Nah, dipertemuan awal itu yang saya tekankan, jadi mereka saya kasih semangat, coba area perubahan bapak apa, ada yang menyatakan saya hanya ini dan ini tapi kemudian kita coba gali dibantu karena kita diskusi satu kelompok dibantu yang lain, sampai betul betul ketemualah area perubahan yang bisa

dikatakan sebagai sebuah inovasi

2. Pa' yang tak kalah pentingnya, kami sih menyambut, istilahnya bersyukur lah PKP2A III LAN masih mau sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan diklat mau dari tahun 2015 dan 2016 juga. Mungkin saya hanya minta yang terurgen sekali saat untuk bisa berkepanjangan atau mungkin menjadi evaluasi yang paling mendesak ?

Gini mbak, saya kira komitmen pa safar kepala BKDD kan butuh apresiasi, nah kalo menurut saya sih dari mulai tahun, Setelah melihat proses itu sudah mulai berjalan 3 tahun yah mbak, 2014, 2015, dan 2016 itu sangat bagus . Nah, pesan pa mariman adalah mungkin kita harus berusaha bukan hanya pada upaya pembangunan fisik kampus baru, anggaran dsb, itu kan melalui proses yang panjang. Saya menyarankan sebagian dari peningkatan manajemen kediklatan kepada pa safar, mbak lina serta teman yang lain memulai lah pertama dengan penyiapan SDM, sekarang sudah mulai di arahkan yah mbak. Satu sudah ada inisiatif dari BKD untuk menyiapkan tenaga TOUC. Teman teman yang sekarang sudah TOC mungkin didorong untuk sertifikasi tingkat TOC . Kerangkanya dibuat lah, apakah 2016 dilaksanakan atau 2017, kedua WI, mbak Lina kan sudah ikut TOF jadi walaupun struktural belum Sekarang dorong teman teman yang potensial punya fashion mengajar sebagai eselon 2 alumni PIM II didorong untuk bisa menjadi struktural yang TOT. Sekarang kan ada TOT yang struktural. Nanti kita kan bisa kerjasamakan dengan tarakan atau yang lain lah dalam rangka menyiapkan tenaga fasilitator yang ter sertifikasi untuk mengajar di PIM gitu yah, dua hal. Yang ketiga harus sudah mulai dibangun sistem mbak, menurut saya. Jadi SDM kemudian sistem. Sistem itu maksudnya apa,,,pertama pola pola seperti SOP Penyelenggaraan dari mulai pemanggilan peserta, tahapan peserta, kemudian sop. Kalo penyelenggaraan itu kan sudah umum kn, mulai pembukaan, pembelajaran, itu harus dokumennya disiapkan. Kemudian yang lainnya seperti sistem informasi, yah bertahap saja. Memang keterbatasan daerah yang kurang lain sebagainya tapi itu sudah harus disiapkan. Kemudian juga dari sisi penjaminan mutu sudah difikirkan. Seperti kami disini sedang berusaha untuk membuat satuan penjaminan mutu internal yang melibatkan orang orang, tiga unsur sebetulnya, satu dari internal 2 dari pihak eksternal, eksternal itu dari non bkd dan dari unsur masyarakat. Maksudnya klo kami disini ada dari kami, dari Perguruan Tinggi dan ada dari masyarakat, nah, jadi kalo nanti ini diupayakan, saya yakin kalo upaya ini kalo

berbarengan dengan pembangunan itu kedepan, itu bisa menjadikan bkd sebagai lembaga diklat terakreditasi jadi kami bermimpi khususnya pa mariman bahwa di kaltara itu jangan hanya satu, ditarakan yah tapi nanti ada beberapa minimal mbak lina itu, bkd nunukan itu terakreditasi untuk diklat prajab misalnya golongan 2 ataw PIM IV.karena tuntutan PIM IV itu kan setiap tahun mbak lina merasakan sendiri sangat besar , ada peningkatan jumlah terus menerus , kalo mbak lina sudah terakreditasi, yah, saya tidak tahu apakah bisa C , yang dua tahun sekali bisa direakreditasi. Itu kan sudah bagus menurut saya. Jadi menarget lah, pa safar lah misalkan targetnya 2018 akreditasi untuk diklat prajab dan PIM IV. Jadi kalo kita punya tonggak di 2016, maka di 2016 sekarang, 2017nya target kedepan.lebih lebih kami, kami sangat berbahagia makin banyak yang terakreditasi didaerah, standar makin dierbaiki maka kami yakin kebutuhan pengembangan ASN bisa dicukupi oleh daerah kecuali tetapkan kalo terakreditasi koordinasikan dengan LAN samarinda, kekurangan WI koordinasikan dengan Tarakan tapi secara kelembagaan BKDD nunukan sudah bisa mandiri. Itu harapan kami di LAN Samarinda kedepan, nanti kita bantu prosesnya.

- 3. Kalo boleh tahu kemarin target akreditasi kita mengacu pada perka LAN nomor 25 yah Pa, jadi mungkin mencapai target yang tadi misalnya tahun 2018 sudah akreditasi LPJ dan PIM IV berarti item item itu yang harus dipersiapkan yah pa?**

1. Mungkin bisa gini mbak, di 2017 itu kalo ada di RKA di anggarkan , anggaran untuk apakah sosialisasi , atau persiapan apanya, sehingga kita bisa lebih detail mencoba menggali apa yang perlukan oleh nunukan , yang paling jls yang tadi saya katakan persiapan WI kedepan termasuk persiapan TOCnya sehingga target 2017 tidak terlalu melesetlah, kita sudah siap secara data lalu kita ajukan . Dalam perka LAN itu tidak harus akreditasi kelembagaan diklat BKDD. Kan sudah bagus nih, sekarang kan BKDD nah, BKDD kan bisa mengajukan, cuma mungkin nilai kelembagaan tidak utuh, tidak tinggi karena kita bercampur dengan kepegawaian tapi untuk level kabupaten gak masalah karena kan dengar dengar rancangan PP Kelembagaan pengganti PP 41 itukan tidak boleh, dilebur lagi, kabupaten itu menjadi BKDD jadi saya kira itu pengaruh baru buat nunukan. Cuma Pa Sapar dengan Mbak lina ini harus bergerak dari sisi pengelolaan, SDM, sistem dsbnya, selain harus bergerak dari sisi pasilitas misalnya melobi ke PU, seperti Palangkaraya kan sebetulnya tahun 2016 ini mengajukan DAK KEMENTERIAN untuk itu. Kalo nunukan bisa melobi

gubernur misalnya Kaltara untuk bisa DAK tersebut juga sangat bagus menurut saya, jadi sama sama berjalan. Apalagi mbak, kalo pemerintah memang betul betul serius membangun SDM di perbatasan salah satunya Aparatur, menurut saya kan BKDD itu kan punya beban untuk mengembangkan tenaga fungsional, guru terutama sama tenaga kesehatan. Kalo BKDD sudah menjalin akreditasi untuk PIM Prajab saja, arahkan nanti juga untuk guru guru. Nah kalo guru bisa saja kalo mbak erlina bikin profosal ke Kementerian Pendidikan Nasional ataw kementes, riset, itu sangat mendukung sekali, asal kita betul betul memiliki sarana kemudian sdm yang kuat untuk penyelenggaraan diklat di nunukan gitu yh. Jangkauannya jangka panjang yh

1. **Mungkin gini yah pa rahmat, penunjukan lokasi kan sudah dapat, kami mengajukan melalui bappeda mengajukan sudahn masuk melalui dana APBN sekitar 100 M walaupun nanti turunnya paling bertahap untuk pembangunan tapi saya tertarik yang bapak katakan mungkin di 2017 bisa, ini menjadi catatan penting bagi saya dan menjadi PR. Seperti tadi pa, mgk 2017 kita mengadakan semacam sosialisasi, itu seperti apa maksudnya kegiatan, apakah kami mengumpulkan khusus orang diklat bkd trs mendatangkan khusus orang dari LAN atau seperti apa bagusnya ?**

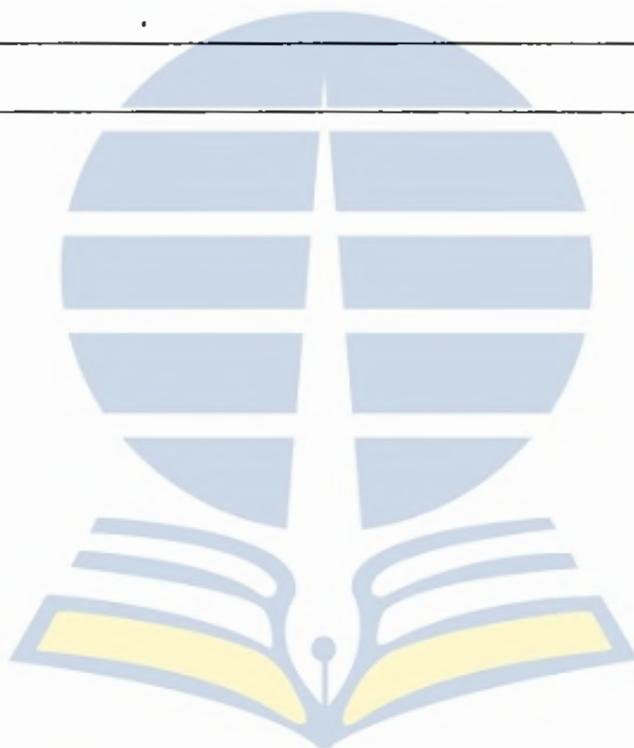
Bisa, mungkin g tau nama kegiatannya apa, apakah persiapan untuk akreditasi BKDD atau apa. Tapi nanti ada beberapa pertemuan mbak. Satu, misalnya sosialisasi awal tentang perka LAN terbaru tentang akreditasi lembaga diklat. Ini dijelaskan tentang detail detail, mbak undang aja dari ketiga.....siapa lagi yang ngurusi akreditasi, suruh menjelaskan data yang dibutuhkan itu apa", mulai dari kelembagaan, sdm, program serta evaluasi pembelajaran itu harus disiapkan

2. **Biasanya berapa orang yang harus kami siapkan untuk tenaga yang kita panggil ?**

2 Orang saja dari jakarta. Nanti pada prosesnya ada beberapa hal misalnya mbak harus sudah mengalokasikan. Kalo bisa memang dikirim seperti TOC, seperti teman teman itu yh. Pa samsuddin, Pa sugi sudah pernah ikut. Mungkin tahap awal itu adalah penggalan data itu dulu. Jadi yang punya sertifikat" diklat di BKD itu dikumpulkan semua. disortir, TOC. MOT, diklat teknis apasaja yang berkaitan, TOF semua didata, yang belum itu disiapkan, yang belum apakah dikirim kesini atau ke jakarta tahun depan. Kemudian yang WI mbak, kalo menurut saya, mbak lina marlina sudah pim II tinggal cari lagi minimal 5 lah, apakah pa munir, pa dian. Pa

dian sepertinya punya fashion untuk mengajar, juned. Teman teman ini tolong difasilitasi untuk ikut TOT . TOT dijakarta apakah sudah selesai kurikulum PIMnya. Tapi kalo tidak, ikutkanlah TOT atau kalo tidak selenggarakan lah TOT khusus untuk penguatan.eh, media pasilitator . Minimal prajabat (PIM) karena kita akan arahnya kesana maka prajab dan PIM. Berarti kan orang orang tertentu mbak harus seleksi dulu eselon 2, eselon 3 yang punya niatan mengajar ada 10-15 orang lebih bagus koordinasi dengan LAN Samarinda atau P3D. Nnti kita undanglah kalo bisa dari jakarta sebagai WI siapa dengan pa Mariman dikolaborasi seperti itu

3. Terus kalo proyek perubahan pa, setelah ?



HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	Drs. Syafarudin
2	Instansi	Kepala BKDD Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana perencanaan awal kabupaten nunukan waktu ingin melaksanakan penyelenggaraan diklat PIM III

Pada saat itu yah, perencanaan awal kabupaten nunukan untuk melaksanakan diklat PIM III kabupaten nunukan tahun 2015, banyaknya pejabat eselon III yang menduduki jabatan secara definitif dengan jumlah 40 satu kelas waktu itu. Sebenarnya lebih yh, yang sudah lulus atau cuman karena sudah menduduki. 40 itu yang kita ikutkan, yang mengikuti diklat PIM III yang merupakan persyaratan bagi pejabat eselon III sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pasal 7 ayat 1 PNS yang akan atau dan telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut

2. Sesuai dengan perka LAN sebenarnya yang berhak untuk menyelenggarakan diklat PIM adalah lembaga diklat yang terakreditasi, nah dalam hal ini karena bkdd mau melaksanakan. Apakah bkdd sudah terakreditasi ? Karena belum atau tidak, bagaimana mendapatkan izin sehingga kita mendapatkan prinsip bisa menyelenggarakan di kabupaten nunukan

Pemda kabupaten nunukan mengajukan permohonan melalui surat bupati nunukan kepada kepala LAN RI untuk dapat diberikan izin prinsip penyelenggaraan diklat PIM III di kabupaten nunukan dengan bekerjasama badan diklat atau lembaga diklat yang terakreditasi sebagai penjamin mutu pelaksanaan diklat termasuk yang direkomendasikan oleh LAN RI. Pemkab Nunukan dalam hal ini BKDD Kabupaten Nunukan meminta dukungan dari PKP2A III LAN Samarinda bersama sama dengan wakil bupati nunukan, asisten administrasi, pemkab nunukan dan tim anggaran kabupaten nunukan sebagai inspektorat kabupaten nunukan menghadap ke direktur Diklat Aparatur LAN RI sekaligus memfresentasikan gambaran umum tentang kabupaten nunukan sehingga menjadi pertimbangan Anggaran yang harus

disediakan oleh pemerintah kabupaten nunukan. Apabila penyelenggaraan diklat di kabupaten nunukan atau melakukan pengiriman peserta dengan pola kontribusi diluar kabupaten nunukan sistem on dan off kampus, disamping itu diaparkan juga fasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat yang dimiliki oleh pemkab nunukan sebagai tanda kesiapan daerah apabila dilaksanakan di kabupaten nunukan : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diklat sebagaimana yang menjadi evaluasi dan saran dan masukan dari PKP2A III LAN. Kemarin juga kita pada saat melakukan kegiatan diklat itu melalui mejanya meja biasa saja, sekarang kan sudah menggunakan apa namanya , meja bundar yang untuk sudah kita penuh semua, termasuk kursinya, yang dinamis tidak statis sebagaimana yang disarankan oleh LAN sudah kita lakukan

3. Apa yang mendasari upaya upaya itu yang kita lakukan pemerintah daerah pak ?

Upaya tersebut dilakukan oleh pemkab nunukan dimana ingin menunjukkan keseriusan lalu meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan diklat sehingga LAN RI dapat diberikan izin prinsip penyelenggaraan diklat PIM III dikabupaten nunukan dengan pola kerjasama dengan penjamin mutu yang direkomendasikan oleh LAN RI seperti halnya selama ini yang direkomendasikan adalah Bandiklat kota tarakan. Kota tarakan ini baru yang pertama ini kemudian yang kemarin melakukan ini bandiklat provinsi kaltara, karena disana tidak ada maka yang kedua yaitu kota tarakan. Sehingga pelaksanaan diklat PIM III yang dilaksanakan di kabupaten nunukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya PIM juga terdapat efisiensi pelaksanaannya jika harus melaksanakan diklat PIM diluar kabupaten Nunukan

4. Kalo Bapak amati setelah penyelenggaraan itu di Kabupaten Nunukan, apa hasilnya efektif dan efisien yah pa ?

Dengan diberikannya izin prinsip penyelenggaraan diklat PIM tingkat III di kabupaten nunukan ini, maka hasilnya akan sangat efektif dan efisien. Efektif karena koordinasi antara peserta dengan mentor lebih intensif dan mudah serta efisiensi dalam penggunaan anggaran karena pembiayaan yang disiapkan berkaitan dengan perjalanan dan honorer WI, coach dan penguji yang datang ke nunukan

5. Apa yang menjadi bahan pertimbangan pemda atau melalui bkd untuk tetap mengajukan yang bersangkutan untuk tetap mengikuti diklat PIM?

Pertama : bagi mereka yang sudah menduduki jabatan di eselon tersebut, baik iya IV, III dan II BUPnya misalnya mencapai 2 tahun. Namun didalam hal ini kan kita menempatkan mereka kan disitu berdasarkan hasil rapatnya PIM, ini layak untuk diangkat sebagai pejabat eselon Ring, sehingga wajib kita masukkan, jangan sampai nanti setelah pensiun duduk disitu tidak pernah mengikuti diklat PIM, yang dikhawatirkan itu nanti kan adanya temuan temuan yang dilakukan oleh tim Insfektorat maupun yang lainnya. Nah, ini yang mengembalikan kan kasihan, sebenarnya itu kan tanggungjawab kita sebagai pemerintah daerah yang menempatkan mereka disana. Itu wajib sebenarnya mereka mengikuti. Namun dengan kondisi saat ini, ada saran dan penyampaian dari rekan kita sebagai mitra menyampaikan bahwa jika sudah BUP sampai 2 tahun itu selayaknya tidak perlu diikutkan lagi, mengingat masanya itu sudah tidak lama lagi berakhir, anggaran yang dikeluarkan sia sia. Pola yang dilakukan sekarang kan pola baru bukan pola lama. Kalo pola baru kan dia harus melihat dulu, apa dia punya hasil yang diajukan proyek perubahannya itu. Kalo hanya 2 tahun pensiunnya itu tidak akan terlihat

6. Berkaitan tentang didalam perka LAN terbaru didalam penetapan peserta itu kan harus ada melalui tim seleksi, nah mungkin apakah disaat waktu itu sebelum PIM III pengajuan untuk peserta kita ada membentuk tim seleksi?

Kalo tim seleksinya tidak ada dibentuk.

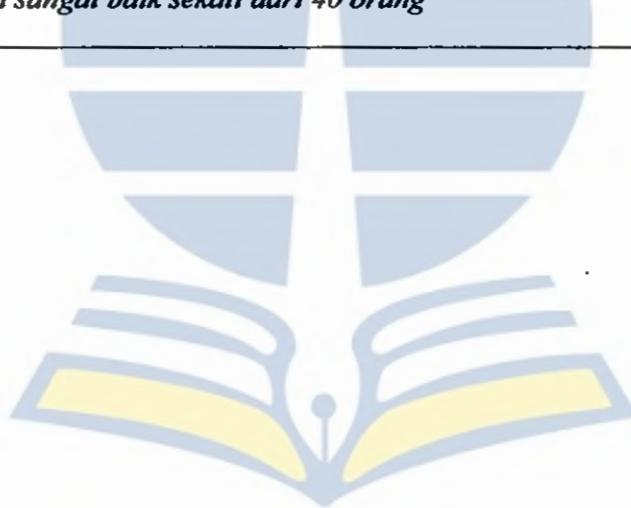
7. Sehingga Polanya didalam penetapan calon peserta seperti apa?

Polanya kita lakukan disini, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa diposisi yang sudah menduduki itu ditempatkan dalam posisinya itu satu kelas, kemudian kita lakukan oleh bidang itu untuk merekap. Coba direkap siapa siapa yang belum menduduki, yang belum mengikuti diklat PIM III yang sudah dulu. Ternyata setelah direkap, itu jumlahnya 40 kemudian ada 1 yang lulus tapi lulusnya bukan dikita dilembaga lain, institusi lain yang masuk pindah kesini sehingga yang perlu kita utamakan yang sudah duduk, nah itu, kepala bidang kan melakukan koordinasi karena disin itu yah kalo ada yang ,melakukan pelanggaran disiplin kan g perlu diteruskan gitu yah, karena karir mereka g direkon kan untuk mengikuti itu. Karena kita membuat daftar juga sesuai dengan TMTnya, DUKnya, pangkat dan sebagainya. Nah, jika ini sudah terpenuhi, kita ajukan. Karena ini jumlahnya 40 yah kita ajukan 40 melalui pimpinan ke bupati, ke sekda yah 40 ini yang bisa memenuhi

karena posisinya pas. Alhamdulillah pada saat itu dari 40 orang tidak ada yang pernah dijatuhi hukuman disiplin

8. Terakhir nih pa, selaku kepala BKDD dengan sama seperti yang saya sampaikan kepada PKP2A LAN, tanggapan bapak dengan diklat pola baru baik PIM III maupun PIM IV, apa tanggapan bapak setelah kita melaksanakan dengan pola baru berkaitan dengan penyelenggaraan ?

Dengan penyelenggaraan diklat pola baru ini sangat baik sekali yah bukan berarti diklat yang sebelum ini, memang ada yang dikatakan kita belajar duduk duduk duduk, lulus, selesai. Dengan pola ini bisa saja seseorang itu walaupun sepintarnya bagaimana dan sebagainya kalo tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh LAN, itu tidak akan direkomendasikan untuk lulus atau mengulang. Sehingga dengan pola baru ini banyak manfaatnya bagi skpd masing masing karena mereka melakukan proyek perubahan. Nah, dari 40 hanya 3 proyek perubahan yang asli. Yang asli itu sudah cukup baik sekali, g usah banyak banyak yang sifatnya menemukan hal yang terbaru sudah sangat baik sekali dari 40 orang



HASIL WAWANCARA - MENTOR

Untuk Alumni Peserta Diklat PIM III Angkatan I di Kabupaten Nunukan

I. Pertanyaan terkait data informan:

1	Nama	Drs. Syafarudin
2	Instansi	Kepala BKDD Kabupaten Nunukan

1. **Kebetulan kan ada salah satu peserta yang memang merupakan dari BKD, yang eselon III yaitu salah satu kabid informasi dan kepegawaian, bapak selaku mentor nih yang saya sekarang spesifikasinya sebagai bapak selaku mentor kiranya pada saat terlak sudah berjalannya PIM, apa kendala yang dialami mungkin baik dari peserta pada saat melakukan, ada nggak kendala yang dialami peserta ketika melakukan konsultasi atau koordinasi berkaitan proyek perubahan kepada mentor pada saat masih merancang**

Pada saat masih merancang, yah dalam konsultasi dan melakukan ini kepada mentor, yah kita siap, artinya didalam posisi satu atap yah lebih mudah untuk melakukan konsultasi ke pimpinannya selaku mentor

2. **Kira kira pa, upaya upaya bapak selaku mentor, apa yang bapak lakukan untuk memicu atau mengingatkan kepada peserta untuk fokus pada saat mengerjakan laboratorium kepemimpinannya sudah mengimplementasikan dan menjadi proyek perubahannya. Kira kira apa saja yang sudah bapak lakukan**

Didalam pelaksanaan itu kan kita ada on off yah, didalam on maksudnya di kampus dan off itu pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan itu kan dia mulai merancang guna melaksanakan kegiatannya, apa yang telah diajukannya. RPPnya yang diajukannya kepimpinannya, kemudian yang akan diajukannya untuk diuji, disitulah terlihat bahwa yang jelas kita memberikan suatu motivasi dimana salah satu kendala disini, salah satu kendala pelaksanaan itu kan , misalnya nanti dalam proyek ini akan menggunakan anggaran. Nah mau tidak mau selaku mentor dan untuk kemajuan kita punya peserta dari skpd ini kita bisa memberikan peluang. Yah walaupun istilahnya untuk penganggaran anggaran untuk mendukung proyek perubahan itu, misalnya beli alat dan sebagainya maupun bertahap. Itupun bisa aja dananya, yang penting ini bisa berjalan sampai kapan dan tuntas. Itu yang penting

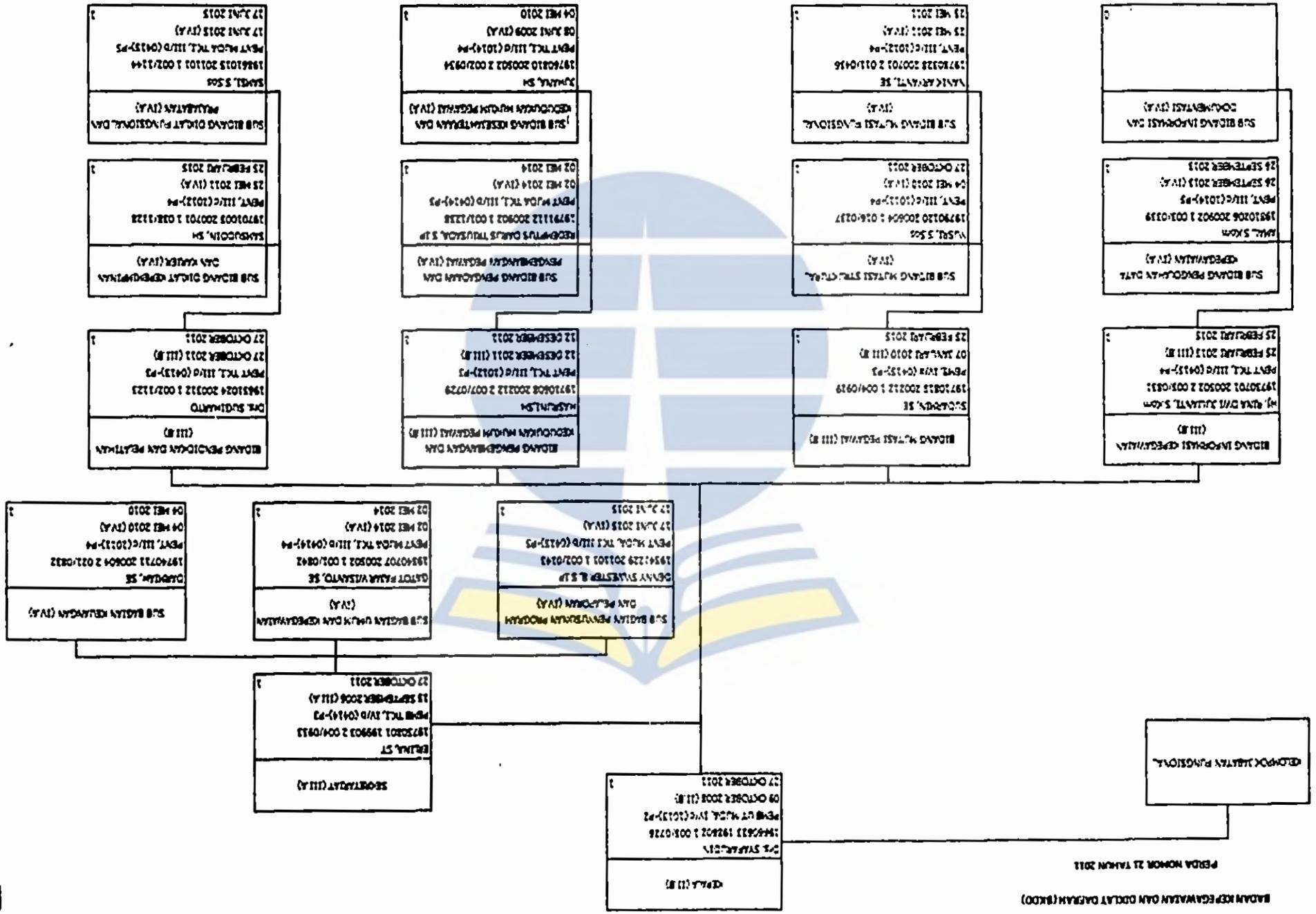
3. **Bapak selaku mentor, dengan melihat cara pola dengan yang baru ini, tanggapan bapak dengan adanya proyek perubahan dan mungkin yang bapak harapkan itu**

seperti apa kedepannya, istilahnya apakah evaluasi itu harus tetap dilakukan seterusnya agar proyek perubahannya tidak terhenti sampai didiklat saja seperti apa pa ?

Sebenarnya evaluasi ini sudah berlaku sejak zaman dulu, sejak yang dilakukan bukan pola baru. Itu sudah dilakukan karena ingin melihat perkembangan peserta itu. Ah, dengan pola baru ini juga kita ingin melihat apakah proyek perubahan yang diajukannya pada saat mengikuti diklat PIM III ini apakah itu bisa berjalan atau tidak. Nah ternyata setelah dilakukan evaluasi kemarin, itu saya katakan dalam proyek perubahan ini, 1, 2, 3 itu sudah bisa menunjukkan dia punya kemampuan dan itu adalah original yah, itu sudah sangat baik. Inilah yang diharapka oleh kepala LAN waktu itu Prof. DR Agus yah, menyampaikan pada saat pembukaan itu, dari sekian, hanya sekian saja yang bisa original itu sangat bagus sekali. Dan memang evaluasi itu penting, namun dengan kondisi saat ini, kita melakukannya, yang bisa kita lakukan hanya sekitar dulu. Nanti terakhir kita akan lakukan didaerah daerah terpencil misalnya dikedcamatan



BADAN KEPEGAWAIAN DAN DOCTAT DARAH (BKDD)
PERDA NOMOR 21 TAHUN 2011





BUPATI NUNUKAN

Nunukan, 7 Januari 2015

Nomor : 893.3/09 /BKDD-V/1/2015

Kepada

Lampiran :

Yth. Kepala LAN Republik Indonesia

Perihal : Pelaksanaan Diklatpim Tk. III

di -

Jakarta

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta ± 40 (empat puluh) orang, dengan hormat disampaikan permohonan ijin agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka efisiensi anggaran, karena apabila harus melaksanakan pengiriman peserta ke luar daerah, alokasi biaya perjalanan dinas saat Breakthrough I dan II sangat besar. Adapun pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan Diklatpim Tk. III ini sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2015.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Nunukan (sebagai laporan)
2. Pj. Gubernur Kaltara di Tanjung Selor
3. Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI di Jakarta
4. Kepala PKP2A III LAN di Samarinda
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekprov. Kaltara di Tanjung Selor.
6. Arsip.



Nomor : 409 /D.2/PDP.09
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan
 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Jakarta, 18 Februari 2015

Kepada Yth.
Wakil Bupati Nunukan
 di
 Nunukan

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat Saudara Nomor: 893.3/09/BKDD-V/2015 tanggal 7 Januari 2015, perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III maka ijin penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III diberikan kepada Lembaga Diklat Pemerintah yang sudah terakreditasi.
2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan pada saat sekarang ini belum terakreditasi maka pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III akan difasilitasi oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) yang berkedudukan di Samarinda
3. Tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat diadakan di Kabupaten Nunukan apabila sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan layak dan representative berdasarkan penilaian oleh PKP2A III LAN Samarinda.
4. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang difasilitasi oleh PKP2A III LAN mengacu standar kualitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang berlaku.
5. Seluruh tenaga pengajar yang terlibat pada pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang difasilitasi oleh PKP2A III LAN adalah yang telah lulus *Training of Facilitator* (TOF) Diklat Kepemimpinan.
6. Dalam rangka penjaminan kualitas Diklat, P3D Lembaga Administrasi Negara akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang difasilitasi oleh PKP2A III LAN.
7. Hal yang berkaitan dengan prosedur penerbitan kode registrasi STTPP melalui *Person In Charge* (PIC) PKP2A III LAN. Harap Saudara mengugaskan PIC dimaksud untuk menginput seluruh alumni, *update* profile Lembaga Diklat ke dalam Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) LAN dan berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3455021 Ext.152, Fax. (021) 3523317.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Diklat Aparatur

Reni Suzana

Tembusan Yth:

1. Kepala LAN (sebagai laporan)
2. Kepala PKP2A LAN di Samarinda



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH**

JL. Pangeran Antasari No. 49, Nunukan, Kode Pos 77482
Telp. 0556-24217, Fax 0556-24207
Website : bkdd-nunukan.com

Nunukan, 23 Maret 2015

Nomor	: 893.3/196 /BKDD-I/III/2015	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala LAN Republik Indonesia
Perihal	: Permohonan Penjadwalan Pelaksanaan Diklatpim Tk. III	di – <u>Jakarta</u>

Menindaklanjuti surat PKP2A III LAN Samarinda Nomor 323/PIII.1.1/PDP.09.2 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Kesiadaan Memfasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk. III Kabupaten Nunukan dan hasil koordinasi BKDD Kabupaten Nunukan ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan PKP2A III LAN Samarinda mengenai kesiapan pihak BKDD Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan Diklatpim Tk. III dengan Pola Baru, dengan hormat kami sampaikan permohonan agar dapat dijadwalkan untuk Kegiatan Diklatpim Tk. III tersebut dengan lokasi pelaksanaan di Nunukan pada tanggal 5 April 2015 sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan Diklatpim Tk. III ini sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2015

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Drs. Syafarudin
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19660623 198602 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Nunukan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Nunukan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan (sebagai laporan)
4. Arsip



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Jalan H. M. Ardans (Ring Road III) No. 36, Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 4105611 Fax. (0541) 737983 e-mail : info@samarinda.lan.go.id
Website: samarinda.lan.go.id

Samarinda, 26 Februari 2015

Nomor : 325 /PIII.1.1/PDP.09.2
Lamp. : -
Hal : Kesediaan Memfasilitasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kab. Nunukan

Kepada Yth.
Wakil Bupati Nunukan
Cq. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)
Kabupaten Nunukan
di -

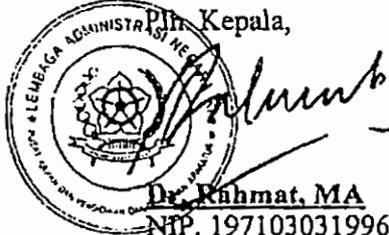
Nunukan

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Plh. Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Nomor : 409/D.2/PDP.09 Tanggal 17 Februari 2015 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami pada prinsipnya siap untuk memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2015 yang dilaksanakan di BKDD Kabupaten Nunukan;
2. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana penyelenggaraan, kami berharap BKDD Kabupaten Nunukan dapat segera melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar penyelenggaraan Diklatpin Tingkat III yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kami akan melakukan penilaian kelayakan sarana dan prasarana tersebut, sebelum penyelenggaraan dimulai.
3. Kami akan menugaskan tenaga fasilitator yang telah lulus *Training of Facilitators* (TOF) Diklat Kepemimpinan untuk memfasilitasi proses pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
4. Kami meminta agar BKDD Kabupaten Nunukan segera menugaskan pejabat / pegawai yang kompeten untuk melakukan koordinasi dengan kami dalam rangka persiapan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di BKDD Kabupaten Nunukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala,

Dr. Rahmat, MA
 NIP. 197103031996031001

Tembusan Yth :
Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN di Jakarta (sebagai laporan)

MASTER JADWAL DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III KERJASAMA PKP2A III LAN dengan BKDD KABUPATEN NUNUKAN (Nunukan, 22 April – 27 Agustus 2015)

HARI	WAKTU	MINGGU KE - 1 20 - 25 April	MINGGU KE - 2 27 april - 2 Mei	MINGGU KE -3 4 - 9 Mei	MINGGU KE -4 11- 1C Mei	MINGGU KE -5 18 - 23 Mei	MINGGU KE -6 25 - 30 mei	MINGGU ke-7 s/d 17 1 Juni - 15 Agust	MINGGU ke-18 24 - 27 Agustus	
SENIN	08.00 - 10.15	Persiapan	Integritas <i>Ir. Dayat NS Wiranto</i>	Breakthrough I Coaching (18 JP)	Ceramah : Kepala PKP2A III LAN	Budaya Kerja dlm Efektivitas Kepemimpinan (9 jp) <i>Isnaeny Ramadhan, S.Sos, MM</i>	Merancang Proyek Perubahan (18 jp) <i>Hernawaty, MM</i>	Breakthrough II : Coaching (36 JP)	Persiapan Seminar Laboratorium Kepemimpinan	
	10.30 - 12.45		Diskusi		Jejaring Kerja (9 jp) <i>Drs. Muchlis Syahrani MBA</i>	-sda-	-sda-			
	13.45 - 16.00		Presentasi		-sda-	-sda-	-sda-			
	16.15 - 18.30		Mandiri		-sda-	Mandiri	-sda-			
SELASA	08.00 - 10.15	Peserta Check-In di Asrama BKDD Nunukan	Ceramah isu Strategik: Kabupaten BKDD Nunukan (3 jp)	Breakthrough I	Visitasi Inovasi (3 jp) <i>M. Anwar, S.Sos</i>	Benchmarking ke Best Practice (45 jp)	-sda-	Breakthrough II	Seminar Laboratorium Kepemimpinan (12 JP)	
	10.30 - 12.45		Ceramah Isu Strategik: Wakil Bupati Nunukan (3 jp)		Inovasi (15 jp)	-sda-	-sda-		-sda-	-sda-
	13.45 - 16.00		Diagnostic Reading (18 jp) <i>H. Wartono, SE, MM, MP</i>		-sda-	-sda-	-sda-		-sda-	
RABU	08.00 - 10.15	Pembukaan	-sda-	Breakthrough I	-sda-	-sda-	Persiapan Seminar	Breakthrough II	sda	
	10.30 - 12.45	Ceramah Isu Strategik : Bupati Nunukan (3 jp)	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-		Evaluasi Kepemimpinan (3 JP)	
	13.45 - 16.00	Pengarahan Program (6 jp)	-sda-		Ceramah Inovasi : Kapus Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas - LAN RI (3 JP) <i>Dr. Mp. Marpaung, M.Sc</i>	-sda-	-sda-		-sda-	Persiapan penutupan
	16.15 - 18.30	Dinamika Kelompok (3 jp)	Ceramah : Sekda Prov. Kaltara <i>Drs. Badrun, M.Si</i>		Mandiri	-sda-	Mandiri		-sda-	
KAMIS	08.00 - 10.15	Wawasan Kebangsaan <i>Drs. Musnalm, M.Pd</i> (15 jp)	-sda-	Breakthrough I	Pengembangan Potensi Diri (9 jp) <i>Zuhriah, S.Pt, M.Si</i>	-sda-	Seminar Presentasi Proyek Perubahan (12 jp)	Breakthrough II	PENUTUPAN	
	10.30 - 12.45	-sda-	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-			
	13.45 - 16.00	-sda-	Penjelasan Proyek Perubahan (3 jp) <i>H. Wartono, SE, MM, MP</i>		-sda-	-sda-	-sda-			-sda-
	16.15 - 18.30	Mandiri	Mandiri		Mandiri	-sda-	-sda-			
JUMAT	08.00 - 10.15	Ceramah Wasbang: Veteran (3 jp)	LIBUR HARI BURUH INTERNASIONAL	Breakthrough I	Ceramah : Membangun Tim Efektif - Kapus P3D	-sda-	Pembekalan BT II	Breakthrough II		
	10.30 - 12.00	Visitasi Wasbang <i>Drs. Musnalm, M.Pd</i>			Membangun Tim Efektif (15 jp) <i>M. Harry Rahmad, S.IP, MM</i>	-sda-	-sda-			-sda-
	14.00 - 17.00	-sda-			-sda-	-sda-	Mandiri			-sda-
SABTU	08.00 - 10.15	Integritas (18 jp) <i>Ir. Dayat NS Wiranto</i>	Mandiri	Breakthrough I	-sda-	-sda-	Mandiri	Breakthrough II		
	10.30 - 12.45	-sda-	Mandiri		-sda-	-sda-				-sda-
	13.45 - 16.00	-sda-	Mandiri		-sda-	-sda-				-sda-



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

SEKRETARIAT DAERAH

JL.Sel.Japun – Mansapa NUNUKAN – KodePos : 77482
 Teip. 0556 - 24571 – Fax. 0556 - 21088

Nunukan, 8 April 2015

Nomor : 893.3/254/BKDD-V/TV/2015
 Lampiran : 3 (tiga) lembar
 Perihal : Pemanggilan Peserta Diklat TK.III
 Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Kepada Yth.

.....

Di –
 Nunukan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Diklatpim Tk III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAIN Samarinda, yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 April s/d 20 Agustus 2015 di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara yang diikut sertakan pada Diklat dimaksud (daftar nama terlampir) agar dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir kesediaan mengikuti Diklat Pim Tk. III Tahun 2015 (terlampir).
2. Rekomendasi / Surat Tugas dari Pimpinan Satuan Unit kerja 2 (dua) lembar.
3. Surat Pernyataan Bebas Tugas dari Kepala SKPD selama On Campus 2 (dua) lembar.
4. Foto Copy SK.Goolongan dan Pangkat Terakhir, yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Surat Keterangan Kesehatan (Asli) dan Foto Copy 1 (satu) lembar dari RSU Kabupaten Nunukan (tidak sedang hamil/tidak memiliki penyakit dengan perhatian khusus)
7. Foto Copy Kartu Askes sebanyak 2 lembar.
8. Pas Foto berwarna menggunakan jas dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar.
9. Biaya Perjalanan peserta Diklatpim Tk. III dari kecamatan ditanggung oleh instansi masing-masing.
10. Pakaian pada saat Diklat :
 - a. Senin - Kamis (pagi – sore)
 - Pria : kemeja polos lengan panjang (soft), celana panjang gelap dan berdasi
 - Wanita : kemeja polos lengan panjang (soft), rok panjang/celana panjang gelap dan berdasi
 - b. Senin – Kamis (sesi malam) / Jumat / Sabtu
 - Pria : Batik / Kain Nusantara + Celana panjang gelap
 - Wanita : Batik / Kain Nusantara + Rok panjang/Celana panjang gelap
 - c. Pakaian dan perlengkapan olah raga.
11. Pakaian pada saat Pembukaan dan Penutupan
 - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap.

12. Masing-masing berkas dimasukkan ke dalam Stofmap Diamond berwarna Merah.
13. Selama Diklat berlangsung seluruh peserta di asramakan di Mess BKDD Kab. Nunukan.
14. Pendaftaran Ulang paling lambat tanggal 18 April 2015 jam 16.00 Wite dan masuk Mess pada tanggal 21 April 2015 pada jam (14.00 s/d 16.00 Wite).

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III bersifat "on Campus dan off Campus" pada waktu tertentu peserta berada di kampus/asrama (on Campus) dan beberapa waktu tertentu kembali ke instansi masing-masing (off Campus). Adapun tahapan Diklat sebagai berikut :

NO.	TAHAP	WAKTU	SIFAT	TEMPAT
1.	Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi	21 April – 2 Mei	On Campus	Kampus BKDD Kab. Nunukan
2.	Breakthrough I (Taking Ownership)	4 – 9 Mei	Off Campus	Instansi Masing-masing
3.	Merancang Perubahan dan Membangun Tim	11 – 30 Mei	On Campus	Kampus BKDD Kab. Nunukan
4.	Breakthrough II (Leadership Laboratory)	1 Juni – 15 Agustus	Off Campus	Instansi Masing-masing
5.	Evaluasi Progress Implementasi Proyek Perubahan	17 – 20 Agustus	On Campus	Kampus BKDD Kab. Nunukan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. TOMMY HARUN, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19580610 198303 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

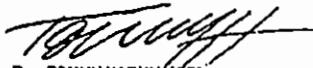
1. Bupati Kabupaten Nunukan (Sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Nunukan (Sebagai Laporan)
3. Inspektur Kabupaten Nunukan
4. Kadis PPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kabag Organisasi & Kepegawaian Setda Kab. Nunukan
6. Arsip,-

Daftar Nama Peserta Dikiatpim Tk. III
Pemerintah Kabupaten Nunukan
SUMBER DANA APBD TAHUN 2015

NO	NAMA LENGKAP	NIP	L/P	GOL	UMUR	TMT ESELON		JABATAN	INSTANSI	KET
						AWAL	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. HASAN BASRI	19590718 199903 1 002	L	III/c	56	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Usaha Ekonomi dan Pemukiman	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Sudah Menduduki Eselon II/b
2	LUKAS ISKANDAR	19811225 198602 1 002	L	III/d	54	26 September 2013	26 September 2013	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sudah Menduduki Eselon II/b
3	ALIS SUWONO, B.SW	19820218 198812 1 002	L	III/d	53	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Sosial	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSIGRASI	Sudah Menduduki Eselon II/b
4	BAHARUDDIN SAMPE RURU, ST	19690720 200212 1 005	L	III/c	47	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Bina Marga	DINAS PEKERJAAN UMUM	Sudah Menduduki Eselon II/b
5	DARIUS, SE	19701104 200701 1 019	L	III/c	45	26 September 2013	26 September 2013	Sekretaris Camat Krayan Selatan	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	Sudah Menduduki Eselon II/b
6	SILVIA HW Q MOHE, ST	19710404 200112 2 003	P	III/d	44	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Pengelolaan Base Negara dan Kerjasama	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon II/b
7	ENDAH KURNIAWATI, S.Psi	19721124 200212 2 003	P	III/d	43	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Pemuda dan Olahraga	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sudah Menduduki Eselon II/b
8	HASAN BASRI, S. Ip	19731005 200502 1 003	L	III/c	42	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Pendataan Kerjasama Pembangunan dan Labang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon II/b
9	SIRAJUDIN, S. Sos	19740321 200003 1 002	L	III/d	41	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Pemadam Kebakaran	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sudah Menduduki Eselon II/b
10	JEFRI, SP	19740201 200112 1 005	L	III/c	41	26 September 2013	26 September 2013	Sekretaris Camat Krayan	KECAMATAN KRAYAN	Sudah Menduduki Eselon II/b
11	SUGIANTO ALBERT, S. KOM	19760808 201312 1 006	L	III/c	39	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Komunikasi, Informatika dan Perhubungan Udara	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sudah Menduduki Eselon II/b
12	HELMI PUDAASLIKAR, S. IP	19820218 200502 1 002	L	III/c	33	26 September 2013	26 September 2013	Kabid Penanaman Modal	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	Sudah Menduduki Eselon II/b
13	FREDDYANTO GROMIKO, ST	19820511 200502 1 006	L	III/d	33	26 September 2013	26 September 2013	Kabid PBB dan BPHTB	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon II/b
14	Drs. YUNI SERE	19820823 199303 1 003	L	IV/a	53	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Kabid TK/PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal	DINAS PENDIDIKAN	Sudah Menduduki Eselon II/b
15	BUDI HARYANTO, ST	19711002 200112 1 003	L	III/c	44	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Kabid Perindustrian	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMMUM	Sudah Menduduki Eselon II/b
16	RUDIANSYAH, SE	19711118 196110 1 001	L	III/c	44	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Sekretaris Camat Sebuku	KECAMATAN SEBUKU	Sudah Menduduki Eselon II/b
17	FAJAR BUDHAYANTO, SE	19730830 199203 1 001	L	III/c	42	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Sekretaris Camat Sembakung Atulaj	KANTOR CAMAT SEMBAKUNG ATULAJ	Sudah Menduduki Eselon II/b
18	SABARUDDIN, SKM, M.Kes	19741231 200012 1 003	L	III/d	41	26 Maret 2014	02 Mei 2014	Kabid Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Sudah Menduduki Eselon II/b

19	RASNA, SS	19740307 200112 2 001	P	III/d	41	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Kabid Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sudah Menduduki Eselon IIIb
20	DEVI RUYEN, S. Hut	19780729 200604 1 012	L	III/c	37	26 Maret 2014	25 Maret 2014	Kabid Pengembangan Hutan dan Perkebunan	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
21	LOTHER, S. Ip	19791121 200701 1 008	L	III/c	36	26 Maret 2014	26 Maret 2014	Sekretaris Camat Nunukan Selatan	KANTOR CAMAT NUNUKAN SELATAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
22	Drs. RUSMANSYAH	19671201 200701 1 019	L	III/c	48	02 Mei 2014	02 Mei 2014	Sekretaris Camat Lumbis	KECAMATAN LUMBIS	Sudah Menduduki Eselon IIIb
23	drg. I KETUT KARYAWAN	19681022 200212 1 002	L	III/d	47	02 Mei 2014	02 Mei 2014	Kabid Pelayanan Medik	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
24	RAMSIDAH, SKM	19711227 200112 2 001	P	III/d	44	02 Mei 2014	08 Februari 2015	Kabid Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
25	YOSEPH, ST	19720713 200112 1 002	L	III/d	43	02 Mei 2014	02 Mei 2014	Kabid Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
26	MUHAMAD RAMLI, S.Sos	19741217 200502 1 004	L	III/d	41	02 Mei 2014	02 Mei 2014	Sekretaris Camat Tulin Onsoi	KECAMATAN TULIN ONSOI	Sudah Menduduki Eselon IIIb
27	HEBERLI, SE	19780702 200701 1 009	L	III/c	38	02 Mei 2014	08 Februari 2015	Kabid Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
28	Hj. SITI HASNAH, SE	19780911 200203 2 013	P	III/d	37	02 Mei 2014	08 Februari 2015	Kabid Ketahanan Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sudah Menduduki Eselon IIIb
29	HARI SAPTO SAMPURNO, S.Pd, M.Pd	19740101 199902 1 001	L	IV/b	41	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Pendidikan TK, SD Dan SLB	DINAS PENDIDIKAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
30	ABDUL HARIS BEBE ARAN, SH	19701003 200112 1 001	L	III/d	45	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Inspektur Pembantu Wilayah I	INSPEKTORAT DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
31	DEDY SUPRAYITNO, S. Hut	19701023 200003 1 002	L	III/c	45	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Perlindungan Hutan Dan Perkebunan	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
32	HERRY AGENG SANTOSO, SE	19700218 200312 1 004	L	III/d	45	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Anggaran	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
33	AGUS, ST	19720801 200604 1 028	L	III/c	43	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Tata Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM	Sudah Menduduki Eselon IIIb
34	MARIANI, ST	19731110 200212 2 003	P	III/d	42	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Sarana Dan Prasarana	DINAS PENDIDIKAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
35	EURATH, ST	19780708 200212 1 006	L	III/d	40	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Minyak Dan Gas	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Sudah Menduduki Eselon IIIb
36	EVA RAHMIFA, S.Pi	19780118 200312 2 004	P	III/d	38	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Kelautan Pantai Dan Pulau Pulau Kecil	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
37	JONED, S. Hut	19780221 200502 1 004	L	III/d	38	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Penagihan Keberatan Dan Penerimaan Lain - Lain	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb
38	EUNIKE SUPPA, ST	19790822 200312 2 008	P	III/d	36	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Kabid Pertamanan	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sudah Menduduki Eselon IIIb
39	AGUS ARIEF DARMAWAN, S.IP	19810607 200604 1 011	L	III/c	34	08 Februari 2015	08 Februari 2015	Sekretaris Camat	KECAMATAN SEMBAKUNG	Sudah Menduduki Eselon IIIb
40	RINA DWI JULIANTI, S. Kom	19730791 200502 2 005	P	III/c	42	25 Februari 2015	25 Februari 2015	Kabid Informasi Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	Sudah Menduduki Eselon IIIb

Nunukan, 8 April 2015
SEKRETARIS DAERAH


Dr. TOMMY HARUN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19580616 198303 1 018



**PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN**

NOMOR : 188.45/ 370 / v ' /2015

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR DAN TENAGA PENGAJAR
DIKLAT PIM TK. III ANGGARAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Eselon III, maka perlu adanya Diklat Kepemimpinan Tk. III di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Peserta Diklat, Mentor, Coach, Evaluator serta Tenaga Pengajar Diklat PIM TK III Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 seri A Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 42820.pdf
2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015;
 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan Tingkat III;
 5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1143/II/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;
 6. Surat Persetujuan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan III (tiga) dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 409/D.2/PDP.09;
 7. MOU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 415.43/09/HK.ORG/I/2014;
 8. Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 733/P.III.1/HKM.II.I;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peserta Montor, Coach, Evaluator dan Tenaga Pengajar Diklat PIM Tk. III Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 yang sebagaimana dalam tercantum pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA** : Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan III sesuai tempat dan waktu yang telah dijadwalkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan.

- KETIGA** : Mentor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU⁴² bertugas sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme, memberikan dukungan kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan proyek perubahan, memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan dan berperan sebagai inspirator bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan III.
- KEEMPAT** : Coach sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan bimbingan pelaksanaan proyek perubahan, memberikan pelayanan konsultasi bagi peserta dalam menyusun rencana dan implementasi proyek perubahan, memastikan pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan perencanaan, melakukan langkah-langkah pencegahan ketika terdapat situasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek perubahan, menjadi penghubung antara peserta dan mentor ketika terjadi permasalahan diantara peserta dan mentor, memotivasi serta memberikan pertimbangan terhadap kelulusan peserta.
- KELIMA** : Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta, membagikan form evaluasi terhadap tenaga pengajar/Widyaiswara kepada peserta, melakukan evaluasi terhadap tenaga pengajar/Widyaiswara dengan mengisi form evaluasi terhadap tenaga pengajar bagi evaluator pembelajaran, melakukan input data terhadap seluruh form evaluasi, mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi selama proses pembelajaran, menyusun dan menyampaikan hasil penugasan kepada penanggung jawab program.
- KEENAM** : Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, menyusun rencana pokok pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, menyusun atau mereview bahan tayang, mempersiapkan alat bantu pengajaran, memberikan penilaian terhadap peserta pada aspek integritas, etika, kedisiplinan, kerjasama, prakarsa dan memfasilitasi jalannya peserta.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Peserta, sebagaimana dimaksud pada KESATU diberikan uang saku selama 30 (tiga puluh) hari dan Mentor, Coach, Evaluator dan Tenaga Pengajar diberikan Honorarium yang besarnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala LAN no 20 Tahun 2015.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan pada Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.08.30.12 dan Kode Rekening 5.2.1.01.03.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 16 April 2015.

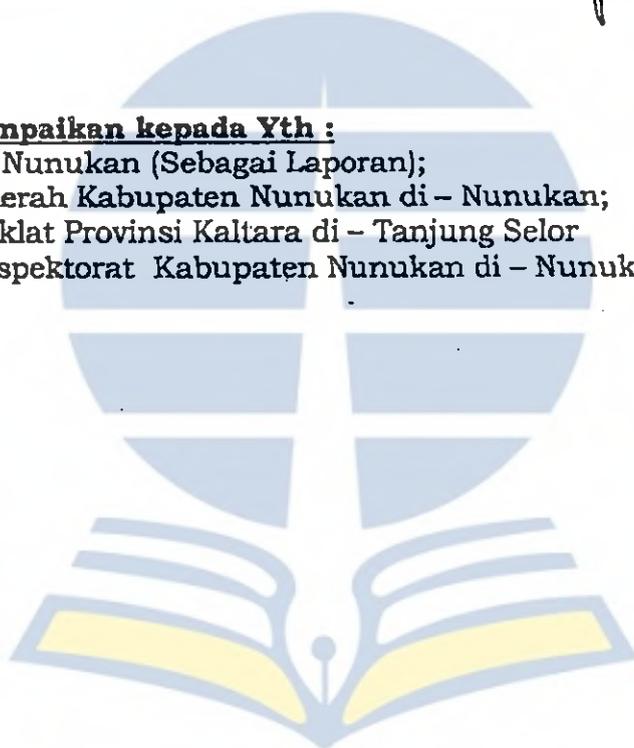
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI NUNUKAN,


BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di - Nunukan;
3. Kepala Bandiklat Provinsi Kaltara di - Tanjung Selor
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di - Nunukan;



TENTANG

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

MENTOR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA PESERTA	NAMA MENTOR
1	ABDUL HARIS BEBE ARAN, SH	INSPEKTUR DAERAH
2	AGUS, ST	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
3	AGUS ARIEF DARMAWAN, S.IP	CAMAT SEMBAKUNG
4	ALIS SUJONO, B. SW	KEPALA DINSOSNAKFRTRANS
5	BAHARUDDIN SAMPE RURU, ST	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
6	BUDI HARYANTO, ST	KEPALA DINASPERINDAGKOP DAN UMKM
7	DARIUS, SE	CAMAT KRAYAN SELATAN
8	DEDY SUPRAYITNO, S.Hut	KEPALA DISHUTBUN
9	DEVI RUYEN, S.Hut	KEPALA DISHUTBUN
10	ELIRATH, ST	KEPALA DISTAMBEN
11	ENDAH KURNIAWATIE, S.Psi	KEPALA DISBUDPARPORA
12	EUNIKE SUPPA, ST	KEPALA DKPPK
13	EVA RAHMIFA, S.PI	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	FAJAR BUDHAYANTO, SE	CAMAT SEMBAKUNG ATULAI
15	FREDDYANTO GROMIKO, ST	KEPALA DINAS PENDAPATAN
16	DRS. HASAN BASRI	KEPALA BPM-PD
17	HASAN BASRI, S.IP	KEPALA BAPPEDA
18	HEBERLI, SE	KEPALA DINAS PENDAPATAN
19	HELMI PUDAASLIKAR, S.IP	KEPALA BKPMPT
20	HERRY AGENG SANTOSO, SE	KEPALA DPKAD
21	Drg. I KETUT KARYAWAN	DIREKTUR RSUD
22	JEFRI, SP	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
23	JONED, S.Hut	KEPALA DINAS PENDAPATAN
24	LOTEER, S.IP	CAMAT NUNUKAN SELATAN
25	LUKAS ISKANDAR	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
26	MARIANI, ST	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
27	MUHAMMAD RAMLI, S.Sos	CAMAT TULIN ONSOI
28	RAMSIDAH, S.KM	KEPALA DINAS KESEHATAN
29	RASNA, SS	KEPALA DISBUDPARPORA
30	Hj. RINA DWI JULIANTI, S.Kom	KEPALA BKDD
31	RUDIANSYAH, SE	CAMAT SEBUKU
32	Drs. RUSMANSYAH	CAMAT LUMBIS
33	SABARUDDIN, S.KM, M.Kes	KEPALA DINAS KESEHATAN
34	SAPTO HARI SAMPURNO, S.Pd, M.Pd	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
35	SILVIA HWQ MONE, ST	KEPALA BPPD
36	SIRAJUDDIN, S.Sos	KEPALA DKPPK
37	Hj. SITI HASNAH, SE	KEPALA BPMPD
38	SUGIANTO ALBERT, S.Kom	KEPALA DISHUBKOMINFO
39	YOSEPH, ST	KEPALA BAPPEDA
40	Drs. YUNI SERE	KEPALA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI NUNUKAN,


BASRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / V / 2015
TENTANG
PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

PESERTA DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA	UNIT KERJA	UANG SAKU/ HARI
1	ABDUL HARIS BEBE ARAN, SH	INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 20.000
2	AGUS, ST	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 20.000
3	AGUS ARIEF DARMAWAN, S.IP	KECAMATAN SEMBAKUNG	Rp. 20.000
4	ALIS SUJONO, B. SW	DINSOSNAKERTRANS	Rp. 20.000
5	BAHARUDDIN SAMPE RURU, ST	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 20.000
6	BUDI HARYANTO, ST	DINASPERINDAGKOP DAN UMKM	Rp. 20.000
7	DARIUS, SE	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	Rp. 20.000
8	DEDY SUPRAYITNO, S.Hut	DISHUTBUN	Rp. 20.000
9	DEVI RUYEN, S.Hut	DISHUTBUN	Rp. 20.000
10	ELIRATH, ST	DISTAMBEN	Rp. 20.000
11	ENDAH KURNIAWATIE, S.Psi	DISBUDPARPORA	Rp. 20.000
12	EUNIKE SUPPA, ST	DKPPK	Rp. 20.000
13	EVA RAHMIFA, S.PI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 20.000
14	FAJAR BUDHAYANTO, SE	CAMAT SEMBAKUNG ATULAI	Rp. 20.000
15	FREDDYANTO GROMIKO, ST	DINAS PENDAPATAN	Rp. 20.000
16	DRS. HASAN BASRI	BPM-PD	Rp. 20.000
17	HASAN BASRI, S.IP	BAPPEDA	Rp. 20.000
18	HEBERLI, SE	DINAS PENDAPATAN	Rp. 20.000
19	HELMI PUDAASLIKAR, S.IP	BKPMPT	Rp. 20.000
20	HERRY AGENG SANTOSO, SE	DPKAD	Rp. 20.000
21	Dr. I KETUT KARYAWAN	RSUD	Rp. 20.000
22	JEFRI, SP	KECAMATAN KRAYAN	Rp. 20.000
23	JONED, S.Hut	DINAS PENDAPATAN	Rp. 20.000
24	LOTHER, S.IP	KECAMATAN NUNUKAN SELATAN	Rp. 20.000
25	LUKAS ISKANDAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 20.000
26	MARIANI, ST	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 20.000
27	MUHAMMAD RAMLI, S.Sos	KECAMATAN TULIN ONSOI	Rp. 20.000
28	RAMSIDAH, S.KM	DINAS KESEHATAN	Rp. 20.000
29	RASNA, SS	DISBUDPARPORA	Rp. 20.000
30	Hj. RINA DWI JULIANTI, S.Kom	BKDD	Rp. 20.000
31	RUDIANSYAH, SE	KECAMATAN SEBUKU	Rp. 20.000
32	Drs. RUSMANSYAH	KECAMATAN LUMBIS	Rp. 20.000
33	SABARUDDIN, S.KM, M.Kes	DINAS KESEHATAN	Rp. 20.000
34	SAPTO HARI SAMPURNO, S.Pd, M.Pd	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 20.000
35	SILVIA HWQ MONE, ST	BPPD	Rp. 20.000
36	SIRAJUDDIN, S.Sos	DKPPK	Rp. 20.000
37	Hj. SITI HASNAH, SE	BPMPD	Rp. 20.000
38	SUGIANTO ALBERT, S.Kom	DISHUBKOMINFO	Rp. 20.000
39	YOSEPH, ST	BAPPEDA	Rp. 20.000
40	Drs. YUNI SERE	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 20.000

BUPATI NUNUKAN,


BASRI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / V /2015
TENTANG
PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

COACH PESERTA DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	RAHMAT SUPARMAN	PKP2A III LAN
2	WARTONO	BANDIKLAT KOTA TARAKAN
3	HERIYANTO	BANDIKLAT KOTA TARAKAN
4	SUPRAPTONO SUBDIYO	BANDIKLAT KOTA TARAKAN

BUPATI NUNUKAN,



BASRI.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / V /2015
TENTANG
PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

EVALUATOR PESERTA DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA
1	Unsur PKP2A III LAN Samarinda
2	Unsur BKDD Kabupaten Nunukan

BUPATI NUNUKAN,



BASRI



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / V /2015
TENTANG
PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA
1	Unsur Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
2	Unsur PKP2A III Lan Samarinda
3	Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur
4	Unsur Pemerintah Kabupaten Nunukan
5	Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan

BUPATI NUNUKAN,



BASRI

CN: 002239

42820.pdf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

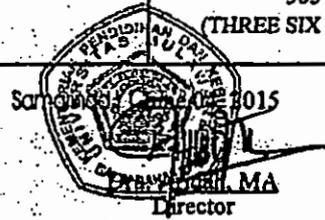
JL. P. FLORES NO. 1 TELP. +62-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA

RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : DEDY SUPRAYITNO
PLACE / DATE OF BIRTH : KEDIRI / OCTOBER 23, 1970
ADDRESS : JL. BHAYANGKARA RT.3 NUNUKAN
DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

No.: 2184/TT/UPT-BB/UM/06/15

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
33	34	42	363 (THREE SIX THREE)



CN: G02218

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

JL. P. FLORES NO. 1 TELP. +62-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA

RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : FAJAR BUDHAYANTO
PLACE / DATE OF BIRTH : BOYOLALI / JUNE 30, 1973
ADDRESS : DESA MANSANG RT.IV KEL.LUMBIS KAB.NUNUKAN
DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

No.: 2163/TT/UPT-BB/UM/06/15

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
40	38	35	313 (THREE SEVENTEEN)



CN: 002221

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

JL. P. FLORES NO. 1 TELP. +62-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA

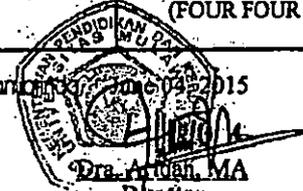
RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : DEVI RUYEN
PLACE / DATE OF BIRTH : SAMARINDA / JULY 29, 1978
ADDRESS : JL. NANGKA RT.6 NUNUKAN SELATAN

No.: 2166/TT/UPT-BB/UM/06/1

DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
40	43	49	440 (FOUR FOUR ZERO)

Samarinda, June 04, 2015

 Dra. Andah, MA
 Director

CN: 002230

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

JL. P. FLORES NO. 1 TELP. +62-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA

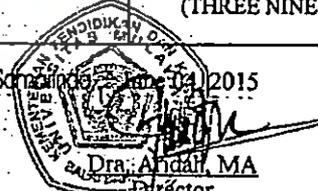
RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : JEFRI
PLACE / DATE OF BIRTH : KRAYAN / FEBRUARY 01, 1974
ADDRESS : JL. RA.BESSING SELISUN

No.: 2175/TT/UPT-BB/UM/06/1

DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
41	31	45	390 (THREE NINE ZERO)

Samarinda, June 04, 2015

 Dra. Andah, MA
 Director



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO. 00002196/DIKLATPIM TK. III/086/6504/LAN/2015

Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :



Nama	Abdul Haris Bebe Aran, SH
NIP	19701003 200112 1 001
Tempat/Tanggal Lahir	Lamsilawa, 03 Oktober 1970
Pangkat/Golongan Ruang	Peserta Tk. I, IVd
Jabatan	Inspektor Pembantu Wilayah I
Instansi	Inspektornya Kabupaten Nunukan

LULUS

Kualifikasi : **Sangat Memuaskan**

pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan DMet Daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara di Nunukan dari tanggal 22 April sampai dengan 27 Agustus 2015 yang meliputi 585 lima ratus delapan puluh lima jam pendidikan dan pelatihan.

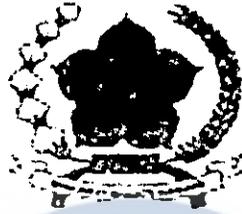
Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
Lembaga Administrasi Negara

MARIMAN DARTO, SE., M.Si
NIP. 19700207 200501 1 001

Nunukan, 27 Agustus 2015

Bupati Nunukan

Drs. BASRI, M.Si



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO. 00002199/DIKLATPIM TK. III/086/6504/LAN/2015

Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :



Nama	: Alis Sujono, B.SW
NIP	: 19620218 198812 1 002
Tempat/Tanggal Lahir	: Palopo, 18 Februari 1962
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Tk.I, III/d
Jabatan	: Kepala Bidang Sosial
Instansi	: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan

LULUS

Kualifikasi : **Cukup Memuaskan**

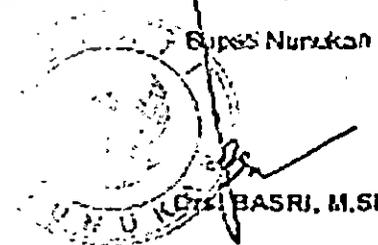
pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawalan dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara di Nunukan dari tanggal 22 April sampai dengan 27 Agustus 2015 yang meliputi 665 (lima ratus delapan puluh lima) jam pendidikan dan pelatihan.

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
Lembaga Administrasi Negara

MARIMAN DARTO, SE., M.Si
NIP.19720207 203501 1 031

Nunukan, 27 Agustus 2015

Bupati Nunukan



BASRI, M.Si



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO. 00002197/DIKLATP/IIA TK. III/086/6504/LAN/2015

Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa:



Nama : Agus Anif Darmawan, S.IP
 NIP : 19810907 200604 1 011
 Tempat/Tanggal Lahir : Sembakung, 07 Agustus 1981
 Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c
 Jabatan : Sekretaris
 Instansi : Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

LULUS

Kualifikasi : **Memuaskan**

pada Pendidikan dan Pelatihan Kepamimpinan Tingkat III Angkatan III Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawalan dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara di Nunukan dari tanggal 22 April sampai dengan 27 Agustus 2015 yang meliputi 585 (lima ratus delapan puluh lima) jam pendidikan dan pelatihan.

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
 Lembaga Administrasi Negara

MARIMAN DARTO, SE., M.Si
 NIP. 19720207 200501 1 001

Nunukan, 27 Agustus 2015

Bupati Nunukan

Dra. BASRI, M.Si



JUDUL PROYEK PERUBAHAN DIKLATPIM TK III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO	NAMA PESERTA	NIP	INSTANSI	JUDUL PROYEK PERUBAHAN
01	Drs. HASAN BASRI	19590718 199903 1 002	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Penataan Sistem Birokrasi Kelurahan / Desa Dalam Proses Dana Raskin Untuk Mempelancar Penindustrian Raskin Di Kabupaten Nunukan
02	LUKAS ISKANDAR	19611225 198602 1 002	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Upaya Peningkatan Kesiapan Satpol PP Dalam Penanganan Orang Gila Resiko Tinggi Melalui Jaring Laba - Laba
03	ALIS SUJONO, B.SW	19620218 198812 1 002	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelayanan Kemiskinan 1 Pintu
04	BAHARUDDIN SAMPE RURI, ST	19680720 200212 1 005	DINAS PEKERJAAN UMUM	Bina Marga Report Digital System (BRDS)
05	DARIUS, SE	19701104 200701 1 019	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Mobile Service (LAMIN MOVIE)
06	SILVIA HW Q MONE, ST	19710404 200112 2 003	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	Optimalisasi Garda Batas Di Kabupaten Nunukan
07	ENDAH KURNIAWATIE, S.Psi	19721124 200212 2 003	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	SIPITUNG Dana Pembinaan CABOR Di Kabupaten Nunukan
08	HASAN BASRI, S. IP	19731005 200502 1 003	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (POMPA SI MADUN)
09	SIRAJUDIN, S. Sos	19740321 200003 1 002	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat (PARTIMAS) Dalam Pengurangan Bahaya Resiko Kebakaran Dengan Sistem Pos Keamanan Terpadu (POKET)
10	JEFRI, SP	19740201 200112 1 005	KECAMATAN KRAYAN	Sistem Komunikasi Dan Informasi (SIKOMO) Di Kantor Kecamatan Krayan
11	SUGIANTO ALBERT, S. KOM	19760808 200312 1 006	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sistem Informasi Bandar Udara Perintis (SIMBARA)

NO	NAMA PESERTA	NIP	INSTANSI	JUDUL PROYEK PERUBAHAN
12	HELMI PUDAASLIKAR, S. IP	19820216 200502 1 002	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	NUNUKAN INVESTMENT CENTER (NICE)
13	FREDDYANTO GROMIKO, ST	19820511 200502 1 006	DINAS PENDAPATAN	PBB ON LOCATION
14	Drs. YUNI SERE	19620623 199303 1 003	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap PAUD
15	BUDI HARYANTO, ST	19711002 200112 1 003	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM	Sistem Kemitraan Dan Bina Lingkungan Untuk Meningkatkan daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM)
16	RUDIANSYAH, SE	19711118 199110 1 001	KECAMATAN SEBUKU	Rumah Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (RUMAH SIPATEN)
17	FAJAR BUDHAYANTO, SE	19730630 199203 1 001	KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI	Aplikasi Agenda Surat Elektronik Yang Menyimpan Arsip Surat Keluar Dan Surat Masuk Serta Dokumen Kotor Dalam Media Penyimpanan Komputer Yang Aman Dan Mudah Dalam Proses Pencariaanya
18	SABARUDDIN, SKM, M.Kes	19741231 200012 1 003	DINAS KESEHATAN	Sistem Informasi Dan Pelaporan Online Program . Kesehatan Masyarakat Lewat Sosmed (SIMFONI ORKESTRA LASOL MI)
19	RASNA, SS	19740307 200112 2 001	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA	Pengembangan Ruang Kreatif Untuk Menciptakan Hiburan Edukasi Dan Kreasi
20	DEVI RUYEN, S. Hul	19780729 200604 1 012	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Penyediaan Informasi Status Kawasan Di Kabupaten Melalui * CALL CENTER *
21	LOTHER, S.IP	19791121 200701 1 006	KANTOR CAMAT NUNUKAN SELATAN	Bank Informasi Pelayanan (BIP)
22	Drs. RUSMANSYAH	19671201 200701 1 019	KECAMATAN LUMBIS	Sistem Penataan Administrasi Surat Tanah Secara Terstruktur Mudah Dan Akuntabel Berbasis Data Base (SI PANAH RAIU MUDA IS D'BASE)
23	drg. I KETUT KARYAWAN	19681022 200212 1 002	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Standar Pelayanan Prima Berbasis Kompetensi Di RSUD Kabupaten Nunukan

NO	NAMA PESERTA	NIP	INSTANSI	JUDUL PROYEK PERUBAHAN
24	RAMSIDAH, SKM	19711227 200112 2 001	DINAS KESEHATAN	Pemanfaatan Ban Bekas Sebagai Septic Tank Dengan SI - ARJA (Sistem Arisan Jamban Keluarga)
25	YOSEPH, ST	19720713 200112 1 002	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sistem Infomasi Perencanaan Dan Indikator Garbang Emas (SI PRIA GEMAS)
26	MUHAMAD RAMLI, S.Sos	19741217 200502 1 004	KECAMATAN TULIN ONSOI	Pelayanan Adimistrasi Terpadu Kecamatan Dengan Jemput Bola
27	HEBERLI, SE	19760702 200701 1 009	DINAS PENDAPATAN	Pelayanan P3WPD Di Wilayah 4S Melalui Penerapan Aplikasi P3WPD
28	Hj SITI HASNAH, SE	19780911 200203 2 013	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Se- Kabupaten Nunukan
29	SAPTO HARI SAMPURNO. S.Pd. M.Pd	19740101 193902 1 001	DINAS PENDIDIKAN	Layanan Guru Berbasis Sistem Data Pokok Pendidikan Melalui Media Komunikasi
30	ABDUL HARIS BEBE ARAN. SH	19701003 200112 1 001	INSPEKTORAT DAERAH	Friday Consultation In Inspektorat (FC INSPEKTORAT)
31	DEDY SUPRAYITNO. S. Hul	19701023 200003 1 002	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pengawasan Hutan Lindung Secara Partisipatif
32	HERRY AGENG SANTOSO. SE	19700216 200312 1 004	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan RAPBD Kabupaten Nunukan Melalui JARKOMBA SIMDA Keuangan
33	AGUS. ST	19720801 200604 1 028	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peran Izin Mendirikan Bangunan Dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang
34	MARIANI, ST	19731110 200212 2 003	DINAS PENDIDIKAN	Kantin Diskusi
35	ELIRATH, ST	19750708 200212 1 006	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	

NO	NAMA PESERTA	NIP	INSTANSI	JUDUL PROYEK PERUBAHAN
36	EVA RAHMIFA. S.Pi	19760119 200312 2 004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Bersihkan Lingkungan Pesisir Nunukan (BERLIAN)
37	JONED, S.Hut	19790221 200502 1 004	DINAS PENDAPATAN	
38	EUNIKE SUPPA. ST	19790622 200312 2 006	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pertamanan (TULIP)
39	AGUS ARIEF DARMAWAN S.IP	19810807 200604 1 011	KECAMATAN SEMBAKUNG	Peningkatan Kinerja Pegawai Dengan Pemanfaatan Buku Kendali Kegiatan Pada Kantor Camat Sembakung
40	Hj. RINA DWI JULIANTI, S. Kom	19730701 200502 2 005	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	Sistem Informasi Arsip Digital Elektronik Kepegawaian (SI ADEK)



PERTANYAAN PESERTA PIM III

A. EVALUASI KONTEKS

1. Apa tanggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. III pola baru berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013?

B. Evaluasi INPUT

1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk III, bagaimana tanggapan Saudara terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara?
2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?

C. Evaluasi PROSES

1. Kendala apa saja yang Saudara hadapi dalam membuat Rancangan Proyek Perubahan dan mengimplementasikan proyek perubahan tersebut?
2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor Saudara serta Tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut??

D. Evaluasi HASIL

1. Bagaimana dengan Proyek Perubahan yang telah dibuat?? Apakah masih berlanjut atau tidak implementasinya??
2. Jika Tidak, apa alasannya??
3. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi Saudara?

A. 1. SANGAT BAIK, DIBANDINGKAN SEBELUMNYA,
- MELAKUKAN INOVASI TERHADAP SKPD. KAMI,
ATAU MEMBERIKAN SUMBANGSI UNTUK KABUPATEN
MUNUKAY.

B. 1. SARANA HARUS LEBIH BAIK, DIKARESEKANKAN.
DALAM PEMBIAYAAN. SDM. / PHS. KAB. MUNUKAY.
2. SARANA PENUNJANG. BERUPA LOKASI / AREA.
KHUSUS UNTUK PEMBIAYAAN. KEDIKLAT / BKDD.
MUNUKAY. SEHINGGA PELAYANAN. LEBIH BAIK.

PERTANYAAN PESERTA PIM III

A. EVALUASI KONTEKS

1. Apa tanggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. III pola baru berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013?
Pelaksanaan Diklat Pim Tk. III pola baru sangat baik dalam rangka menyiapkan SDM aparatur pada tingkat Eselon III yang mempunyai kemampuan manajerial, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan tupoksinya, sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik

B. EVALUASI INPUT

1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk. III, bagaimana tanggapa Saudara terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara?
Sudah cukup baik.
2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?
Yang perlu ditingkatkan :
 - a. Fasilitas internet
 - b. Fasilitas perpustakaan

C. EVALUASI PROSES

1. Kendala apa saja yang Saudara hadap dalam membuat Rancangan Proyek Perubahan dan mengimplementasikan Proyek Perubahan tersebut?
 - a. Keterbatasan waktu
 - b. SDM
 - c. Dukungan kebijakan
2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
 - a. Melakukan manajemen waktu yang tepat dengan stakeholder terkait, dan pembagian tugas dalam tim yang efektif dan efisien.
 - b. Sosialisasi dan diseminasi inovasi terhadap seluruh stakeholder, utamanya Tim pendukung.
 - c. Menyesuaikan konsep inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan kebijakan yang ada.
3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor serta Tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut?
Sangat mendukung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

D. EVALUASI HASIL

1. Bagaimana dengan proyek perubahan yang dibuat? Apakah masih berlanjut atau tidak implementasinya?

Masih berlanjut.

2. Jika Tidak, apa alasannya?

3. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi Saudara?

Manfaat yang diperoleh:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pajak daerah
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
- c. Meningkatkan pendapatan daerah.

Nunukan, April 2016
Peserta Diklat Pim III

Joned, S.Hut
NIP. 19790221 200502 1 004



PERTANYAAN PESERTA PIM III

A. EVALUASI KONTEKS

1. Apa tanggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. III pola baru berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013?

Pelaksanaan Diklat Pim Tk. III pola baru sangat baik dalam rangka mencetak SDM aparatur pada tingkat Eselon III sbg pemimpin perubahan yang mempunyai kemampuan manajerial, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan tupoksinya dengan dukungan mentor

B. EVALUASI INPUT

1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk. III, bagaimana tanggapa Saudara terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara?

Sudah cukup baik.

2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?

Yang perlu ditingkatkan :

- a. Fasilitas internet
- b. Fasilitas olahraga
- c. Fasilitas CS dan Laundry

C. EVALUASI PROSES

1. Kendala apa saja yang Saudara hadap dalam membuat Rancangan Proyek Perubahan dan mengimplementasikan Proyek Perubahan tersebut?

- a. Keterbatasan waktu
- b. SDM
- c. Kapasitas Bendwidh dan Jaringan yg tidak stabil

2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

- a. Melakukan manajemen waktu yang tepat dengan stakeholder terkait, dan pembagian tugas dalam tim yang efektif dan efesien.
- b. Sosialisasi dan bintek untuk seluruh stakeholder, utamanya Tim pendukung.
- c. Menyesuaikan konsep inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan k
- d. instrumen yang ada.

3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor serta Tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut?

Sangat mendukung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

D. EVALUASI HASIL

1. Bagaimana dengan proyek perubahari yang dibuat? Apakah masih berlanjut atau tidak implementasinya?

Masih berlanjut.

2. Jika Tidak, apa alasannya?

3. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi Saudara?

Manfaat yang diperoleh:

a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan arsip PNS dlm bentuk digital elektronik

b. Meningkatkan kinerja

c. Menjadi stimulus kepada PNS u/ belajar tentang arsip online

d. Membangun kepedulian PNS thd data dirinya

Nunukan, April 2016

Peserta Diklat Pim III

Hj. RINA DWI JULIANTI, S.Kom

NIP. 19730701 200502 2 005



PERTANYAAN PESERTA PIM III

A. EVALUASI KONTEKS

- 1. Apa Tanggapan Saudara terhadap Pelaksanaan Diklat PIM TK. III Pola Baru berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013?**

Jawab : Diklat pola baru dapat memberikan dampak positif karena dapat mengubah pola pikir Pegawai terutama dalam menghasilkan inovasi yang dapat berdampak positif bagi jalannya Pemerintahan.

B. EVALUASI INPUT

- 1. Selama mengikuti Diklat Pim TK III, bagaimana tanggapan Saudara terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara?**

Jawab : Sejauh ini Saya merasa pihak penyelenggara telah mempersiapkan segala kebutuhan dengan sangat baik

- 2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Saspras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?**

Jawab : disarankan agar dapat mempertahankan kualitas penyelenggaraan Diklat PIM III

C. EVALUASI PROSES

- 1. Kendala apa saja yang Saudara hadapi dalam membuat Rancangan Proyek Perubahan dan mengimplementasikan Proyek Perubahan tersebut?**

Jawab : Kendala lebih kepada jumlah SDM bidang bina marga yang kompeten dalam bidang teknologi berbasis Web.

- 2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?**

Jawab : Mengupayakan memberikan pelatihan agar dapat mengimplementasikan Proyek Perubahan yang berkelanjutan.

- 3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor Saudara serta tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut?**

Jawab : Coach dan Mentor sangat berperan aktif dengan memberikan masukan yang efektif terhadap rancangan Proyek Perubahan ini.

D. EVALUASI PROSES

1. Bagaimana dengan Proyek Perubahan yang telah dibuat? Apakah masih berlanjut atau tidak implementasinya?

Jawab : Ya

2. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi Saudara?

Jawab : Situs bidang bina marga memberikan dampak positif karena dapat memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Nunukan.

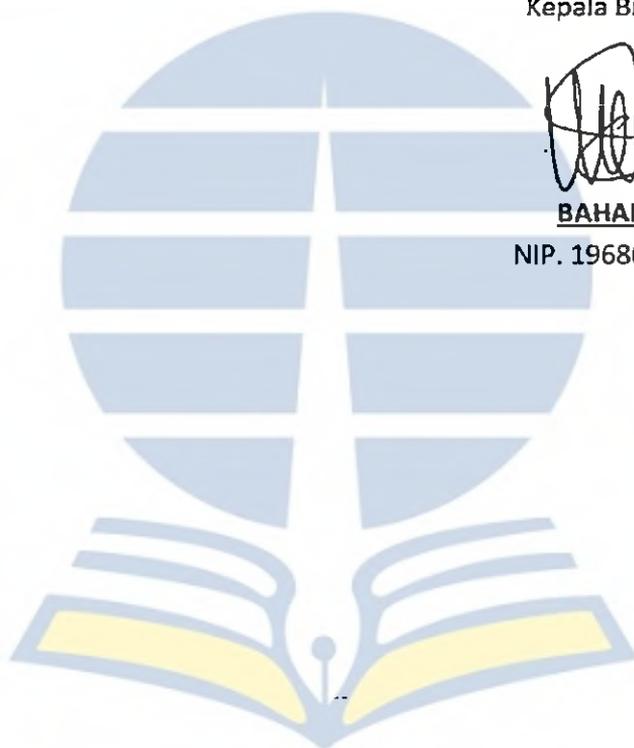
Nunukan, 02 Mei 2016

Kepala Bidang Bina Marga,



BAHARUDDIN. SR, ST

NIP. 19680720 200212 1 005 -



PERTANYAAN PESERTA PIM III

A. EVALUASI KONTEKS

1. Apa tanggapan saudara terhadap pelaksanaan Diklat PIM T.k.III pola baru berdasarkan Perka LAN nomor 12 Tahun 2013?

JAWABAN

1. Tanggapan saya terkait dengan pelaksanaan Diklat PIM T.k.III pola baru berdasarkan perka LAN no.12 tahun 2013 yaitu
 - metode pelajaran yang saya dapatkan berbasis pengalaman dan sesuai dengan jenjang tugas dan fungsi saya di Instansi Dinas Kesehatan
 - Pola baru ini saya mendapatkan pengalaman sejauh strategi yang efektif dalam menjabarkan visi dan misi organisasi di Instansi Saya bertugas sesuai dengan jabatan yang diamanatkan
 - Dalam diklat tersebut saya mendapat pengalaman sejauh mana kemampuan kita berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal supaya dapat mengelola instansi kita secara sistimetik dan visioner
 - Dalam peraturan diklat pola baru saya dapat pengalaman bagaimana kita dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita supaya dapat menghasilkan pemimpin yang mampu melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja kepemimpinan

B. EVALUASI INPUT

1. Selama mengikuti Diklat PIM III bagaimana tanggapan saudara terhadap sarana prasarana penunjang Diklat dan pelayanan penyelenggara?

JAWABAN

1. Tanggapan saya terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara adalah prasaran penunjang dan pelayanan penyeienggara sudah terlaksana sesuai dengan perka LAN nomor 12 tahun 2013, namun masih perlu peningkatan prasarana penunjang Diklat ditingkatkan atau ditambah prasarana dalam peningkatan kapasitas diklat dan pelayanan penyelenggara perlu peningkatan koordinasi antara instansi dengan pengelola Diklat sehingga peserta diklat dapat bersinergi dalam mengembangkan Inovasi sesuai dengan misi dan visi Instansi kami masing- masing.
2. Menurut saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?

JAWABAN

2. Yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang ke Diklatan dan pelayanan penyelenggar yaitu
 - Projector perlu penambahan yang baru karena diruang kelas Diklat Projector tidak jelas materi yang disampaikan nara sumber
 - Modem Wi-Fi Diklat masih bergabung dengan Kantor BKDD sehingga sinyal tidak optimal sehingga mengganggu proses pelaksanaan kerja kantor dan penyelenggaraan Diklat, maka perlunya penambahan secara khusus baik diruang kelas maupun di mess Diklat sehingga informasi dari luar dapat kita dapatkan secepatnya.
 - Perlunya Tenaga medis yang terjadwal secara on Time pada saat penyelenggara Diklat

C. EVALUASI PROSES

1. Kendala apa saja yang saudara hadapi dalam membuat rancangan proyek perubahan dan mengimplementasikan proyek perubahan tersebut

JAWABAN

- 1 - Masih ada masyarakat yang belum membuat jamban keluarga padahal arisan jamban sudah merupakan target rumahnya akan dibuat, namun yang menjadi kendala adalah pemilik rumah belum pulang dari Malaysia pada saat giliran arisan mereka yang akan di kerjakan
 - Bahan baku ban bekas mulai berkurang dan sebagian perbengkelan tidak lagi memberikan secara gratis akan tetapi mereka mulai menarget harga atau menjual
2. Upaya apa saja yang saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut

JAWABAN

- 2 - Masyarakat yang kepala keluarganya sedang bekerja di Malaysia sementara sasaran yang akan dibuat tidak ada pemiliknya maka untuk sementara waktu di arisan tersebut di lotre ulang kemudian arisan yang lotre tersebut dulu yang dikerjakan sambil menunggu kapan waktu pemilik yang tadinya tidak ada di buat belakangan
 - Bahan baku ban bekas tadinya berkurang diupaya setiap septic tank yang tadinya menggunakan 14 ban dapat dikurangi menjadi 6 ban bekas dengan sistim ban bekas tadi di balik atau di putar sehingga berbentuk mangkuk atau baskom sehingga dapat menampung banyak dan tinggi
 - Bahan baku ban bekas mulai berkurang dikarenakan sebagian perbengkelan tidak lagi memberikan secara gratis akan tetapi mereka mulai menarget harga atau menjual maka Tim Nusaniara sehat membuat proposal dimasukkan ke Bidang P2PL Dinas kesehatan selanjutnya di teruskan ke Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Nunukan
3. Bagaimana dukungan coach dan mentor saudara serta tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut?

JAWABAN

- 3 Dukungan Coach dan Mentor serta tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan tersebut dengan harapan bahwa proyek tersebut merupakan perubahan sanitasi lingkungan, peningkatan akses jamban keluarga, dapat meningkatkan proses dalam target cakupan kesehatan dan dapat memanfaatkan limbah menjadi teknologi yang sederhana dan tepat guna sehingga berkelanjutan dirasakan oleh masyarakat

D. EVALUASI HASIL

1. Bagaimana dengan Proyek Perubahan yang telah dibuat? Apakah masih berkelanjutan atau tidak implementasinya?

JAWABAN

1. Hasil Proyek perubahan yang telah dibuat masih berlanjut dan di implemntasikan dengan tim pendukung terutama Forum Kabupaten Sehat, Desa Sungai limau, Desa aji Kuning, Desa Maspui, Desa Sekaduyang taka, Nunukan Utara, Sei jeppun Nunukan Selatan, Binusan dan LKM masing-masing keurahan serta KOTAKU

2. Jika tidak apa alasannya?
3. Jika ya apa manfaat yang dirasakan terhadap organisasi saudara?

JAWABAN

3. Manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi saya yaitu
 - Dengan adanya pemanfaatan ban bekas sebagai septic tank dengan sistem arisan jamban keluarga maka penganggaran terkait dengan akses sanitasi berkurang dan program MDGs meningkat
 - Biaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan
 - Minimalisir tempat berkembang biaknya vektor penyakit yang berkembang biak pada ban bekas
 - Pemanfaatan ban bekas melalui sistem arisan jamban keluarga (SI-ARJA) maka jumlah akses sarana sanitasi meningkat sehingga jumlah angka penyakit berbasis lingkungan dapat menurun
 - Manfaat ban bekas sebagai septic tank dengan sistem arisan jamban keluarga, tumpukan ban bekas yang ada di masyarakat khusus di perbengkelan tidak lagi menjadi tempat berkembang biaknya serangga sebagai vektor penyakit, mencegah berkembang biaknya berbagai penyakit yang di sebabkan oleh kotoran manusia
 - Ban bekas sebagai septic tank dengan sistem arisan jamban keluarga merupakan solusi peningkatan akses sanitasi jamban.
 - Ban bekas bukan lagi ban bekas yang tidak berguna yang ada di perbengkelan akan tetapi menjadi ban bekas yang ramah lingkungan
 - Masyarakat Desa aji kuning dan sungai limau dapat terlindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan akses jamban keluarga yang aman, melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan.
 - Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan percontohan bagi Desa-Desa lain atau masyarakat Kabupaten Nunukan

Nunukan, 29 April 2016



H. RAMSIDAH, SKM

NIP.19711227 200112 2 001

DOKUMENTASI WAWANCARA EKSTERNAL



Wawancara dengan Kepala PKP2A III LAN



Wawancara dengan Kabid Diklat Apartur
PKP2A III LAN



Wawancara dengan Kepala BANDIKLAT
Kota Tarakan



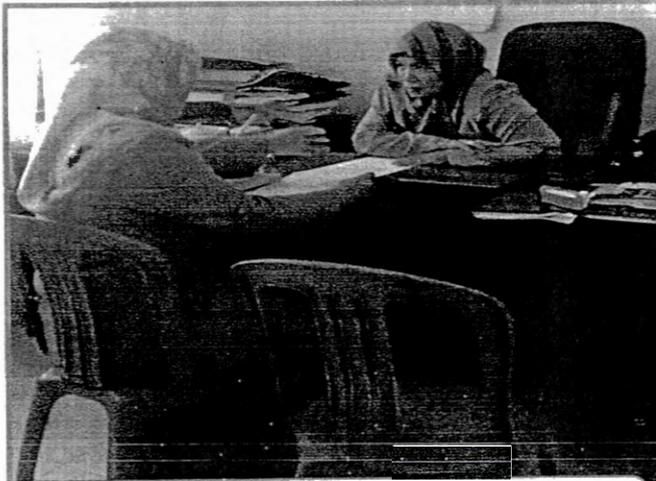
**Wawancara dengan Widyaiswara
Kota Tarakan**



**Wawancara dengan alumni Peserta
Diklat Pim Tk. III**



**Wawancara dengan alumni Peserta
Diklat Pim Tk. III**



**Wawancara dengan alumni Peserta
Diklat Pim Tk. III**



**Wawancara dengan alumni Peserta
Diklat Pim Tk. III**



**Wawancara dengan alumni Peserta
Diklat Pim Tk. III**

DOKUMENTASI WAWANCARA INTERNAL



Wawancara dengan Kepala BKDD
Kabupaten Nunukan



Wawancara dengan Kabid Diklat BKDD
Kabupaten Nunukan



Wawancara dengan Kasubbid Diklatpim
BKDD Kabupaten Nunukan

KEGIATAN VISITASI KE TUGU DWIKORA & TAMAN MAKAM PAHLAWAN



KUNJUNGAN KE MONUMEN TUGU DWIKORA



PENYERAHAN KENANG-KENANGAN OLEH PESERTA DIKLATPIM TK. III



KUNJUNGAN KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN JAYA KUSUMA

KEGIATAN OUT BOND DIKLATPIM TK. III



PARA PESERTA OUT BOND DIBAGI 4 TIM



PERMAIANAN UNTUK MELATIH KEKOMPAKAN TIM



"JEMBATAN KEBAHAGIAAN" MELATIH KERJASAMA DAN KESABARAN

BENCHMARKING KE KOTA BANTAENG



PESERTA DITERIMA DI OLEH PEMKOT BANTAENG



KUNJUNGAN KE LOKASI KHUSUS



FASILITAS KESEHATAN AMBULANS KOTA BANTAENG

SERTIFIKAT TOEFL

CN: 002218 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl. P. Flores No. 1 Telp. +62-841-73278 SAMARANGA INDONESIA
RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : DARTIS No. : 21477/UPT-BB/UM/0615
PLACE / DATE OF BIRTH : TANG PATE NOVEMBER 04, 1970
ADDRESS : DESA PAJING, KRAYAN SELATAN
DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
89	90.5	97	276.5 (THREE SEVEN FIVE)

Samarang, 05/06/2015
Drs. M. MA
Lektor

CN: 002218 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl. P. Flores No. 1 Telp. +62-841-73278 SAMARANGA INDONESIA
RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : FAJAR BUDHIYANTO No. : 21877/UPT-BB/UM/0615
PLACE / DATE OF BIRTH : BOYOLALI JUNE 30, 1973
ADDRESS : DESA MANSANG RT.IV KEL.LUMBIS KAB.NUNUKAN
DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
40	38	34.5	375 (THREE SEVEN FIVE)

Samarang, 05/06/2015
Drs. M. MA
Lektor

CN: 002239 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl. P. Flores No. 1 Telp. +62-841-73278 SAMARANGA INDONESIA
RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

NAME : DEDY SUPRAYITNO No. : 21847/UPT-BB/UM/0615
PLACE / DATE OF BIRTH : KEDIRU/OCTOBER 23, 1970
ADDRESS : JL. BHAYANGKARA RT.3 NUNUKAN
DATE OF TEST TAKEN : MAY 30, 2015

SECTION I Listening Comprehension	SECTION II Structure & Written Expression	SECTION III Reading Comprehension	TOTAL SCORE
33	34	42	363 (THREE SIX THREE)

Samarang, 05/06/2015
Drs. M. MA
Lektor

